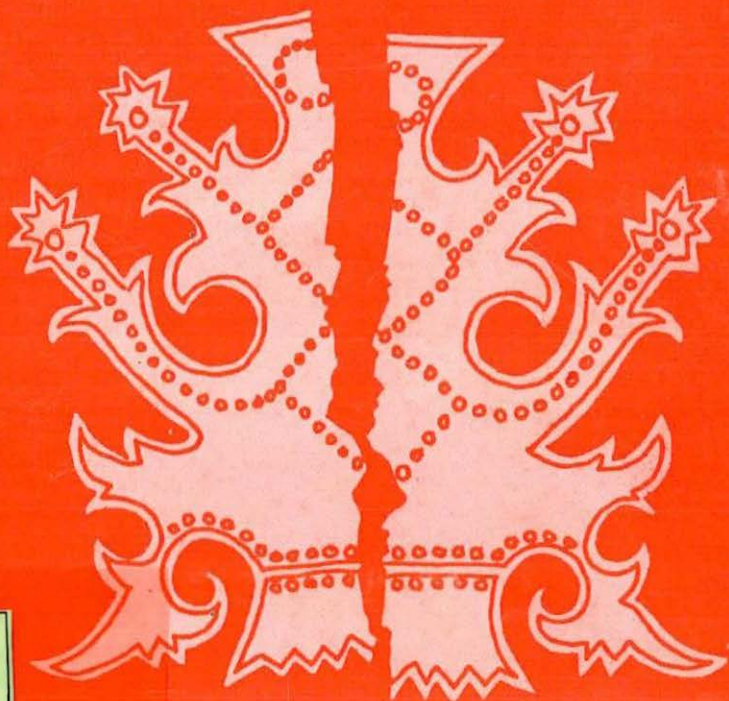


TANTANGAN DAN RONGRONGAN TERHADAP KEUTUHAN DAN KESATUAN BANGSA: Kasus Darul Islam di Aceh



Direktorat
Kebudayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1994**

399.601 MUH 4

Milik Depdikbud Tidak Diperdagangkan

**TANTANGAN DAN RONGRONGAN TERHADAP
KEUTUHAN DAN KESATUAN BANGSA :**

Kasus Darul Islam di Aceh

Oleh :

Muhammad Gade Ismail, dkk.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1994**

**TANTANGAN DAN RONGRONGAN TERHADAP KEUTUHAN
DAN KESATUAN BANGSA : Kasus Darul Islam di Aceh.**

Tim Penulis : Muhammad Gade Ismail, dkk.

Penyunting : R.Z. Leirissa

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah
Nasional

Jakarta 1993

Edisi 1993

Dicetak oleh : CV. DWI JAYA KARYA

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya proyek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku dengan judul *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa : Kasus Darul Islam di Aceh* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1992/1993.

Buku ini memuat uraian tentang gambaran umum daerah Aceh, sejarah singkat perkembangan masyarakatnya, kebijaksanaan pemerintah pusat di daerah Aceh, kondisi sosial politik dan ekonomi serta dinamika internal dan eksternal yang terjadi akibat terbentuknya pemerintahan tandingan bagi Pemerintah Negara Kesatuan RI.

Penelitian dan penulisan *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa : Kasus Darul Islam di Aceh* ini merupakan salah satu studi dari serangkaian studi dan penelitian tentang tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa dengan kasus-kasus yang lain yang sudah dan akan dikerjakan secara bertahap oleh proyek IDSNI.

Dengan mendalami dan memahami alasan dan latar berbagai kejadian yang merongrong keutuhan serta kesatuan bangsa diharapkan akan diketahui pola-polanya, sehingga apabila terlihat gejala-gejala yang sama segera dapat dicari penangkalnya agar tidak tersebar luas dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kesejarahan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Januari 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Sejarah Nasional**



Gamar Azayni Ohorella

NIP : 130.370.094.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal kebudayaan.....	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Umum Daerah Penelitian	
2.1 Geografi	7
2.2 Pembagian Administrasi Wilayah	8
2.3 Komposisi Geografis	10
2.4 Sejarah Singkat Perkembangan Masyarakat	12

Bab III	Aceh Dalam Perang Kemerdekaan, 1945 --1949	
3.1	Aceh Sekitar Proklamasi Kemerdekaan	26
3.2	Pertahanan di Daerah Aceh	31
3.3	Pengiriman Pasukan ke Medan Area	37
3.4	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Pusat	40
Bab IV	Pecahnya Pemberontakan	
4.1	Situasi Menjelang Pemberontakan	44
4.2	Sebab-sebab Terjadinya Pemberontakan	51
Bab V	Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Pemberontakan DI/TII di Aceh	
5.1	Tanggapan Pemerintah Terhadap DI/TII	64
5.2	Kabinet-kabinet Pemerintah dan Kebijakan Darul Islam	68
5.3	Pelaksanaan Kebijakan di Aceh	77
Bab VI	Epilog	
	Bidang Pendidikan	90
	Bidang Pemerintahan	91
	Daftar Pustaka	103
	Lampiran	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan bangsa asing, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 banyak mengalami tantangan, hambatan, dan ancaman dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Proklamasi Kemerdekaan yang dicetuskan itu menuntut upaya dan perjuangan yang kuat untuk mempertahankannya dari ancaman Pemerintah Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia selepas Perang Dunia II.

Bangsa Indonesia yang mencintai kemerdekaan berjuang dengan segala pengorbanan untuk tetap dapat menjaga kemerdekaan yang diproklamasikan. Perjuangan itu baik melalui forum diplomatik maupun dengan kekuatan militer menghasilkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1949. Dengan demikian ancaman terhadap keberadaan bangsa Indonesia dalam wadah suatu negara merdeka, yang berasal dari luar berhasil dihilangkan.

Dalam perjalanan sejarah, Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya muncul beberapa ancaman terhadap keutuhannya yang

berasal dari beberapa gerakan di daerah-daerah yang merongrong keutuhan dan kesatuan bangsa. Salah satu ancaman tersebut yaitu pemberontakan Darul Islam di Aceh.

Pada 21 September 1953, Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamasikan Daerah Aceh menjadi negara bagian dari Negara Islam Indonesia, yang didirikan oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat.

Darul Islam (DI) diproklamasikan pertama kali oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Kartosuwirjo kemudian membentuk Majelis Umat Islam, dan ia sendiri menjadi imam Negara Islam Indonesia (Boland, 1985:61).

Tindakan Teungku Muhammad Daud Beureueh memimpin pemberontakan di Aceh menentang kekuasaan pemerintah pusat Republik Indonesia, merupakan kejutan besar dipandang dari peranannya yang besar selama masa-masa sebelumnya dalam menegakkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ia adalah salah satu tokoh ulama yang terkenal dalam masyarakat Aceh. Sejak tahun 1939 ia memimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Organisasi ini memperoleh banyak pengikut di kalangan ulama dan masyarakat Aceh. Organisasi ini telah menunjukkan perannya yang besar pada tahun 1942 ketika kekuasaan Belanda di Aceh akan berakhir.

Peranan Daud Beureueh selama masa awal kemerdekaan juga cukup besar. Ketika Belanda melakukan serangan-serangan terhadap daerah Republik Indonesia dengan Agresi Militer Pertama dan khususnya setelah Agresi Militer Kedua, Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat sebagai gubernur militer untuk Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, dengan pangkat mayor jenderal tituler, berdasarkan Surat Keputusan No.4/WKP/SUM/47 tanggal 26 Agustus 1947 (Semdam I, 1972:125).

Setelah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibubarkan pada tahun 1949, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai wakil perdana menteri yang berkedudukan di Sumatra. Dalam kedudukannya yang

demikian, pada 17 Desember 1949, dengan mempergunakan kekuasaan istimewanya, ia membentuk Propinsi Aceh, yang ditetapkannya dengan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPM/1949 (Hasyim, 1984:8). Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat sebagai gubernur yang pertama.

Pembentukan Provinsi Aceh yang pertama itu segera menimbulkan masalah dengan pemerintah pusat, karena berdasarkan persetujuan Republik Indonesia dengan RIS 20 Juli 1950, Indonesia hanya terbagi menjadi 10 propinsi dengan tiga di antaranya berada di Sumatera, tanpa Aceh. Oleh karena itu pemerintah pusat berusaha untuk tidak dapat mengakui terbentuknya Propinsi Aceh tersebut dan menginginkan agar daerah tersebut dimasukkan ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh berusaha sekuat tenaga untuk tetap dapat mempertahankan status Provinsi Aceh yang telah diterima itu. Usaha tersebut misalnya dengan mengeluarkan mosi pada 20 Agustus 1950 (Ibrahimy, 1987; 58-59). Namun demikian perintah pusat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 50 tanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh akting Presiden Republik Indonesia, Mr.Asaat meleburkan Provinsi Aceh dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Provinsi Aceh yang telah berumur delapan bulan secara resmi dibubarkan .

Pembubaran Provinsi Aceh itu merupakan salah satu faktor dari sejumlah faktor yang sering disebutkan para penulis sebagai yang menyebabkan munculnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh. Namun demikian, buku ini ditulis dengan perspektif nasional. Titik tolak ini menimbulkan implikasi metodologis bahwa pembicaraan tentang pemberontakan DI/TII di Aceh dipusatkan pada pembahasan yang menyangkut masalah bahwa pemberontakan itu merupakan rongrongan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku serupa ini yang khusus ditujukan kepada para pembaca di kalangan pelajar tentang Pemberontakan Darul Islam di Aceh belum lagi pernah dihasilkan. Untuk maksud

tersebut diharapkan buku ini dapat memenuhi kekosongan yang ada. Bagi para pembaca yang berusaha untuk menemukan dinamika internal secara mendetail di Aceh mengenai pemberontakan DI/TII di daerah tersebut, telah tersedia buku-buku yang telah ditulis para ahli. Buku-buku tersebut antara lain ialah karya C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Buku ini diterbitkan oleh Grafiti Jakarta pada tahun 1983. Buku ini merupakan terjemahan dari buku asli yang berjudul *Rebellion Under the Banner of Islam*, yang diterbitkan untuk pertama kali oleh Koninklijke Instituut Voor Taal Land en de Volkenkun, dalam seri *Verhandeligen van het KITLV*, Leiden No. 94. Sebuah buku lain yaitu karangan Nazaruddin Syamsuddin yang berjudul, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 1990.

Khusus mengenai kisah tentang kembalinya Teungku Muhammad Daud Beureueh ke pangkuan ibu pertiwi, tersedia sebuah buku karangan M. Nur El -Ibrahimi yang berjudul, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, terbitan Gunung Agung Jakarta tahun 1987.

Sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang pelaku pemberontakan itu dan khusus membicarakan tentang mengapa Aceh memberontak ialah yang dikarang oleh Hasan Saleh dengan judul, *Mengapa Aceh Bergolak*, diterbitkan oleh Grafiti Jakarta pada tahun 1992. Selain dalam bentuk buku, tulisan-tulisan sejenis dalam bentuk karangan-karangan ringkas masih dapat dijumpai dalam beberapa majalah. Dengan demikian menjadi jelas bahwa buku ini ditulis dari sudut pandangan nasional Indonesia yang sudah barang tentu akan berbeda dari sudut pandang yang lain.

1.2 Tujuan Penelitian

Buku ini ditulis dengan tujuan utama yaitu untuk menggambarkan pemberontakan Darul Islam Indonesia di Aceh sebagai salah satu tindakan yang merongrong keutuhan Negara Republik Indonesia.

Gambaran seperti ini dibutuhkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman masa lampau yang amat berguna bagi tetap terjaganya keutuhan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka inilah maka sungguh sangat tepat ucapan Sir John Seeley yang mengatakan

bahwa tujuan utama mempelajari sejarah adalah agar kita dapat lebih arif sebelum sesuatu peristiwa terjadi.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar memberikan dua manfaat; pertama, adalah manfaat secara akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah khususnya yang berkaitan dengan topik rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Dengan dibicarakannya tentang pemberontakan Darul Islam di Aceh yang terjadi pada tahun 1953 itu, pengetahuan pembaca, terutama pada pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Atas akan menjadi bertambah. Dengan demikian pengetahuan mereka menjadi lebih diperkaya dengan tambahan kasus pemberontakan di Aceh. Manfaat kedua, yang juga tidak kalah penting adalah manfaat secara apraktis, yaitu akan dapat dipergunakannya pengalaman masa lalu, yang digambarkan dalam tulisan ini, untuk menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang upaya menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang dikerjakan untuk menulis buku ini, sesuai dengan objek penelitiannya dipergunakan Metode Sejarah Kritis, yaitu suatu proses yang mencakup empat langkah. Pertama-tama yang dikerjakan ialah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dimaksud baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber yang dikumpulkan ini tidak saja terbatas pada sumber tertulis tetapi juga sumber lisan. Mengenai sumber tertulis berasal dari berbagai tulisan dari berbagai buku, majalah maupun surat kabar. Sementara itu, sumber-sumber lisan dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dengan peristiwa yang dibicarakan atau mereka yang menyimpan informasi tentang peristiwa itu secara lisan.

Langkah kedua yang ditempuh yaitu dengan melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Kritik ini baik secara ekstern maupun intern untuk menetapkan intensitas dan kredibilitas sumber. Dengan demikian akan dapat diputuskan apakah

sumber-sumber tersebut, layak atau tidak untuk dipakai sebagai dasar penulisan.

Langkah ketiga yaitu melakukan interpretasi sumber untuk memunculkan berbagai fakta yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan suatu deskripsi dan juga penjelasan tentang Pemberontakan Darul Islam di Aceh. Selanjutnya pada langkah terakhir disusun sebuah ceritera sejarah mengenai pemberontakan yang dimaksud dengan merangkaikan berbagai fakta yang diperoleh dari kegiatan pada langkah ketiga. Dengan demikian pada tahap akhir adalah kegiatan historiografi yang melahirkan sebuah kisah tentang Pemberontakan Darul Islam di Aceh.'

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan buku tentang Pemberontakan Darul Islam di Aceh ini dibagi menjadi tujuh bab. Bab pertama yang merupakan pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang dan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. Bab II memuat uraian tentang keadaan umum daerah penelitian, yang membicarakan tidak saja keadaan lingkungan fisik tetapi juga sejarah singkat masyarakat Aceh. Bab III memuat uraian tentang perkembangan masyarakat Aceh selama masa perang kemerdekaan. Bab ini perlu dibicarakan secara khusus dalam bab tersendiri karena latar belakang munculnya pemberontakan Darul Islam di Aceh mempunyai kaitan yang erat sekali dengan situasi dan kondisi di dalam masyarakat Aceh pada periode ini. Bab IV memuat uraian tentang pecahnya Pemberontakan Darul Islam di Aceh, mencakup gambaran tentang pemberontakan itu sendiri.

Khusus mengenai kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan kemiliteran dalam menyelesaikan pemberontakan itu, disajikan dalam Bab V.

Bab VI memuat uraian tentang usaha-usaha pembangunan yang dijalankan pemerintah dalam usaha memperbaiki dan membangun masyarakat Aceh yang hancur dan rusak karena pemberontakan Darul Islam.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA ACEH

2.1 *Geografi*

Provinsi Daerah Istimewa Aceh disebut sebagai salah satu daerah istimewa didasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Keputusan Wakil Perdana Menteri I pada tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan status Provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan keputusan itu, Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki tiga keistimewaan yang diakui oleh undang-undang, yaitu di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.

Secara geografis Provinsi Daerah Istimewa Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera atau di wilayah paling barat dari Indonesia, yaitu pada posisi 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur. Ditinjau dari segi lingkungan yang berbatasan dengan daerah ini, terlihat bahwa di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Letak geografis Daerah Istimewa Aceh sangat strategis sehingga merupakan pintu gerbang sebelah barat Kepulauan Indonesia. Di samping itu, karena sebagian wilayahnya di pantai utara terletak di Selat Malaka, maka daerah ini penting pula dipandang dari sudut lalu-lintas internasional sejak permulaan tarikh Masehi.

Selat Malaka merupakan jalan penting dalam gerak migrasi bangsa-bangsa di Asia, dalam gerakan ekspansi kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia, Selat Malaka adalah jalan penghubung utama antara dua pusat kebudayaan Cina dan India. Oleh karena itulah wilayah sekitar Selat Malaka selalu mempunyai arti penting sepanjang gerak sejarah Indonesia. Muncul dan berkembangnya pusat-pusat kekuasaan di kawasan ini semenjak masa pengaruh Hindu dan Islam berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan di sekitar Selat Malaka. (Ismail, 1993;2).

Kedudukan Daerah Istimewa Aceh yang strategis pada jalur perdagangan internasional menyebabkan daerah itu sejak permulaan terbentuknya jaringan perdagangan internasional pada abad pertama Masehi, tampaknya sudah dikenal (Burger dan Prayudi, 1962;14).

Luas wilayah Daerah Istimewa Aceh adalah 57.365,57 km² atau 5.736.557 ha, dengan rincian sebagai berikut. Kawasan hutan 4.476.761 ha (78,0%), areal pertanian 669.269 ha (11,7%), perkampungan 91.299 ha (1,6%), dan lain-lain 499.298 ha (8,7%). Kawasan hutan dapat dirinci lagi sebagai berikut. Hutan lebat 3.979.096 ha (69,4%), belukar 353.915 ha (6,2%), dan hutan sejenis 143.750 ha (2,5%). Areal pertanian terdiri atas sawah 256.410 ha (4,5%), tegalan/ladang 76.535 ha (4,5%), perkebunan 196.618 ha (3,4%) dan kebun campuran 139.706 ha (2,4%). Selain itu alang-alang 32.661 ha (0,6%), danau, kolam, dan rawa-rawa 327.576 ha (5,7%) serta tanah tandus/rusak 139.061 ha (2,4%).

2.2 Pembagian Adiministrasi Wilayah

Secara administratif Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan ibukota Banda Aceh terbagi atas 10 daerah tingkat II yaitu delapan kabupaten, dua kotamadya, dan sebuah kota administratif. Kesepuluh daerah tingkat II masing-masing adalah Kabupaten Aceh Besar (2.686 km²), Pidie (4.161 km²), Aceh Utara (5.067 km²), Aceh Timur (8.243 km²), Aceh Tenggara (9.951 km²), Aceh Tengah (5.772 km²), Aceh Barat (12.085 km²), dan Kabupaten Aceh Selatan (8.951 km²).

ditambah dengan Kotamadya Banda Aceh (61 km²) dan Kotamadya Sabang (119 km²) serta Kota Administratif Lhokseumawe. Dalam waktu dekat ini direncanakan akan diresmikan sebuah kota administratif lainnya yaitu Langsa. Selanjutnya dapat ditambahkan bahwa seluruh daerah tingkat II dibagi menjadi 139 kecamatan, 591 mukim, dan 5463 gampong/desa/kelurahan (Tabel III-2).

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Aceh dibagi menjadi tiga wilayah kerja pembantu gubernur, masing-masing adalah sebagai berikut :

- (1) Wilayah I meliputi Kotamadya Banda Aceh, Kotamadya Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie dengan pusat administrasi berkedudukan di Banda Aceh.
- (2) Wilayah II meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara dengan pusat administrasi berkedudukan di Lhokseumawe.
- (3) Wilayah III meliputi Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan dengan pusat administrasi berkedudukan di Meulaboh.

Disamping itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha pembangunan, atas dasar pertimbangan pola produksi, prasarana ekonomi, konfigurasi potensi ekonomi, perkembangan penduduk, keseragaman sosio-cultural serta kemungkinan pengembangan wilayah, daerah Aceh dibagi menjadi empat wilayah pembangunan sebagai berikut.

- (a) Wilayah Pembangunan I, meliputi Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.
- (b) Wilayah Pembangunan II, meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kotamadya Sabang.
- (c) Wilayah Pembangunan III, meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur.
- (d) Wilayah Pembangunan IV, meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pola perkembangan ekonomi yang telah dicapai dan potensi perkembangannya di masa mendatang di Wilayah Pembangunan I dan

IV digolongkan dalam kawasan atau Zona Pertanian. Sementara Wilayah Pembangunan II dan III digolongkan ke dalam kawasan atau Zona Industri (Peta I-1, I-2, I-3, I-4).

2.3 Komposisi Geografis

2.3.1 Pulau

Daerah Istimewa Aceh sebagai bagian dari Pulau Sumatera dikelilingi oleh sejumlah pulau, besar dan kecil. Secara keseluruhan ada 119 buah pulau. Pulau-pulau ini ada yang dihuni ada yang tidak dihuni oleh penduduk. Pulau yang relatif besar dan dihuni penduduk adalah Pulau Simeulu dan Pulau Banyak di pantai barat dan selatan, serta Pulau Weh, Pulau Breueh, dan Pulau Nasi di pantai barat laut dari daerah Aceh.

2.3.2 Selat

Meskipun daerah Aceh dikelilingi oleh banyak pulau, tetapi hanya ada sebuah selat yang memiliki nama secara resmi yaitu Sempitan Malaka yang memisahkan Pulau Weh dengan daratan Aceh. Selebihnya sampai saat ini belum memiliki nama selat resmi.

2.3.3 Laut

Daerah perairan Aceh lebih-kurang 58.563 km², terdiri atas perairan umum 47.400 km², laut teritorial 23.563 km², dan perairan laut dalam 35.000 km². Daerah perairan tersebut dikelilingi oleh lautan lepas yang cukup luas yaitu Samudera Indonesia di sebelah barat dan selatan serta Laut Andaman di sebelah utara.

2.3.4 Gunung

Seperti halnya dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dilalui oleh jalur Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan ini melewati daerah pedalaman Aceh dari arah barat laut ke tenggara. Pada jalur Pegunungan Bukit Barisan terdapat 39 buah gunung. Puncak tertinggi di bagian utara adalah Gunung Seulawah Agam (1.806 m). Di bagian tengah terdapat empat gunung yang relatif tinggi, yaitu Gunung Peut Sagoe (2.780 m), Gunung Geureudong (2.855 m), dan Gunung Abong-Abong (2.985 m), serta Gunung

Lembu (3.044 m). Di barat menjulang gunung tertinggi di Aceh yaitu Gunung Leuser (3.381 m). Dekat perbatasan Sumatera Utara terdapat Gunung Ucap Malu (3.187 m) dan Gunung Bendahara (3.012 m).

Selain itu, masih terdapat gunung-gunung yang tidak terlalu tinggi seperti Gunung Rajawali, Gunung Talang, Gunung Burni Telong, Gunung Bruang Malam, Gunung Burni Kliten, Gunung Kulam Nawa (Aceh Tengah), Gunung Panyang, Gunung Ujeung, Gunung Karang, Gunung Batee Tambon (Aceh Utara), Gunung Tuan, Gunung Kerambi, Gunung Batu Girah, Gunung Batu Ikan, Gunung Tangga Besi (Aceh Selatan), Gunung Seulawah Inong, Gunung Singgah Mata, Gunung Lakar (Pidie), Gunung Geureutee, Gunung Tampeu, Gunung Kuda, Gunung Keramat, Gunung Mata Ie (Aceh Besar), Gunung parkisan, Gunung Kemiri, Gunung Panji-Panji, Gunung Lianggara, dan Gunung Tinjo (Aceh Tenggara).

Dapat ditambahkan bahwa di antara gunung-gunung tersebut terdapat dua buah gunung yang termasuk gunung berapi tetapi yang tidak aktif yaitu Gunung Seulawah Agam dan Gunung Burni Telong.

2.3.5 Sungai

Sungai-sungai yang terdapat di Daerah Istimewa Aceh, dilihat dari sudut muaranya, dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Hindia dan yang bermuara ke Laut Andaman. Jumlah keseluruhan sungai yang tergolong penting ada 73 buah. Sungai-sungai yang bermuara ke Laut Andaman adalah Krueng Aceh, Krueng Seulimun, Krueng Raya, Krueng Meureudu, Krueng Trenggadeng, Kreung Tiro, Krueng Baro, Krueng Batee, Krueng Peusangan, Krueng Karep, Krueng Gerpa, Krueng Lumut, Kreung Samalanga, Krueng Jeunib, Krueng Peudada, Krueng Jambo Aye, Krueng Arakundu, Krueng Peulreulak, Krueng Tamiang, dan Krueng Bayeun.

Adapun sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia adalah Krueng Teunom, Krueng Woyla, Krueng Suakseumaseh, Krueng Meureubo, Krueng Seunagan, Lawe Bulan, Lawe Mas, dan Lawe Semplang. Sejumlah sungai dapat dilayari 15-20 km ke pedalaman.

2.3.6 Danau

Di Daerah Istimewa Aceh terdapat dua buah danau yang relatif besar yaitu Danau Laut Tawar di Takengon dan Danau Aneuk Laot di Kotamadya Sabang. Luas danau Laut Tawar sekitar 660 km². Danau ini terletak di Kabupaten Aceh Tengah pada ketinggian 1.225 m di atas permukaan laut. Danau Aneuk Laot memiliki luas sekitar 300 km². Kedua danau tersebut mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata yang relatif besar. Danau Laut Tawar berpotensi untuk pengembangan pariwisata dan budidaya ikan. Danau Aneuk Laot dapat dijadikan sumber air tawar bagi keperluan kapal laut.

2.4 Sejarah Singkat Perkembangan Masyarakat

Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah salah satu daerah tingkat I dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Daerah ini memiliki sejarah yang panjang sebagai suatu kesatuan kebudayaan. Kelompok-kelompok masyarakat yang berpusat pada muara-muara sungai dan lembah-lembah yang subur mulai ditemukan sejak abad ke-13. Sebagai suatu kerajaan yang memiliki wilayah yang agak luas melebihi komunitas-komunitas seperti yang terbentuk pada awal abad ke-13 telah mulai muncul sejak abad ke-16, yaitu dengan dibentuknya Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Syah.

Sejak masa terbentuknya kerajaan itu hingga perempat terakhir abad ke-19, Kerajaan Aceh berdiri tegak sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan merdeka. Periode ini dipandang sebagai fase pertama perkembangan masyarakat Aceh. Periode kedua yaitu sejak tahun 1873 yang ditandai oleh permulaan Perang Belanda di Aceh, dan diikuti oleh masa pemerintahan kolonial Belanda di Aceh. Periode kedua ini berakhir pada tahun 1942.

Masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 hingga 1945 adalah suatu periode tersendiri dalam perkembangan masyarakat Aceh. Periode ini segera disambung oleh Zaman Kemerdekaan yang dimulai oleh proklamasi kemerdekaan. Gambaran secara ringkas perkembangan masyarakat Aceh dalam tahapan-tahapan yang telah disebutkan, akan diterangkan satu persatu.

2.4.1 Zaman Kerajaan

Wilayah Kerajaan Aceh yang dikenal pada abad ke-16, jauh sebelumnya telah dilintasi oleh lalu lintas perdagangan internasional yang menghubungkan Cina dan India sejak tahun-tahun pertama tarikh Masehi. Pada abad ke-13 beberapa kerajaan pantai yang telah memeluk agama Islam adalah Peureulak dan Pasai telah muncul dalam perkembangan sejarah. Seabad sesudah itu, muncul pula Kerajaan Pidie dan Kerajaan Daya.

Mengenai daerah pusat Kerajaan Aceh di Banda Aceh, memang terdapat beberapa sumber informasi yang menyatakan bahwa di sana telah terdapat para penguasa. Namun demikian sumber-sumber informasi itu masih sangat terbatas untuk merekonstruksi kembali secara bulat.

Gambaran tentang perkembangan masyarakat Aceh menjadi agak jelas pada periode awal abad ke-16. Pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam mulai terbentuk pada kira-kira tahun 1520. Sultan Ali Mughayat Syah, yaitu sultan pertama Aceh Darussalam, berhasil melepaskan diri dari dominasi Pidie. Ia kemudian menaklukkan Pidie, Daya dan Pasai. Usaha ini ditempuh setelah terlebih dahulu ia mempersatukan dua kerajaan kecil yang terdapat di lembah Aceh Besar.

Muncul dan berkembangnya Kerajaan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16 mempunyai ikatan yang erat dengan perkembangan di kawasan tersebut pada waktu itu. Pada tahun 1511 Portugis berhasil menduduki Malaka, dan kejadian tersebut merupakan awal dari perubahan besar yang terjadi di kawasan tersebut.

Para pedagang Islam yang semula berdiam dan melakukan aktivitas perdagangan di Malaka, dengan jatuhnya bandar itu terpaksa harus mencari daerah basis yang baru sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai pedagang-pedagang Islam. Pedagang yang melakukan eksodus itu memilih Banda Aceh sebagai basis baru mereka. Hal ini karena bandar tersebut terletak sangat strategis pada rute perdagangan internasional antara India dan Cina (Ismail, 1988;3).

Melihat pertumbuhan Kerajaan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16, sekurang-kurangnya terdapat dua pilar utama yang menopang

perkembangan masyarakat. Pertama Islam dan kedua ialah perdagangan. Kedua pilar ini untuk masa-masa selanjutnya merupakan dua unsur yang menjadi benang merah perkembangan masyarakat Aceh. Pasang-surutnya kekuasaan politik Kerajaan Aceh dalam banyak hal ditentukan oleh perkembangan ekonomi.

Keberhasilan Ali Mughayat Syah membangun Kerajaan Aceh Darussalam disokong sepenuhnya oleh pedagang-pedagang Islam. Penaklukan-penaklukan yang dijalankannya pada awal abad ke-16 tidak sekedar untuk perluasaan wilayah kekuasaan politik tetapi juga dengan maksud untuk menguasai wilayah-wilayah yang memiliki sumber-sumber ekonomi. Raja sebagai penguasa di bidang politik juga berperan sebagai penguasa sumber-sumber ekonomi. Pasai sejak abad ke-14 dan Pidie sejak abad ke-15 adalah daerah-daerah penghasil lada di Aceh.

Masa awal perkembangan Kerajaan Aceh ditandai oleh besarnya kekuasaan para pedagang di bidang perdagangan yang juga sekaligus mempunyai pengaruh yang besar di bidang politik. Para pedagang kaya ini yang disebut sebagai "Orang Kaya" malah mempunyai pasukan pengawal pribadi yang berjumlah ratusan orang. Oleh karena itu orang kaya mempunyai peranan besar dalam sistem kekuasaan di Aceh pada awal permulaan perkembangannya. Keadaan ini baru mengalami perubahan ketika Al Qahar (1537-1571) dan Iskandar Muda (1607-1636) memegang tampuk pemerintahan. Kedua sultan ini tidak saja bertindak sebagai penguasa di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi. Kekuasaan para orang kaya yang pada masa-masa sebelumnya dihancurkan oleh kedua penguasa ini yang memerintah Kerajaan Aceh dengan tegas dan penuh kekuatan.

Para pedagang asing yang ingin membeli barang-barang yang dihasilkan di daerah Aceh atau ingin menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan sultan. Transaksi dagang oleh pedagang asing hanya boleh dilakukan dengan sultan di pusat kesultanan, di Banda Aceh Darussalam. Barang-barang seperti lada yang dihasilkan di pantai barat dan utara Aceh harus diangkut ke pusat kesultanan dengan harga yang ditetapkan oleh sultan. Sultan yang menjual barang-barang itu kepada pedagang asing.

Negeri-negeri yang melakukan hubungan langsung dengan pedagang asing dihukum keras oleh sultan.

Perluasan wilayah yang dilakukan baik oleh Al-Qahar maupun Iskandar Muda ke sepanjang pantai timur dan barat Pulau Sumatera dan ke beberapa daerah di Semenanjung Melayu juga dapat dipandang sebagai upaya penguasaan daerah produksi lada. Persaingan dan permusuhan yang berkepanjangan dengan Portugis di Malaka tidak saja karena alasan agama tetapi juga dilatarbelakangi oleh faktor yang terkait dengan kepentingan perdagangan.

Masa keemasan Kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda juga dapat dilihat tidak hanya dari sudut kekuasaan politik tetapi juga dalam bidang ekonomi dan agama.

Penguasaan wilayah yang cukup luas baik di Pulau Sumatera maupun di Semenanjung Melayu membawa hasil dalam bentuk kemakmuran yang cukup tinggi dan pada gilirannya membuka kesempatan yang luas bagi pengembangan ilmu agama. Para sarjana yang hidup pada waktu itu dapat lebih mengembangkan ilmu pengetahuannya dalam kondisi struktur politik, sosial dan ekonomi yang baik dan stabil. Sejarah mencatat bahwa beberapa ahli di bidang agama yang terkenal di Aceh seperti Hamzah Fansuri, Syeikh Abdurrauf, dan Nurrudin Arraniry berhasil menciptakan karya-karya monumental mereka pada masa Kerajaan Aceh berada pada titik kulminasinya.

Setelah pemerintah Iskandar Muda, secara berangsur kekuasaan Aceh mulai surut. Kekuasaan politik dan juga perdagangan mulai menurun. Para pakar yang mengembangkan ilmu pengetahuan pun mulai berkurang. Sementara itu kekuatan Hindia Belanda mulai menggerogoti daerah kekuasaan Aceh di pantai barat Pulau Sumatera, terutama setelah Perjanjian Painan pada tahun 1662.

Masa waktu sekitar 80 tahun setelah Iskandar Tsani yang menggantikan Iskandar Muda, Aceh berada di tangan empat orang ratu (sultanah) secara berturut-turut. Berikutnya baru dipegang kembali oleh para sultan. Dalam masa yang panjang ini, sejak pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-17, hampir dapat dikatakan tidak ada perkembangan yang berarti bagi masyarakat Aceh.

Secara umum periode ini ditandai oleh lemahnya kekuatan pusat. Para uleebalang sebagai penguasa pada masing-masing kenegerian, cenderung bertindak mandiri, terlepas dari kontrol pusat, terutama dalam hal kegiatan perdagangannya dengan para pedagang asing.

Perubahan politik dan ekonomi kembali muncul pada awal abad ke-19. Pada masa ini, terutama sebagai akibat dari perang Napoleon di Eropa, para pedagang Amerika Serikat dari Boston dan Harlem, melakukan inisiatif perdagangan langsung dengan pantai barat Sumatera. Daerah-daerah sekitar Barus, Singkil, dan Trumon yang selama setengah abad sebelumnya adalah daerah penghasil lada yang utama di pantai barat Sumatera mulai tidak berperan lagi. Daerah penghasil lada pindah ke wilayah sekitar Meulaboh. Selain itu juga muncul daerah penanaman lada di pantai timur Aceh, mulai dari muara Sungai Ayer di bagian utara sampai ke daerah Tamiang di bagian selatan.

Sistem pemerintahan yang diwariskan oleh para sultan di Aceh tersusun dalam beberapa peringkat pemerintahan. Peringkat tertinggi merupakan pemerintah pusat yang berada di tangan sultan dan berkedudukan di ibu negara, Kutaraja (sekarang dikenal dengan nama Banda Aceh). Peringkat ke dua di bawah pemerintah pusat dijumpai pemerintahan uleebalang. Pemerintahan uleebalang selanjutnya membawahi pemerintahan peringkat ketiga yaitu sistem pemerintahan mukim. Sistem pemerintahan yang terendah atau keempat adalah sistem pemerintahan gampong (desa) yang dipimpin oleh seorang keuchik (kepala desa).

Peranan utama, cerdik-pandai dan penguasa adat terdapat pada setiap peringkat pemerintahan, yang dalam kurun waktu tersebut, ikut mempengaruhi pola pikir kehidupan masyarakat Aceh yang bermottokan "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana" (Adat sesuai dengan arahan Sultan Iskandar Muda, hukum Islam sesuai dengan petunjuk dari Syiah Kuala, tatakrama protokuler seperti yang diterapkan oleh Putri Pahang dan kebiasaan lokal mengikuti petunjuk hulubalang). Demi motto tersebut dapat dipahami bahwa peranan wanita telah lama masuk ke dalam kehidupan masyarakat Aceh.

2.4.2 *Zaman Hindia Belanda*

Masa sekitar dua dekade terakhir pada abad ke-19 adalah masa peperangan besar antara Hindia Belanda dengan Kerajaan Aceh. Perang ini berlangsung puluhan tahun lamanya. Meskipun sebagian penulis berpendapat bahwa perang itu berakhir pada tahun 1903 yaitu ketika Sultan Muhammad Daod Syah berdamai dengan Pemerintah Hindia Belanda, ataupun tahun 1911 ketika para ulama menghentikan peperangan secara besar-besaran terhadap Belanda sampai akhir masa kekuasaannya pada tahun 1942, tetap tidak pernah merasa aman dalam menjalankan kekuasaannya (Lihat Ibrahim Alfian, 1985, dan P. van veer, 1969). Perlawanan rakyat dalam skala kecil, bahkan perlawanan secara nekad yang dilakukan secara perseorangan oleh orang-orang Aceh, sering terjadi sampai tahun 1942 (terkenal dengan istilah *Atjeh moorden*).

Perang Belanda di Aceh dimulai secara resmi pada 26 Maret 1873, ketika F.N. Nieuwenhuijzen secara resmi, dari atas geladak kapal *Citadel van Antwerpen* yang berlabuh diperairan Banda Aceh, mengumumkan ultimatum perang terhadap Kerajaan Aceh. Ekspedisi militer Belanda yang pertama ini mengalami kegagalan total. Pimpinan pasukan penyerbu J.H. Kohler tewas diterjang peluru rakyat Aceh di depan Mesjid Raya. Karena situasi yang tidak memungkinkan lagi, maka pasukan Hindia Belanda ditarik kembali ke Batavia.

Untuk menebus kekalahan pertama ini Pemerintah Hindia Belanda, dengan persiapan dan jumlah pasukan serta persenjataan yang lebih besar dan lebih matang, merencanakan penyerbuan kembali ke Aceh. Setelah didahului oleh pengiriman sejumlah agen rahasia untuk mengumpulkan informasi, akhirnya J. van Swieten, pensiunan jenderal Angkatan Bersenjata Hindia Belanda yang memiliki banyak pengalaman dalam berbagai perang di Indonesia, diaktifkan kembali untuk memimpin ekspedisi militer ke Aceh.

Pada 1 November 1873 sebenarnya seluruh pasukan yang disiagakan untuk ekspedisi ke Aceh telah siap untuk diberangkatkan, tetapi berhubung munculnya wabah kolera, pasukan baru diberangkatkan pada 12 November 1873. Pada 9 Desember 1873 mereka mulai didaratkan untuk menundukkan Kerajaan Aceh.

Meskipun pihak Aceh dalam menghadapi serangan lanjutan tersebut telah berusaha menyusun pertahanan yang lebih baik di bawah Panglima Tertinggi Tuwanku Hasyim dibantu oleh pasukan dari berbagai kenegerian di luar Aceh Besar, tetapi mesjid raya banda Aceh, yang merupakan salah satu benteng pertahanan rakyat Aceh terpenting dekat istana raja, jatuh ke tangan Belanda pada 6 Januari 1874. Istana raja pun berhasil direbut Belanda pada 24 Januari 1874. Beberapa saat sebelum istana jatuh ke tangan Belanda, Sultan Aceh Mahmud Syah telah terlebih dahulu mengungsi. Akibat terkena wabah kolera, sultan meninggal di Lueng Bata pada 28 Januari 1874.

Pemerintah Hindia Belanda saat ini berkesimpulan bahwa jatuhnya istana sultan ke tangan mereka dengan ekspedisi militer ke Aceh berhasil baik. Dengan usaha berikut dari pihak penguasa militer Belanda sebenarnya ingin memaksakan sultan Aceh mengakui kekuasaan Hindia Belanda, tetapi tujuan terpenting ini tidak tercapai karena sultan Aceh telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Van Swieten sebagai panglima balatentara Hindia Belanda pada waktu itu, meskipun mengetahui ada beberapa calon pengganti Sultan Mahmud Syah, ia tidak berusaha untuk mengangkat atau mengakui salah satu calon tersebut, karena ia berkeyakinan bahwa siapa pun yang akan menjadi sultan, tidak memberikan jaminan bagi takluknya seluruh Aceh kepada kekuasaan Hindia Belanda. Keyakinannya ini didasarkan pada kenyataan bahwa sultan Aceh pada saat ini tidak begitu berpengaruh lagi dalam menetapkan kebijakan yang dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh uleebalang.

Pada 31 Januari 1874 van Swieten mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Kesultanan Aceh menjadi milik Hindia Belanda, karena berhasil dikalahkan dengan kekuatan senjata. Selanjutnya van Swieten berusaha agar kepala wilayah dan penduduk di Aceh Besar mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Para kepala wilayah yang mengakui kekuasaan Hindia Belanda, tetap dipertahankan pada posisi semula. Pernyataan ini dipertegas dengan surat pengangkatan yang baru (Akte van Aanstelling).

Sebagai pengganti Sultan Mahmud Syah, para pemimpin di Aceh saat itu sepakat mengangkat Sultan Muhammad Daod Syah, tetapi

karena ia belum dewasa. Tuwanku Hasyim mendapat dukungan penuh dari para pemimpin lain seperti T. Panglima Polem dan panglima-panglima lainnya.

Mengenai peperangan melawan Belanda di Aceh dapat pula dicatat bahwa sejak awal peperangan para ulama secara bahu-membahu bersama pemimpin adat (penguasa pemerintahan) berusaha keras mengusir Belanda. Ketika itu para pemimpin adat berusaha menghentikan perlawanan. Keadaan ini terjadi terutama setelah Sultan Muhammad Daod pada tahun 1903 terpaksa harus menyerah kepada Belanda karena isteri dan putra mahkota disandera Belanda.

Perlawanan yang dipimpin para ulama dalam bentuk pasukan yang terorganisasi berlangsung sampai tahun 1911. Setelah itu perlawanan mereda karena sejumlah besar ulama "syahid" dalam peperangan. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah merasa aman dalam menjalankan kekuasaannya di daerah ini sampai mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942.

Perang Belanda di Aceh yang dimulai sejak Maret 1873 membawa pengaruh yang besar bagi perekonomian daerah ini. Blokade pantai secara ketat yang dijalankan sejak ekspedisi pertama menyebabkan banyak kesulitan di Aceh. Barang-barang ekspor Aceh yang sebelumnya diangkut ke pulau Penang mengalami banyak hambatan. Impor dari Pulau Penang juga mengalami kemacetan. Oleh karenanya sikap politik beberapa uleebalang yang mengakui kekuasaan Hindia Belanda sejak awal perang tentu dapat dimengerti bila dilihat dari segi kepentingan ekonomi mereka.

Selanjutnya perang yang berlangsung lama tersebut telah menyebabkan ekonomi rakyat menjadi lumpuh. Oleh karena itu sejak van Heutsz diangkat menjadi gubernur sipil dan militer di Aceh pada tahun 1898, perbaikan ekonomi rakyat menjadi hal yang diperhatikan dalam paket kebijaksanaan menaklukkan Aceh secara total. Ekspedisi-ekspedisi militer yang digerakkan secara besar-besaran ke lembah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur untuk menundukkan para kepala wilayah yang masih saja menentang kekuasaan Hindia Belanda segera diikuti oleh kebijaksanaan di bidang ekonomi.

Sejak tahun 1898 di daerah Aceh Timur yang relatif aman mulai dibuka kesempatan bagi penanaman modal swasta di bidang pertambangan minyak bumi dan perkebunan besar. Peureulak adalah kenegerian pertama di Aceh Timur yang dimasuki perusahaan pertambangan minyak bumi.

Usaha perkebunan tembakau dicoba pada beberapa daerah konsesi sekitar Tamiang, tetapi usaha ini mengalami kegagalan karena tanahnya tidak cocok untuk tanaman tersebut. Pada tahun 1905, dengan modal perusahaan Belgia, tanaman tersebut diganti dengan tanaman karet. Melihat kenyataan bahwa tanah di Aceh Timur amat cocok untuk perkebunan karet, sejak tahun 1907 Pemerintah Hindia Belanda membuka kebun karet di sekitar Langsa. Usaha ini pun segera diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

Usaha penanaman modal swasta di Aceh Timur dalam bidang perkebunan karet dan kelapa sawit menjadikan wilayah ini berubah menjadi pusat perkebunan besar di Aceh. Keadaan serupa juga terjadi dalam sektor pertambangan minyak bumi.

Khusus di bidang perekonomian rakyat, beberapa upaya perbaikan dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Diantaranya ialah pembangunan irigasi dan diperkenalkannya varietas tenaga penyuluh pertanian. Usaha-usaha ini membawa hasil dalam perbaikan ekonomi rakyat.

Akhirnya perlu dijelaskan bahwa pada awal masa pemerintahan Hindia Belanda, Aceh dan daerah taklukannya (Aceh en onderhoorigheden) dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kutaraja. Selanjutnya pada tahun 1918 daerah ini dijadikan keresidenan Aceh yang merupakan bagian dari Gouvernement van Soematra. Semenjak itu daerah ini dipimpin oleh seorang residen. Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 22 onderafdeeling. Tiap-tiap afdeling dipimpin oleh seorang asisten-resident dan onderafdeeling dikepalai oleh seorang controleur.

Wilayah onderafdeeling dibagi dalam distrik dan distrik dibagi lagi dalam sejumlah mukim. Selanjutnya mukim dibagi lagi ke dalam gampong/desa yang merupakan peringkat pemerintahan yang terendah.

2.4.3 Zaman Pendudukan Jepang

Zaman pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Periode zaman Jepang memang tidak lama, namun cukup penting bagi munculnya periode berikut yaitu kemerdekaan.

Dilihat dari sudut sistem pemerintahan yang dijalankan oleh tentara pendudukan Jepang di Aceh boleh dikatakan hampir tidak ada perubahan yang berarti. Perubahan yang dilakukan terbatas pada penggantian nama dari lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan istilah bahasa Jepang. Istilah residen pada zaman Hindia Belanda misalnya diganti menjadi *syu chokan*.

Meskipun masa pendudukan Jepang hanya berlangsung dalam tiga setengah tahun, namun penderitaan rakyat terasa cukup berat sebagai akibat kekejamannya. Suatu hal yang cukup penting terjadi selama pendudukan Jepang adalah pelatihan yang diberikan kepada para pemuda yang pada mulanya dimaksudkan sebagai tenaga cadangan dalam peperangan melawan Sekutu. Setelah Indonesia merdeka, mereka menjadi tenaga terlatih dalam mempertahankan kemerdekaan.

2.4.4 Zaman Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tidak diterima beritanya secara langsung oleh para pemimpin di Aceh. Meskipun demikian Teuku Nyak Arief dan Teuku Ali Panglima Polem menerima berita tentang kekalahan Jepang dari pimpinan tentara pendudukan Jepang di Aceh, tetapi situasi pada waktu itu masih penuh tanda tanya sampai diterimanya berita resmi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Dalam reorganisasi pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh merupakan salah satu dari sembilan keresidenan di Sumatera. Mister Teuku Muhammad Hasan, dalam kedudukannya sebagai gubernur Sumatera, mengangkat Teuku Nyak Arief sebagai residen pertama untuk Aceh.

Meskipun pengangkatan Teuku Nyak Arief secara resmi sebagai residen baru dilakukan pada 3 Oktober itu, namun sejak diketahui

bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Jepang, Teuku Nyak Arief bersama pemimpin lainnya di Aceh telah mulai mengambil langkah-langkah penting untuk menyusun pemerintahan. Ia menyusun alat kelengkapan pertahanan dan keamanan beserta administrasi pemerintahan. Di samping merintis pembukaan kantor pemerintahan, residen juga membentuk Lembaga Komite Nasional Daerah.

Pendirian komite nasional di daerah ini sesuai dengan intruksi presiden sebagai perwujudan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite ini, seperti yang diutarakan Wakil Presiden Muhammad Hatta, berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang baru memperoleh kemerdekaan.

Teuku Nyak Arief, di samping kedudukannya sebagai residen sekaligus juga menjadi ketua Komite Nasional Daerah. Wakil residen Aceh saat itu dijabat oleh Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, sementara wakil ketua Komite Nasional Daerah dijabat oleh Tuanku Mahmud. Dalam perkembangan selanjutnya, Tuanku Mahmud bertindak sebagai ketua Komite Nasional Daerah yang berikutnya digantikan oleh Mr. S. M. Amin pada 26 Januari 1946.

Keadaan keamanan di Aceh sejak diproklamasikannya kemerdekaan, pada bulan Agustus 1946 cukup rawan. Di samping aksi rakyat merebut senjata dari tangan Jepang, di masyarakat juga tersebar berita intimidasi yang disiarkan oleh tentara Belanda. Hal yang terakhir ini menuntut pula kesiagaan penuh rakyat di daerah ini.

Ancaman pihak Belanda untuk menguasai kembali Indonesia telah tampak sejak awal proklamasi kemerdekaan, dan pada 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer pertama Belanda ini. Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Pulau Jawa, Palembang, dan Sumatera Timur. Di Aceh, rakyat dengan tekad yang bulat, bersatu, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Berkat kuatnya pertahanan rakyat dan juga karena alasan-alasan lain, daerah Aceh tidak berhasil diduduki Belanda. Meskipun demikian keadaan di daerah Aceh saat itu cukup genting sehingga rakyat berada dalam keadaan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi

setiap kemungkinan penyerbuan oleh Belanda. Dalam rangka strategi pertahanan daerah dan negara, pasukan-pasukan keamanan dan barisan laskar rakyat tidak hanya aktif mempertahankan daerah, tetapi juga dikirim secara khusus ke Sumatera Timur untuk membendung gerakan pasukan Belanda. Front perjuangan di daerah tersebut dikenal dengan Medan Area.

Dalam kondisi yang demikian Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dalam kedudukannya selaku wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia yang kebetulan saat itu berada di Bukit Tinggi, mempertegas tugas instansi militer di Aceh dengan keputusan nomor 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947. Dalam keputusan tersebut ditetapkan daerah Keresidenan Aceh, Kebupaten Langkat, dan Tanah Karo sebagai suatu daerah militer. Berikutnya dikeluarkan pula keputusan nomor 4/WKP/SUM/47, tanggal 26 Agustus 1947, yang menetapkan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai gubernur militer untuk kawasan daerah militer tersebut dengan pangkat jenderal mayor.

Dengan demikian pada masa tersebut ada empat pejabat teras dengan wewenang masing-masing, ikut menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan dan keamanan di Aceh. Mereka tersebut adalah Mr. teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur Sumatera, Mr. S. M. Amin sebagai gubernur muda untuk wilayah administrasi Sumatera Utara dan juga berfungsi sebagai wakil gubernur, Teuku Chik Muhammad Daud Syah yang saat itu menjabat sebagai residen Aceh, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Sebagai hasil dari kerja sama yang baik di antara para pejabat yang berwenang dan berkat kesiagaan rakyat di daerah ini, aksi militer Belanda yang pertama dan agresinya militernya yang kedua pada 19 Desember 1948 tidak berhasil menduduki daerah Aceh.

Selanjutnya perlu dicatat di sini bahwa melalui Undang-undang No. 10 tahun 1948 yang ditetapkan pada 15 April 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi otonom, yaitu provinsi-provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan

Sumatera Timur. Dengan demikian sejak saat itu Keresidenan Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang pertama adalah Mr. S. M. Amin yang dilantik oleh presiden pada 15 Juni 1948 di Kutaraja.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara yang pada waktu itu beranggotakan 45 orang melakukan sidang pertamanya di Tapak Tuan pada 12 Desember 1948. Di antara keputusan yang diambil tercatat bahwa Kutaraja dinyatakan sebagai ibu kota sementara Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian status ini tidak bertahan lama, karena Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia No. 23/Pem/PDRI, tanggal 17 Mei 1949, menunjuk Mr. S. M. Amin sebagai komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, sedangkan kekuasaan sipil dan militer untuk Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo diserahkan kepada Gubernur Militer Teungku M. Daud Beureueh. Keadaan ini juga tidak bertahan lama karena pada 17 Desember 1949, melalui Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WK, PM/49, Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan untuk pertama kali daerah ini dibentuk menjadi provinsi yang terpisah dari Sumatera Utara. Dengan penetapan tersebut wilayah Provinsi Aceh meliputi Keresidenan Aceh yang lama ditambah sebagian daerah Kabupaten Langkat yang berada di luar daerah "Negara Bagian Sumatera Timur" Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah gubernur dari provinsi yang baru terbentuk ini. Keadaan ini pun tidak berlangsung lama, karena terjadi perubahan dalam rangka kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas Piagam Persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 yang disusul oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara terhitung mulai 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai daerah otonom dengan wilayah meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur. Sejak saat itu Aceh kembali berstatus keresidenan sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

Penciutan status dan peleburan daerah Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara telah mendorong ketidakstabilan politik dan keamanan

di Aceh yang mencapai puncaknya dengan meletusnya peristiwa Aceh pada 21 September 1953. Pergolakan ini memakan waktu cukup lama hingga keluarnya Undang-undang No. 24 tahun 1956 yang menetapkan Daerah Aceh kembali berstatus provinsi untuk yang kedua kalinya. Keadaan ini kiranya belum memenuhi seluruh kehendak masyarakat Aceh yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Akhirnya Pemerintah Pusat mengirimkan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi ke Aceh untuk bermusyawarah dengan berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan kemelut sosial dan politik tersebut. Misi Hardi mengeluarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/ MISSI/1959 yang menetapkan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sejak 16 Mei 1959 menjadi "Daerah Istimewa Aceh" dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

ACEH DALAM PERANG KEMERDEKAAN, 1945--1949

3.1 Aceh di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, daerah Aceh seperti halnya daerah lain di seluruh Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang ke Aceh pada awalnya mendapat sambutan positif dari sebagian besar masyarakat Aceh. Sikap tersebut adalah sebagai pengaruh dari janji Jepang sebelumnya yang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia.

Ketika Jepang telah memasuki Aceh, harapan yang dulu pernah dijanjikan tidak dapat diharapkan perwujudannya, bahkan sebaliknya rakyat Aceh mulai merasakan bahwa perilaku Jepang lebih kejam dibandingkan praktek kolonial Belanda. Rakyat Aceh pada masa itu sangat menderita terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini adalah sebagai akibat perampasan harta rakyat untuk kepentingan perang Jepang. Di samping itu tenaga rakyat juga dikuras untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan terbang, dan lain-lain, yang juga untuk kepentingan perang Jepang.

Tindakan Jepang yang demikian menimbulkan kebencian di dalam masyarakat Aceh yang berakibat meletusnya perlawanan-perlawanan seperti yang dilakukan oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu

Lhokseumawe dan perlawanan di Pandrah, Jeunieb, serta di Aceh Utara.

Situasi yang demikian segera berubah setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Kekalahan-kekalahan Jepang di Pasifik sengaja ditutup-tutupi, dengan jalan terus-menerus menyiarkan propagandanya yang menyatakan bahwa kedudukan mereka masih kuat dan pasti akan dapat memenangkan peperangan demi kemakmuran rakyat Asia Timur Raya.

Akibat dari keadaan tersebut, Jepang mulai melakukan perubahan kebijaksanaan di daerah pendudukannya dengan melakukan pendekatan-pendekatan kembali dengan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dengan diadakannya rapat-rapat umum di mana-mana dan juga dengan menggunakan media massa seperti harian *Atjeh Simbun* untuk menarik hati rakyat.

Menjelang jatuhnya beberapa front pertahanan Jepang kepada Sekutu di Pasifik, situasi semakin bertambah genting. Dalam kondisi yang demikian Pemerintah Jepang mulai mengambil langkah-langkah pengamanan terutama terhadap rakyat umum. Di antara langkah pengamanan tersebut ialah menyita semua radio yang dimiliki rakyat dan mengawasi secara ketat kantor berita Domei yang waktu itu melakukan monitoring berita-berita kemenangan Jepang atau pesan-pesan pemerintah kepada penduduk (Ibrahim Alfian, 1982 : 24). Tindakan yang sama juga diterapkan kepada satu-satunya surat kabar resmi di Aceh, yaitu *Atjeh Simbun*. Surat kabar ini diawasi secara ketat agar berita-berita kekalahan Jepang di front Pasifik tidak dimuat sebagai berita.

Kebijaksanaan Pemerintahan Pendudukan Jepang tersebut menyebabkan para pemimpin Aceh sulit mengetahui perkembangan politik internasional. Keadaan ini ditambah lagi dengan sulitnya komunikasi antarpemimpin pergerakan di suatu daerah dengan daerah lain. Betapapun ketatnya Jepang menutup-nutupi kekalahannya, namun berita tersebut dapat juga diketahui perwira-perwira geyugun yang bekerja pada dinas intelijen Jepang. Informasi yang sama juga dapat diperoleh dari beberapa redaktur *Atjeh Simbun* yang secara rahasia berhasil menangkap berita-berita yang bersumber dari Sekutu.

Mereka menyampaikan berita-berita itu kepada pemuka-pemuka masyarakat Aceh secara rahasia pula agar mereka terhindar dari penangkapan (A. Hasjmy dan T.A.Talsya, 1976 : 7-8).

Berita tentang kekalahan Jepang merupakan hal yang tidak disangka, karena jauh sebelumnya secara gencar selalu tersiar berita tentang kemenangan Jepang. Berita tentang puncak kekalahan Jepang yang dapat diterima dari Aceh, misalnya yang disebutkan Nukum Sanani. Ia mendengar berita itu dari siaran Radio Australia pada 10 Agustus 1945. Siaran itu menyatakan bahwa pada 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima di Pulau Honsyu sudah lumat oleh bom atom Amerika Serikat (Wiwoho, 1985 : 28).

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pun dicoba untuk ditutup-tutupi oleh Jepang agar tidak diketahui oleh masyarakat Aceh. Namun demikian hal tersebut akhirnya diketahui juga oleh beberapa orang yang bekerja pada kantor berita Jepang, Domei, pada 21 Agustus 1945. Kantor berita ini menerima berita dari Jakarta bahwa peperangan telah berakhir dan semua orang Jepang termasuk tentaranya akan dikembalikan ke tanah airnya (Talsya, 1988;4).

Pemuda-pemuda yang bekerja pada kantor berita Domei yakni Armyn, Amiruddin, Ghazali Yunus, dan Bustami memberitahukan berita tersebut kepada Teuku Nyak Arief. Pada 21 Agustus salah seorang dari mereka secara diam-diam menempelkan berita tersebut pada dinding gedung bioskop (sekarang Gedung Bioskop Garuda), tetapi banyak orang belum berani mempercayainya apa lagi tentara Jepang masih bertugas seperti sediakala di Kutaraja (Abdullah Ali, 1985 : 166).

Berita proklamasi itu sampai kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh A. Hasymi dalam surat kabar *Waspada* 9 Desember 1983 sebagai berikut. “Seorang redaktur kantor berita Domei, Ghazali Yunus, pada tanggal 19 Agustus 1945 menyampaikan kepada Teuku Alibasyah Talsya, redaktur *Atjeh Simbun* berita proklamasi Indonesia yang disiarkan oleh kantor Domei”. Berita tersebut selanjutnya diserahkan Talsya kepada pimpinan redaksi *Atjeh Simbun*, A. Hasymi.

Para pemuda yang bekerja di surat kabar *Atjeh Simbun* tidak begitu terkejut menerima berita tersebut, karena pada 18 Agustus 1945 mereka telah diberitahu tentang berita proklamasi tersebut oleh seorang redaktur pengawas *Atjeh Simbun* berkebangsaan Jepang K. Yamada selain itu mereka juga sudah sering mendiskusikan tentang kemungkinan terjadinya peristiwa semacam itu.

Setelah mendengar berita proklamasi, para pemuda yang bekerja di *Atjeh Simbun* dan beberapa pemuda lain di luar kalangan mereka yang telah sering mengadakan diskusi tentang kemungkinan kekalahan Jepang menghadiri rapat penting yang bersifat rahasia pada 21 Agustus 1945. Dalam rapat rahasia tersebut A. Hasymi sebagai pimpinan rapat menjelaskan bahwa pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ghazali Yunus sebagai sumber berita juga memberikan penjelasan.

Karena situasi daerah Aceh setelah proklamasi semakin tidak menentu, maka Tyokan S. Iino pada 23 Agustus 1945 terpaksa memanggil para pemimpin rakyat Aceh ke tempat tinggalnya (pendapa gubernur sekarang). Adapun mereka yang dipanggil adalah Teuku Nyak Arief, Teuku Panglima Polem Ali, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teuku Ahmad Danu, dan Said Abubakar. Pada pertemuan tersebut S. Iino menjelaskan perihal situasi Aceh dan kedudukan Jepang pada waktu itu, tetapi tidak sedikit pun disinggung mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hanya menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada para pemimpin rakyat diminta untuk bersama-sama dengan Pemerintah Jepang memelihara keamanan di daerah Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung sangat tertutup, namun setelah didesak oleh para pemimpin Aceh, hasilnya pun diumumkan oleh Tyokan S. Iino kepada seluruh rakyat Aceh.

Pada 24 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief memasang bendera merah-putih berukuran empat per segi di mobilnya, pada hal waktu itu Jepang masih berkuasa. Dengan mobilnya ia berkeliling kota dengan maksud untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa Indonesia sudah merdeka. Tindakan Teuku Nyak Arief ini merupakan perwujudan ketanggapan dan keberaniannya untuk memberitahukan kepada umum bahwa Indonesia sudah merdeka dan rakyat tidak perlu lagi tunduk kepada penjajahan Jepang.

Berita kemerdekaan yang masih samar-samar diketahui oleh masyarakat Aceh, telah membangkitkan tekad tiga orang pegawai Indonesia di Kantor Kepolisian Aceh di Kutaraja (Banda Aceh) untuk mengibarkan bendera merah-putih di kantor tersebut. Ketiga pegawai tersebut adalah Choezaini, Nazar, dan Ahmad. Pada 23 Agustus 1945 secara bahu-membahu mereka berhasil mengibarkan bendera merah-putih. Tindakan ini dimaksudkan supaya keesokan harinya dapat dilihat oleh masyarakat sebagai tanda bahwa Indonesia sudah merdeka.

Tindakan mereka merupakan penaikan bendera merah-putih untuk pertama kali dilakukan di Kutaraja. Peristiwa penaikan bendera itu keesokan harinya menimbulkan kehebohan di Kantor Kepolisian Aceh, namun pihak Jepang tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah para pemuka masyarakat Aceh dan pemuda-pemuda mengetahui berita proklamasi Indonesia, mulailah mereka menyusun kekuatan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dari diskusi-diskusi antara para pemuda yang bekerja pada surat kabar *Atjeh Simbun*, pada kantor berita Domei dan yang bekerja pada percetakan Aceh Akhirnya menyimpulkan perlu segera dibentuk penggalangan kekuatan melalui organisasi yang teratur dan kuat. Untuk hal tersebut, dibentuklah IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) dengan kantor resminya bertempat di kantor *Atjeh Simbun*. Mereka yang duduk dalam kepengurusan IPI adalah A. Hasymi (ketua), Teuku Alibasyah Talsya (sekretaris) dibantu oleh Abdullah Arief, Ghazali Yunus, dan Said Ahmad Dahlan. Dari diskusi-diskusi itu pula lahir suatu tekad untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui selebaran-selebaran.

Pada 25 Agustus 1945, para pemuda yang tergabung dalam IPI merebut kantor Aceh Simbun dengan mengibarkan bendera merah-putih di depan kantor tersebut.

Pengibaran bendera tersebut mendapat protes dari Tyokan S. Iino yang menghendaki bendera merah putih itu diturunkan. Permintaan ini tidak pernah digubris oleh para pemuda yang tergabung dalam IPI dan sejak itu bendera merah putih berkibar di depan kantor Aceh Simbun (A. Hasymi, Waspada 11 November 1983 : hal.VIII).

Penaikan bendera merah-putih juga terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Aceh, yaitu di Langsa, Lhokseumawe, Sigil, Bireun, Lhoksukon, Kula Simpang, Kutacane, Meulaboh, Tapak Tuan, dan daerah-daerah lain (T. Ibrahim Alfian, hal 34).

Selain penaikan bendera merah-putih, juga dilakukan usaha-usaha untuk mengambil alih semua kantor-kantor pemerintahan dari tangan pejabat-pejabat pemerintahan Jepang. Usaha ini untuk pertama kali dilakukan Abdullah Husin bekas anggota barisan "F" di Malaysia dari Langsa. Abdullah Husin mampu menyakinkan K. Ikeda, kepala kepolisian Jepang di Aceh Timur, untuk menyerahkan kekuasaan kepolisian Aceh Timur kepadanya. Usaha tersebut berhasil dan ia menelepon semua kepala kepolisian di Idi, Kuala Simpang, Lhok Sukon supaya pada 1 Oktober mengikuti jejak Kantor Kepolisian Langsa untuk melakukan upacara penaikan bendera merah-putih (Abdullah Ali, 1985; 175)

Tindakan serupa juga dilakukan terhadap kantor-kantor pemerintahan Jepang di Kutaraja. Usaha tersebut diawali oleh Teuku Nyak Arief yang berpidato di depan Kantor Kas Negara, mengajak para pemuda untuk melakukan apa yang telah dilakukan orang-orang di Aceh Timur. Tindakan Teuku Nyak Arief memberi motivasi bagi usaha perebutan Kantor Kepolisian Kutaraja. Usaha tersebut didukung oleh unsur-unsur dari aparat polisi berkebangsaan Indonesia. Anggota polisi bangsa Indonesia tersebut di antaranya adalah Hasyim, Teungku Abdullah Sani, Malik, Saoeni, dan Nyak Umar. Mereka pada 15 Oktober 1945 menurunkan bendera Jepang, hinomaru, di depan kantor keimubu (polisi) dan menaikkan bendera merah-putih sekaligus mengambil alih kantor tersebut.

3.2 Pertahanan di Daerah Aceh

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di Aceh muncul gagasan untuk membentuk organisasi pemerintahan dan pertahanan keamanan. Gagasan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang definitif diwujudkan sejak 3 Oktober 1945 yaitu dikeluarkannya secara resmi pengumuman gubernur Sumatera tentang pengangkatan Teuku Nyak Arief sebagai residen Aceh. Namun demikian, penetapan itu sebenarnya hanya merupakan pengesahan atas segala tindakan dan aktivitas Teuku Nyak Arief dalam mengorganisasi kegiatan

pemerintahan di Aceh segera setelah berita proklamasi diterima di Aceh (Wiwoho, 1985; 33).

Untuk mengelola berbagai kegiatan pemerintahan di daerah-daerah, di samping telah ditunjuk seorang kepala daerah, dibentuk pula suatu lembaga perwakilan daerah yang dinamakan Komite Nasional Daerah. Lembaga perwakilan yang dimaksud untuk daerah Keresidenan Aceh dipimpin oleh Tuwanku Mahmud, sementara Sutikno diangkat sebagai wakilnya. Di samping itu juga dibentuk suatu Badan Eksekutif yang para anggotanya diambil dari kalangan Komite Nasional Daerah. Badan ini diketahui oleh residen dan merupakan badan pembantu residen dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari (Insider,...;34).

Teuku Nyak Arief sebagai residen Aceh yang pertama hanya sempat memimpin Aceh selama empat bulan. Dengan terjadinya peristiwa Revolusi Sosial yang juga dikenal sebagai Peristiwa Cumbok pada awal tahun 1946, ia digantikan oleh Teuku Muhammad Daud Syah, yang pada mulanya bertindak sebagai pejabat residen. Beberapa bulan kemudian, ia dilantik secara resmi menjadi residen Aceh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera, Nomor 60, Tanggal 13 Maret 1946 (Abdullah Ali, 1985; 207).

Para ulama di Aceh yang sejak masa-masa sebelumnya selalu menjadi pemimpin rakyat dalam perjuangan. Dalam perang kemerdekaan itu peranan mereka juga tidak kecil. Beberapa ulama terkenal memfatwakan "perang sabil" bagi perang rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan. Ulama-ulama tersebut yaitu Teungku Haji Hasan Krueng Kale, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Ja'far Sidik Lam Jabat, dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri. Dengan mengatasnamakan seluruh ulama Aceh, pada 15 Oktober 1945 mereka mengeluarkan maklumat bersama yang menyatakan bahwa perjuangan rakyat Aceh tersebut sebagai Angkatan Pemuda Indonesia (API) di daerah Aceh. Adapun susunan pengurus API adalah sebagai berikut.

- (1) Markas Daerah, berkedudukan di Kutaraja dengan Syamaun Gaharu, T.A. Hamid Azwar sebagai kepala staf, Husin Yusuf sebagai sekretaris, Ishak sebagai anggota sekretaris, dan Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, Teuku Muhammad Daud

Samalanga, T. Sarong, Bahhtiar Idham, Teuku Abdullah dan Saiman sebagai anggota.

- (2) Wakil Markas Daerah untuk sementara dibentuk : (a) wakil markas daerah Aceh Besar dan Pidie di bawah pimpinan Nyak Neh, (b) wakil markas daerah Aceh Utara dan Tengah di bawah pimpinan Teuku Muhammad Syah, (c) wakil markas daerah Aceh Timur di bawah pimpinan Bakhtiar, dan (d) wakil markas daerah Aceh Barat dan Selatan di bawah pimpinan Tjut Rahman.

Setelah staf pimpinan API daerah Aceh berhasil disusun, pada 6 Oktober 1945 dikeluarkan seruan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh, agar membantu dan menyokong API yang baru lahir itu.

Sejalan dengan pembentukan organisasi pemerintahan juga dibentuk organisasi keamanan dalam rangka penjagaan keamanan dan keutuhan negara yang baru merdeka. Gagasan ini dicetuskan oleh beberapa mantan perwira gyugun di Kutaraja. Mereka itu antara lain Syammaun Gaharu, Usman Nyak Gede, Teuku Hamid Azwar, Nyak Neh Rika, Bachtiar Idham, Said Usman, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pada 27 Agustus 1945 mereka mengadakan pertemuan rahasia di salah satu kamar Hotel Sentral di Jalan Mohammad Jam Kutaraja. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan Jepang yang selalu memantau gerak-gerik kaum Republik . Pertemuan itu melahirkan suatu keputusan, yaitu mengirim Syamaun Gaharu dan T. Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Arief untuk meminta pendapatnya terhadap gagasan mereka. Dari hasil pembicaraan mereka ternyata Teuku Nyak Arief sangat mendukung pembentukan suatu organisasi pertahanan dan keamanan di daerah Aceh. Dengan sokongan itu para perwira tersebut memutuskan untuk membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh. Namun demikian sebelumnya T. Nyak Arief telah membentuk Polisi Istimewa yang anggotanya terdiri atas bekas anggota KNIL. Pasukan ini setelah dibentuknya polisi Tentara pada bulan Februari 1946, dileburkan menjadi pasukan meriam di bawah pimpinan Letnan Dua KNIL

Lintong asal Sulawesi Utara. Pasukan meriam tersebut dilengkapi dengan senjata-senjata berat yang direbut dari Jepang setelah terjadi pertempuran merebut senjata mereka di Lhok Nga pada bulan Desember 1945 (Abdullah Ali dkk, 1985: 209).

Terbentuknya API pada 6 Oktober 1945 merupakan momentum lahirnya tentara resmi Republik Indonesia di daerah Aceh. Dalam perkembangannya API mengalami perubahan-perubahan yaitu dari API menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia), lalu menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), kemudian menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pembentukan API dan BPI tampaknya mengagetkan Jepang, karena API dan BPI merupakan organisasi kemiliteran dan perjuangan di Aceh. Oleh karena itu Syokan S. Iino mengundang para pemimpin Aceh ke tempat kediamannya untuk membicarakan situasi Aceh pada umumnya dan Kutaraja khususnya (Abdullah Ali, 1985:210).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Jepang tidak setuju dengan langkah-langkah pemimpin di Aceh yang telah membentuk organisasi-organisasi, penyiaran selebaran-selebaran dan mengharapkan organisasi itu dibubarkan saja. Namun demikian permintaan itu ditanggapi dengan tajam oleh Teuku Nyak Arief yang menyatakan bahwa, **"pemerintah Jepang benar-benar suatu pemerintah yang tidak mengetahui keadaan; apakah yang tuan-tuan kerjakan selama berkuasa di sini akan tuan-tuan lakukan juga pada waktu tuan-tuan telah kalah"**. Sementara itu Syamaun Gaharu juga menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, karena itu Jepang tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan API (Ibrahim Alfian, 1982:49).

Setelah peristiwa tersebut, Residen Aceh Teuku Nyak Arief pada 9 Oktober 1945 memerintahkan kepada Syamaun Gaharu sebagai komandan Markas Daerah, agar API sebagai dasar Tentara Republik Indonesia disempurnakan sehingga benar-benar mengarah kepada organisasi ketentaraan yang lengkap. Oleh karena itu wakil Markas Daerah yang awal pembentukannya hanya empat buah ditambah menjadi delapan buah dan pada setiap perwakilan markas Daerah

dibentuk tiga sampai empat kesatuan pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan pasukan. Setelah penyempurnaan tersebut, disusul pula dengan keluarnya surat edaran yang ditujukan kepada semua bekas anggota gyugun, heiho, dan lain-lain agar dalam waktu yang singkat menggabungkan diri pada wakil Markas Daerah atau komandan pasukan setempat.

Residen Aceh Teuku Nyak Arief melantik API untuk seluruh daerah Aceh pada 12 Oktober 1945 di Kutaraja (Wiwoho, 1985:35). Sejak itu API daerah Aceh resmi menjadi organisasi Tentara Republik Indonesia yang sah. Sejak 1 Desember 1945 API bertukar nama menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) dengan komandan yang tetap, yaitu Syamaun Gaharu (berpangkat kolonel) dan Teuku Nyak Arief selaku residen Aceh dengan pangkat jenderal mayor tituler menjadi pelindung. Dengan keputusan Pemerintah Pusat 8 Januari 1946 mengenai pengantian nama organisasi kemiliteran Indonesia, maka sejak 24 Januari 1945 TKR Aceh berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi V Sumatera. Dalam penyempurnaan selanjutnya, setelah pengantian komandan dari Syamaun Gaharu kepada Husin Yusuf, TRI Aceh (Divisi V Sumatera) dijadikan Divisi Gajah I, sementara kesatuan yang berada di Kutacane dijadikan Batalion I Resimen I Gajah II (Sumatera Timur).

Pada tahun 1947, Divisi Gajah I digabung bersama Divisi Gajah II menjadi TRI Divisi X Sumatera yang pada masa Agresi Militer Belanda I markasnya berkedudukan di Bireun (Aceh Utara). Panglima dan kepala stafnya adalah Kolonel Husin Yusuf dan Kolonel H. Sitompul.

Penggabungan kedua divisi ini diresmikan oleh Mayor Jenderal R. Suharjo Hardjowardojo selaku panglima TRI Komandemen Sumatera pada 26 April 1947. Selanjutnya di Aceh juga dibentuk Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA) yang dipimpin oleh Said Usman (Kutaraja), H. Daud Dariah (Meulaboh), M. Adam (Langsa), dan lain-lain.

Pembentukan kesatuan-kesatuan militer adalah upaya memperkuat kekuatan bangsa dan negara dalam bidang kemiliteran, terutama untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang akan

timbul dalam Agresi Belanda I ke Indonesia. Daerah Aceh memang terhindar dari ancaman Belanda secara langsung, kecuali Sabang. Namun demikian para pemimpin revolusi kemerdekaan di Aceh telah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi ancaman Belanda. Untuk maksud tersebut, dilakukan penggalangan dan penyebaran kekuatan bersenjata di seluruh daerah Aceh.

Berdasarkan kedudukan resimen-resimen tentara dapat dilihat bahwa Resimen IV dan Resimen Artileri berada di ibukota daerah Aceh, Kutaraja. Resimen V di pantai Aceh bagian timur sedangkan Resimen VI di pesisir barat daerah Aceh. Dengan demikian sebagian besar pantai Aceh telah dikawal oleh pasukan-pasukan TRI. Di samping barisan-barisan tentara resmi tersebut, menjelang Agresi Militer Belanda I, di Aceh juga disusun barisan-barisan kelaskaran bersenjata dan Tentara Pelajar. Kesatuan-kesatuan itu antara lain terdiri atas:

- (a) Divisi Rencong Kasatria Pesindo, yang dipimpin A. Hasymi, sedangkan komandan divisinya ialah Nyak Neh Lhok Ngga. Divisi ini mempunyai resimen-resimen yang berkedudukan di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Takengon Langsa, Meulaboh, dan Tapaktuan. Ke dalam badan kelaskaran ini tergabung suatu resimen wanita yang diberi nama Resimen Wanita Pocut Baren di Kutaraja, dipimpin oleh Mayor Zahara dan Batalyon istimewa Artileri di bawah pimpinan Nyak Neh.
- (b) Divisi X Teungku Chik Di Tiro yang dipimpin oleh Cek Mat Rahmany terdiri atas resimen-resimen di Kutaraja, Sigli, Bireun, Lhokseumawe dan Langsa, Takengon, dan Kutacane.
- (c) Divisi Teungku Chik Paya Bakong, markas besarnya berkedudukan di Idi, Aceh Timur dengan panglimanya Teungku Amir Husin Al Mujahid, sedangkan pelaksana tugas panglima oleh Hajad Musi. Divisi ini mempunyai "divisi berani mati" dengan para anggotanya tersebar di seluruh Aceh, Tentara Keamanan Rakyat, dan Staf Istimewa/Mobilisasi.

Di samping itu juga terdapat barisan Hisbullah yang pembentukannya dipelopori oleh ulama-ulama terkenal di Aceh, antara lain Teungku H. Hasan Krueng Kale, Teungku M. Daud Beureueh,

Teungku Hasballah Indra Puri, Teungku Abdul Wahab Seulimun, dan lain-lain. Keanggotaan barisan ini terdiri atas teungku-teungku, orang-orang dewasa, dan orang-orang tua yang belum tergabung dalam salah satu kelaskaran lain.

Dengan terbentuknya organisasi kemiliteran dan kelaskaran di Aceh, daerah Aceh telah menyusun kekuatan bersenjata yang kuat dalam rangka pertahanan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan agresor Belanda yang pada waktu itu berusaha untuk menduduki Indonesia kembali.

3.3 Pengiriman Pasukan ke Medan Area

Dalam perang kemerdekaan, pasukan militer, laskar rakyat, Tentara Pelajar, dan masyarakat umum tidak hanya berjuang mempertahankan Aceh dari cengkraman penjajah, tetapi juga di front-front pertempuran Medan Area. Pengiriman pasukan-pasukan dari Aceh ke Medan Area dilatarbelakangi oleh kedatangan tentara Sekutu ke Sumatera yang ingin melucuti persenjataan tentara Jepang.

Kesatuan-kesatuan yang diterjunkan ke Sumatera Timur terdiri atas unit-unit kecil di bawah pimpinan Letnan I (L) Brondgeest yang dalam melaksanakan tugasnya terlebih dahulu bertindak sendiri dengan menteror Pemerintah Republik Indonesia di daerah Sumatera yang baru terbentuk. Brondgeest dengan dibantu oleh Westerling membentuk suatu pasukan polisi yang berkekuatan 200 orang untuk menguasai daerah Sumatera Timur.

Pada 9 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan dengan tugas menerima penyerahan tentara Sekutu yang mendarat di Medan terdapat pula kesatuan-kesatuan NICA yang berusaha memulihkan kembali penjajahan Belanda di daerah Sumatera Timur. Akibat tekanan-tekanan NICA terhadap pasukan Republik Indonesia dan laskar rakyat di Medan, mereka terpaksa dipindahkan ke luar kota. Pada 10 Maret 1946 sebagian anggota perhubungan Divisi IV pindah ke Brastagi. Komandannya juga terpaksa dipindahkan ke Pematang Siantar dan Tebing Tinggi (Biro Sejarah Prima, 1976:264).

Agresi Militer I Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia mengakibatkan seluruh pertahanan Republik di Sumatera Timur menjadi ambruk. Kota Pematang Siantar yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia untuk wilayah Sumatera diduduki Belanda. Akibat dari agresi dan pendudukan tersebut banyak pasukan dan rakyat Sumatera Timur mengungsi ke daerah Aceh yang masih aman dari tekanan-tekanan Belanda (Abdullah Ali, 1985:268).

Agresi Militer I Belanda terhadap Republik Indonesia merupakan cobaan besar bagi kelangsungan hidup negara yang baru diproklamasikan itu. Dalam situasi krisis itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pada waktu itu berkedudukan di Bukit Tinggi mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh menjadi gubernur militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mulai 1 September 1947.

Berhubung daerah Sumatera Timur mendapat serangan yang gencar dari pasukan Belanda, pasukan Aceh yang tergabung dalam TRI maupun laskar rakyat dikirim ke Sumatera Timur pada bulan Desember 1946. Jumlah pasukan Aceh yang dikirim dan bertempur di Medan Area bertambah setiap bulan. Untuk mengatur koordinasi pasukan-pasukan tersebut, dibentuklah suatu resimen yang diberi nama Resimen Istimewa Medan Area (RIMA). Pimpinan RIMA yang pertama adalah Mayor Hasan Ahmmad, kemudian Mayor Tjut Rahman dengan susunan dan kedudukan pasukan RIMA sebagai berikut.

- (a) Batalyon I dipimpin oleh Kapten Hanafiah, berkedudukan di Kampung Lalang.
- (b) Batalyon II, dipimpin oleh Nyak Adam Kamil, berkedudukan di Kerambil Lima.
- (c) Batalyon III, dipimpin secara bergantian oleh Kapten Alamsyah, Kapten Ali Hasan, dan Kapten Hasan Saleh, berkedudukan di Kelumpang.
- (d) Batalyon IV, dipimpin oleh Kapten Burhanuddin, berkedudukan di Binjai.
- (e) Batalyon Wiji Alfisah berkedudukan di Asamkumbang, Sunggal.
- (f) Batalyon Batery Arteleri Divisi Rencong berkedudukan di Binjai.

- (g) Kesatuan Mujahidin Divisi Teungku Chik Di Tiro dan Divisi Chik Paya Bakong di Sunggal masing-masing dipimpin oleh Teungku Thaleb dan Gani Basyah Samalanga.
- (h) Kesatuan Lasykar dari Aceh Tengah dipimpin oleh Ilyas Leube berkedudukan di Pancur Batu.

Pendudukan Sumatera Timur dan penyerangan daerah pantai Aceh oleh pasukan Belanda mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Dalam suatu pertemuan Dewan Pertahanan Daerah di Kutaraja 12 Agustus 1947 dibentuk suatu Badan Koordinasi Aceh. Hadir dalam pertemuan tersebut partai-partai/ organisasi-organisasi Masyumi, PNI, Pesindo, PGRI, PUSA, dan Muhammadiyah. Terpilih sebagai ketua adalah Almelz dibantu oleh Usman Raliby dan M. Abduh Syam. Pembentukan Badan Koordinasi Daerah Aceh ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan 100% Negara Republik Indonesia
- (2) Membina NRI yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial
- (3) Mengusahakan dan menegakkan suatu pemerintahan yang kokoh, progresif, dan berdaulat
- (4) Melaksanakan mobilisasi umum
- (5) Menyusun kehidupan politik, ekonomi, dan sosial untuk kepentingan pertahanan tanah air (A. H. Nasution, 1979:581)

Sehubungan dengan Agresi Militer Belanda I tersebut, Panglima Sumatera Suhardjo Haedjowardoyo menumpahkan harapan besar kepada pasukan-pasukan dari Aceh. Dalam sebuah telegramnya ia meminta kepada pemimpin-pemimpin rakyat Aceh supaya mengalirkan terus kekuatan dari Aceh ke Medan dan jangan berhenti berjuang sebelum Medan dikuasai kembali oleh Republik Indonesia (Semdam I/Iskandar Muda, 1972:581).

Mendapat telegram tersebut, pimpinan dan rakyat Aceh menyambut dengan penuh tanggung jawab. Bantuan baik berupa pasukan maupun logistik dikirimkan ke Medan Area. Sambutan rakyat

Aceh serupa itu sesuai dengan ikrar yang pernah diputuskan bersama dalam rapat pembentukan Koordinasi Daerah Aceh.

Tugas utama yang dipikulkan kepada kesatuan-kesatuan dari Aceh yang berjuang di Medan Area yaitu melakukan operasi-operasi militer dan berusaha untuk merebut kembali daerah-daerah yang telah diduduki pasukan Belanda. Di samping itu juga dimaksudkan untuk menghambat gerak maju pasukan-pasukan Belanda ke Aceh. Tugas utama untuk merebut kembali tempat-tempat yang telah diduduki oleh pasukan Belanda dapat dikatakan kurang berhasil. Hal ini terutama karena kurang koordinasi antarpasukan bersenjata Republik Indonesia yang melakukan operasi militer di Sumatera Timur.

Perlu diketahui bahwa pasukan-pasukan yang berjuang di Medan Area dan sekitarnya tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga terdapat pasukan-pasukan Indonesia dan Lasykar Rakyat Sumatera Timur.

Kurangnya koordinasi ini menyebabkan banyaknya operasi-operasi militer untuk merebut kedudukan musuh tidak berhasil. Bahkan sering terjadi komando pasukan-pasukan itu tidak menjalin suatu kerjasama yang baik, sehingga mengakibatkan serangan secara serentak terhadap posisi musuh tak dapat dilakukan (Abdullah Ali, 1985:273).

Meskipun tugas utama tidak sepenuhnya berhasil, tetapi untuk tugas kedua yaitu menahan gerak maju pasukan Belanda ke daerah Aceh, berhasil dijalankan sampai penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

3.4 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Pusat

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh sudah menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Ketika Negara Republik Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer I dan II, kegiatan ekonomi praktis berhenti sama sekali. Keadaan ini menyebabkan pemerintah pusat mengalami kesulitan dana untuk membiayai pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan sumbangan dari pemerintah daerah.

Aceh merupakan suatu daerah yang mampu mewujudkan keinginan Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan Aceh memiliki

potensi ekonomi yang memungkinkan tersalurkannya bantuan ekonomi ke pusat. Ketika Pemerintah Pusat berada di Yogyakarta, daerah Aceh selama tiga setengah bulan dalam tahun 1949, telah memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintah pusat sebanyak 500.000 dolar Singapura (Amin, 1978:102). Bantuan tersebut merupakan perwujudan dari kebulatan tekad pemerintah dan rakyat Aceh untuk mendukung pemerintah pusat demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari rongrongan pihak Belanda.

Sumbangan daerah Aceh untuk pemerintah pusat tidak berhenti sampai di situ saja, namun juga menyediakan dana untuk pembelian pesawat udara bagi Pemerintah Indonesia. Pembelian pesawat terbang tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 15 Juni 1948 ke Aceh. Kunjungan tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan serta memupuk semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan khususnya di daerah Aceh. Rombongan presiden yang berjumlah 17 orang disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Teungku Muhammad Daud Beureueh, Residen Aceh Teuku Muhammad Daoed Syah, Jenderal Mayor Amir Husin al Mujahid, dan pembesar sipil dan militer lainnya serta panitia penyambutan yang diketuai oleh wakil residen T.M. Amin.

Selama kunjungan ke Aceh, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan saudagar Aceh yang tergabung dalam "Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh" (GASIDA). Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Atjeh, presiden dalam kata sambutannya telah mengetuk hati para saudagar Aceh untuk ikut serta membantu pemerintah di dalam memperbaiki ekonomi negara pada perjuangan. Presiden pada waktu itu juga menjelaskan situasi Negara Indonesia yang pada waktu itu sedang dikepung oleh pihak Belanda, terutama hubungan antarpulau di Indonesia yang harus memiliki sejumlah pesawat udara. Untuk itu pula presiden meminta kepada saudagar dan rakyat Aceh supaya menyumbang sebuah pesawat udara jenis Dakota yang harganya pada waktu itu (bekas pakai) M\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dolar Malaya) atau sama dengan harga 25 kilogram emas pada waktu itu. Sambutan presiden ditutup dengan kata-kata bahwa,"ia

tidak akan makan sebelum mendapat jawaban “ya” atau “tidak” dari para saudagar Aceh yang hadir dalam pertemuan tersebut” (Wawancara H.M. Djoened Yoesoef ketua I GASIDA dengan Direktur PDIA Aboebakar.

Ajakan presiden tersebut mendapat tanggapan yang baik dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu khususnya para saudagar Aceh yang tergabung dalam GASIDA. Pada waktu istirahat, T. Mohammad Ali Panglima Polem (wakil residen Aceh), berbicara mewakili para saudagar Aceh menyatakan bahwa, “rakyat Aceh menyanggupi untuk membeli pesawat udara jenis Dakota seperti himbauan presiden tersebut”. Dinyatakan bahwa bukan hanya satu pesawat tetapi dua pesawat akan dibeli rakyat Aceh untuk dipersembahkan kepada negara dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (Semangat Merdeka, 1948:58).

Pesawat terbang RI 001 Seulawah pada hari-hari selanjutnya menjadi alat perjuangan yang sangat penting artinya karena ia merupakan jembatan udara satu-satunya bagi Republik Indonesia di tengah-tengah blokade ketat tentara Belanda.

Dengan hasil-hasil yang diperoleh selama beroperasi di luar negeri Seulawah berhasil pula memberikan biaya perjuangan kepada para duta Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di beberapa negara sahabat lainnya (Talsya, 1988;12).

Dengan sumbangan pesawat udara yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda sudah dapat ditembus, sehingga memperlancar hubungan dengan daerah-daerah maupun dengan dunia luar. Dengan demikian kegiatan ekonomi dan pembelian senjata dari luar negeri terutama untuk menghadapi Belanda telah dapat dilakukan dengan baik dan ini memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mengadakan kegiatan diplomasi ke luar negeri, dalam rangka pencarian dukungan politik untuk menghadapi Belanda di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melihat kepada kegiatan masyarakat Aceh mempertahankan kemerdekaan negara selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), dapatlah dikatakan rakyat di daerah tersebut telah mengorbankan

segala-galanya membela Negera Republik Indonesia. Oleh karena itu dapatlah dipahami apabila Presiden Soekarno memberi gelar daerah Aceh sebagai "Daerah Modal".

BAB IV

PECAHNYA PEMBERONTAKAN

4.1 Situasi Menjelang Pemberontakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949 yang dikeluarkan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara, sejak 1 Januari 1950 Aceh dijadikan sebagai provinsi yang otonom. Status daerah Aceh yang diperoleh pada tahun 1950 itu adalah setelah belasan tahun berstatus sebagai *residentie/syuu/keresidenan* dalam periode akhir pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan. Setelah itu hampir setahun lamanya sebagai Daerah Militer dalam Perang Kemerdekaan.

Peningkatan status daerah Aceh sebagai provinsi yang otonom sejak 1 Januari 1950, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kepentingan daerah dengan pemerintah pusat.

Sebenarnya munculnya keputusan yang dibuat Sjafruddin Prawiranegara itu mempunyai latar belakang yang panjang pada perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. Persetujuan Roem-Roijen yang dikeluarkan pada 7 Mei 1949 menghentikan permusuhan Indonesia-Belanda, menjanjikan pemulangan Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, serta membuka jalan untuk terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk penyerahan kedaulatan secara

lengkap dan tidak bersyarat dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Para pemimpin pemerintah Republik Indonesia yang ditawan Belanda sejak Agresi Militer Belanda II, dipulangkan ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan menentukan hari depan bangsa Indonesia, Perdana Menteri Hatta, yang juga bertindak sebagai wakil presiden segera menyempurnakan susunan kabinetnya pada 4 Agustus 1949. Dalam kabinet itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya menjadi kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), ditetapkan sebagai wakil perdana menteri (Ismail Husin, 1993).

Karena watak Belanda dalam berunding masih perlu dicurigai terutama karena pengalaman selama masa-masa sebelumnya, khususnya dalam perjanjian-perjanjian terdahulu, seperti Perjanjian Renville dan Linggarjati, Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi Belanda. Alternatif yang terbentang dengan Konferensi Meja Bundar ada dua. Pertama, ialah jika konferensi itu berlangsung dengan sukses dan kesepakatannya dapat ditaati oleh kedua belah pihak, maka masa depan cerah bagi bangsa Indonesia akan dapat diharapkan. Alternatif kedua, ialah apabila konferensi itu kembali mengalami kegagalan atau apabila Belanda kembali mengkhianati persetujuan itu. Untuk mengantisipasi alternatif kedua itu, dikeluarkanlah Instruksi Presiden tanggal 20 Agustus yang diikuti oleh Undang-undang No. 2 tahun 1949 (30 September 1949) yang berisi antara lain bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Wakil perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara berkedudukan di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dalam keadaan memaksa, wakil perdana menteri diberi kekuasaan menetapkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang dan Pengganti Peraturan Pemerintah. Wakil perdana menteri juga berwenang atas nama presiden, kabinet atau salah seorang menteri, mengambil keputusan termasuk kekuasaan pemerintahan, presiden, atau yang mengenai penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang (Ismail Husin, 1993).

Dengan pemberian kekuasaan kepada Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan UU No. 2 tahun 1949 tersebut dimaksudkan apabila terjadi kegagalan dalam Konferensi Meja Bundar, Sjafruddin Prawiranegara dapat memimpin perjuangan bersenjata yang digerakkan di Aceh. Hal tersebut terutama disebabkan Aceh bebas dari pendudukan tentara Belanda.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan perjuangan di daerah Aceh di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara tampaknya cukup tersedia, antara lain Aceh yang rakyatnya sangat setia kepada Republik Indonesia akan mudah berjuang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara yang telah berpengalaman memimpin selama Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 1949 itulah Sjafruddin Prawiranegara memecah Provinsi Sumatera Utara menjadi dua provinsi baru yaitu Aceh dan Tapanuli/Sumatera Timur. Pembagian ini sangat mirip dengan pembagian Sumatera Utara menjadi dua daerah militer yang pernah dilakukannya pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dengan demikian Sjafruddin Prawiranegara adalah pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang mewujudkan terbentuknya Provinsi Aceh yang otonom untuk pertama kali. Provinsi Aceh yang pertama kali itu hanya berumur kurang dari satu tahun karena dengan keputusan pemerintah pusat, ia kembali dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada 12 Agustus 1950 mengadakan sidang dan menyusun tiga mosi. Teuku Ali Basyah Talsya (1950;30) menyebutkan bahwa dalam mosi tersebut disebutkan bahwa :

Kalau Aceh tidak mendapat provinsi tersendiri di bawah pimpinan Pemerintah Pusat, maka kami putra-putra Aceh yang duduk dalam pemerintahan sekarang dan yang sepaham dengan cita-cita ini akan mengundurkan diri. Di saat Pemerintah Pusat menolak tuntutan tersebut, maka di saat itulah kami keluar dari badan pemerintahan dan di saat itulah mandat kami kembalikan oleh kepala pemerintah Daerah Aceh kepada Pemerintah Pusat.

Menanggapi tanggapan masyarakat Aceh yang cukup keras terhadap penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat mengirimkan utusannya ke Aceh. Rombongan yang berangkat ke Aceh ialah Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat, Pembantu Gubernur Sumatera Utara Sarimin Reksodiharjo dan para pembesar dari Medan. Juga ikut M. Nur El Ibrahimy dan Amelz. Rombongan ini diterima langsung oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan tokoh-tokoh rakyat Aceh lainnya, guna membicarakan keberatan rakyat Aceh untuk bergabung dengan Sumatera Utara. Pertemuan itu ternyata tidak berhasil memberikan sesuatu kesepakatan.

Pada 27 November 1950, Wakil Presiden Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Aceh untuk membicarakan perihal otonom. Penjelasan wakil presiden kepada masyarakat Aceh juga ditolak oleh rakyat Aceh.

Pada 23 Desember 1950 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) juga berlangsung Kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang menghasilkan beberapa keputusan. Keputusan itu menyatakan sikap untuk tetap memperjuangkan daerah otonom untuk Aceh dan menentukan sikap jika pemerintah pusat menolak tuntutan tersebut. Keputusan juga berkenaan dengan pengambilan sikap yang positif terhadap kaum kontra revolusi kemerdekaan di Aceh (Ibrahimy, 1982; 58).

Dalam suasana yang tegang itu Perdana Menteri Muhammad Nasir berkunjung ke Aceh pada 22 Januari 1951 untuk membicarakan tentang otonomi daerah. Natsir berusaha agar masyarakat Aceh menarik kembali tuntutannya. Meskipun ia tidak berhasil sepenuhnya dalam usahanya tersebut, tetapi tampaknya sikap pemimpin masyarakat Aceh sedikit menjadi lebih lunak.

Pada saat kelompok Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sedang berjuang untuk mempertahankan status Provinsi Daerah Aceh, sekelompok uleebalang berpendapat bahwa usaha mempertahankan Provinsi Aceh yang dimotori oleh kelompok PUSA, dianggapnya sebagai usaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Kelompok ini kemudian menggabungkan diri dalam Badan Keinsyafan Rakyat (BKR).

Kelompok ini dipimpin oleh Teuku Muhammad Ali Lam Lagang. Mengenai tujuan dibentuknya badan ini Teuku Ali Basyah Talsya menyebutkannya sebagai berikut.

- (1) Membantu pemerintah di mana perlu
- (2) Membantu memberikan penerangan dan penjelasan kepada anggota dan rakyat umum, tentang suatu peraturan dan pengumuman dari pemerintah supaya diketahui dengan se jelas-jelasnya oleh rakyat jelata menurut kesanggupannya
- (3) Memperkuat silaturahmi antara rakyat dengan rakyat dan golongan dengan golongan dan/atau pemerintah.

Setelah itu, Presiden Soekarno juga berkunjung ke Aceh pada 30 Juli 1950. Pada waktu itu pertentangan antara PUSA dengan BKR sedang hangat-hangatnya. Hal ini misalnya terjadinya penggelaran spanduk oleh kedua kelompok yang saling bertentangan itu (Maimull Fidar, 1990:40).

Sementara itu dalam keadaan penuh ketegangan di Aceh, di Medan berlangsung kongres alim ulama se Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan agar dalam pemilihan umum yang akan datang Negara Republik Indonesia menjadi negara Islam. Kongres tersebut berlangsung antara 11 sampai 15 April 1953.

Pada 25 sampai 29 April 1953, di Langsa Aceh Timur diadakan Kongres PUSA yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kongres tersebut memutuskan dibentuknya suatu organisasi Persatuan Bekas Pejuang Aceh untuk menampung bekas-bekas pejuang Aceh yang telah kembali ke dalam masyarakat. Diserukan pula kepada orang-orang yang menghadiri kongres itu untuk menyebarkan anjuran agar masyarakat dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan itu memberikan suaranya kepada partai-partai Islam.

Untuk memperoleh dukungan masyarakat luas di Aceh, dibentuklah organisasi-organisasi massa seperti Pandu Islam yang dipimpin A. Gani Mutyara. Pemuda PUSA yang selama beberapa tahun terakhir tidak aktif, dihidupkan kembali. Pandu Islam, Pemuda PUSA, dan organisasi-organisasi massa lainnya diberikan latihan-latihan militer dan teknik penyerangan.

Di samping latihan militer biasa, kepada para anggotanya diberikan latihan dasar militer. Pandu Islam semakin hari semakin bertambah sehat dan pengikutnya bertambah banyak. Mereka juga menerima latihan militer dari prajurit-prajurit militer berpengalaman. Kepada mereka khusus diajarkan metode penyerangan dan penyerbuan. Latihan ini mereka terima tidak hanya pada siang hari, tetapi juga pada malam hari (Gelanggang, 1956;18).

Untuk menarik simpati rakyat Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh mengunjungi seluruh pelosok Aceh. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan masyarakat, ia menyampaikan hasil kongres yang berlangsung di Medan. Ia juga mengingatkan rakyat Aceh untuk siap menghadapi terjadinya sesuatu di kemudian hari.

Ketika suasana di Aceh cukup tegang, pada 1 Mei 1953 pemerintah menangkap Mustafa Rasyid yang menamakan dirinya sebagai utusan istimewa Kartosuwiryo. Dari utusan ini berhasil diperoleh keterangan tentang hubungan yang terjalin antara Kartosuwiryo dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dijk (1983;282) menyebutkan bahwa memang tidak dapat dibantah tentang adanya hubungan di antara kedua tokoh itu. Namun demikian, ia tidak dapat memastikan siapa di antara kedua tokoh itu yang mengambil inisiatif dibukanya hubungan tersebut. Menurut sebuah laporan rahasia, Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Amir Husein Al Mujahid dikatakan telah pergi ke Bandung. Dikatakan bahwa suatu pertemuan rahasia telah diadakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada 13 Maret 1953. Pertemuan itu dihadiri oleh Husen Al Mujahid, Hasan Ali, Sayed Abubakar, dan A.R. Hanafiah. Pertemuan itu memutuskan untuk mengirim dua orang utusan ke Jawa guna mengadakan pertemuan dengan pimpinan Darul Islam di sana. Sekembalinya Husein Al Mujahid dari Jawa, ia tinggal beberapa hari di Medan untuk menghubungi wakil-wakil di sana.

Dalam pemeriksaan kejaksaan di Jakarta, Mustafa Rasyid memberikan keterangan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh telah diangkat oleh Kartosuwiryo sebagai gubernur Darul Islam di Aceh. Keterangan ini telah menambah runcingnya suasana.

Sementara itu keadaan di Aceh semakin menjadi panas dengan semakin aktifnya latihan-latihan yang dijalankan oleh Pandu Islam secara besar-besaran. Pihak pemerintah juga mengambil langkah-langkah pengiriman pasukan mobring ke Aceh (Teuku Ali Basyah Talsya, 1950; 61).

Dalam keadaan penuh ketegangan itu, Jaksa Tinggi Sunaryo dari Jakarta tiba di Aceh dengan membawa sebuah daftar nama para pemimpin di Aceh lebih-kurang 300 orang yang harus ditangkap. Tampaknya pemerintah telah menyusun sebuah daftar nama orang-orang yang dianggap terlibat dengan gerakan Darul Islam di Aceh.

Meskipun berdasarkan keterangan Mustafa Rasyid daftar nama itu tidak ada, namun keberadaan daftar nama tersebut telah membuat kegelisahan yang sangat mendalam di kalangan para pemimpin di Aceh. Mereka yang merasa namanya terdaftar dalam daftar itu memilih lebih baik naik gunung dari pada harus dijadikan orang tahanan. Adanya isu tentang daftar nama tersebut telah menyebabkan munculnya pemberontakan Darul Islam di Aceh menjadi lebih cepat.

Pada bulan Desember 1953 berlangsung sebuah pertemuan yang sangat rahasia di rumah kediaman Teungku Muhammad Daud Beureueh, Mutiara. Pertemuan itu dihadiri oleh lebih-kurang 100 wakil dari seluruh Aceh. Pertemuan itu membicarakan tentang cara-cara melakukan kudeta atau coup serta menyusun satu territorium tentara (Meuraxa, 1945; 108).

Teungku Muhammad Daud Beureueh merencanakan untuk memproklamasikan Darul Islam di Aceh pada 7 Agustus 1953. Tanggal ini dipilih karena Kartosuwiryo menetapkan tanggal tersebut sebagai hari proklamasi Negara Islam Indonesia.

Berhubung rencana tersebut telah terlebih dahulu tercium oleh pemerintah pusat, terutama oleh Muhammad Hatta diminta kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk menunda rencana tersebut. Tampaknya permintaan Muhammad Hatta itu membawa pengaruh, dan karenanya kemudian direncanakan untuk memproklamasikannya pada 17 Agustus 1953. Namun demikian karena persiapan-persiapan belum matang, maka peristiwa itu diundurkan sampai pertengahan Desember 1953 (Dijk, 1983; 285).

Setelah beberapa kali mengalami penundaan, pada 20 Desember 1953 (tengah malam), terjadilah pemberontakan Darul Islam Aceh dengan diproklamasikan berdirinya Darul Islam Aceh. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan sedang berlangsungnya Pekan Olah Raga Nasional (PON III) di Medan yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi negara.

4.2 Sebab-sebab Terjadinya Gerakan DI/TII di Aceh

Pemberontakan Darul Islam di Aceh merupakan peristiwa yang unik. Hal ini karena Aceh selama masa Perang Kemerdekaan telah menunjukkan kesetiannya yang luar biasa kepada Republik. Aceh telah menunjukkan sikap tegas dengan menolak ajakan Dr. T. Mansur pada 17 Maret 1949 untuk mendirikan negara bagian Sumatera ketika kesempatan itu terbuka lebar. Di samping itu, pemimpin dan rakyat di daerah itu dengan penuh semangat dan ikhlas membantu perjuangan Republik Indonesia. Mereka menyumbangkan pesawat terbang dari harta-benda rakyat dan bantuan keuangan untuk kelanjutan jalannya roda pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

Mengingat Republik Indonesia masih dalam cengkraman Belanda dan sulitnya komunikasi antarpulau di Indonesia serta hubungan ke luar, maka pemerintah telah menginstruksikan kepada semua residen dalam wilayah Republik Indonesia supaya membentuk suatu panitia (Dakota Fonds) dalam rangka pengumpulan biaya untuk membeli pesawat Dakota. Pada waktu kunjungan presiden ke Aceh, dalam suatu rapat antara presiden dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah) di Atjeh Hotel Kutaraja, telah dibicarakan berbagai hal sehubungan dengan situasi negara pada waktu itu. Presiden mengusulkan kepada GASIDA untuk menyediakan satu pesawat terbang Dakota yang berharga 120.000 Dollar Malaya atau 25 kg emas. Berdasarkan hasil pembicaraan dengan presiden tersebut, maka Aceh akan menyumbangkan dua pesawat Dakota, satu atas nama GASIDA dan satu lagi atas nama rakyat Aceh. Di samping memberikan dua pesawat terbang, rakyat Aceh juga menyumbangkan biaya untuk pemerintah pusat sebesar S\$ 500.000,- (*Straits Dollar*) dengan rincian, untuk perwakilan luar negeri Mr. Maramis S\$ 100.000,- Indonesia Office Singapore S\$ 50.000,- angkatan perang S\$ 250.000,- dan untuk pengembalian pemerintah ke Yogyakarta S\$

100.000,- (T. Ibrahim Alfian, 1982 : 101).

Seorang ahli mengatakan bahwa konflik antara ulama dan uleebalang yang telah berakar dalam masyarakat Aceh adalah penyebab terjadinya gerakan Darul Islam. Ia berpendapat bahwa perkembangan politik di Aceh masa pasca kemerdekaan pada dasarnya adalah kelanjutan dari keadaan sebelumnya (Wertheim, 1959 : 165).

Konflik antara dua kelompok masyarakat, muncul kembali karena revolusi nasional tidak menghasilkan kembali nilai-nilai masa lampau. Kelompok uleebalang mempergunakan kesempatan untuk menuntut balas terhadap ulama yang telah mengalahkan mereka di masa awal revolusi. Kelompok ulama, terutama dari kalangan ulama Pusai yang pada waktu itu sedang memegang kekuasaan politik, merasa terancam dan untuk mengatasinya mereka memerlukan dukungan pemerintah pusat. Apabila kedudukan mereka dapat bertahan pada posisi pemerintah di daerah, ancaman itu dapat diabaikan. Kemudian ulama menuntut lagi agar diberikannya status otonomi untuk Aceh. Pendapat itu juga dianut oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, bahwa gerakan itu bukanlah disebabkan penolakan tuntutan otonomi rakyat Aceh, tetapi hanya sebagai selubung dalam pertentangan kedua kelompok tersebut (S.M. Amin, 1953:27).

4.2.1 Munculnya Para Ulama Dalam Pemerintahan

Masyarakat Aceh sebagai suatu kesatuan dibangun atas beberapa pilar. Kelompok elite ulama dan para uleebalang adalah dua kelompok penting sebagai pilar-pilar masyarakat. Kedua kelompok itu pada dasarnya merupakan bagian integral dalam masyarakat Aceh. Diktu Adat Bak Poteumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala (Adat di tangan penguasa (raja), Hukum Islam di tangan ulama), merupakan cermin terintegrasinya kelompok ini. Dalam pengertian lain, uleebalang adalah pemimpin adat, raja-raja kecil yang mengepalai wilayah tertentu dan ulama pemimpin spiritual, mereka pada dasarnya menjalankan fungsinya masing-masing dalam masyarakat demi terciptanya suatu keseimbangan secara harmonis dalam masyarakat.

Ulama mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan rakyat serta mampu untuk memimpin rakyat. Hal ini dapat dilihat ketika

Aceh melawan Belanda. Menurut Snouck Hurgronje, hal ini disebabkan oleh kekacauan perang yang menghancurkan ikatan-ikatan penghubung rakyat dengan uleebalang. Untuk menggantikan ikatan-ikatan ini rakyat berpaling kepada Islam. Kesempatan ini dipergunakan oleh para ulama untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam menumbangkan kekuasaan uleebalang (Snouck Hurgronje, 1985 : 172).

Pendapat Snouck Hurgronje itu dibantah J.T. Siegel. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ikatan-ikatan yang disebut Snouck Hurgronje itu tidak pernah ada. Kehancuran itu sebenarnya semata-mata disebabkan oleh serangan Belanda. Oleh karena itu justru semakin mempererat ikatan antara rakyat dengan uleebalang. Namun demikian ulama berhasil mengerahkan rakyat untuk menentang uleebalang, sementara uleebalang tidak berhasil (J.T. Siegel 1969 : 71).

Hubungan erat antara ulama dengan rakyat terjadi, sebenarnya karena ulama memandang rakyat yang bukan dari identitas sosial, tetapi dari adanya ikatan-ikatan khusus yang lebih kuat sebagai ikatan kaum muslimin. Adapun hubungan antara uleebalang dengan rakyat terletak pada ikatan tuan dan petani, dengan demikian hubungan itu tidak kuat. Di samping itu tindakan-tindakan beberapa uleebalang dalam kedudukannya sebagai penguasa juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap mereka (Maimul Fidar, 1990 : 20).

Pandangan di atas mengandung pengertian seakan-akan antara uleebalang, ulama, dan rakyat merupakan bagian yang terpisah dan menyampingkan integralitas suatu masyarakat yang memeluk agama Islam secara teguh. Pada hal sesungguhnya tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat ketika serangan Belanda yang dirasakan mengancam eksistensi agama Islam. Kelompok-kelompok pemimpin masyarakat, baik sultan, uleebalang, maupun ulama secara bahu-membahu menyusun kekuatan menghadapi Belanda. Ulama memaklumkan perang sabil, uleebalang bersedia menjadi panglima perang. Ketika unsur ini bersatu dalam menghadapi Belanda yang mereka anggap sebagai kaphe atau kafir. Ketika kelompok sultan dan uleebalang undur

dari medan perang, para ulama tetap meneruskan perjuangan melawan Belanda.

Faktor yang merusak hubungan diantara mereka adalah politik kolonial Belanda dalam upaya menguasai Aceh. Belanda merangkul uleebalang untuk memerintah rakyat dan mencegah ulama untuk terjun dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian para ulama hanya dapat memimpin rakyat dalam bidang keagamaan dan sosial saja. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan antara ulama dengan uleebalang. Keadaan ini berlanjut terus ke dalam bentuk konflik.

Usaha Belanda mencampakkan ulama dari bidang politik tidak seluruhnya berhasil atau hanya untuk periode tertentu saja dapat dibendung. Para ulama menggabungkan diri dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang didirikan pada tahun 1939. Pada dasarnya organisasi ini berhaluan politik, tetapi dalam perkembangannya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menghasilkan tokoh-tokoh politik yang akhirnya menjadi pemimpin dalam pemerintahan di daerah Aceh (Maimul Fidar, 1990 : 22).

Organisasi PUSA mendapat sambutan secara baik dalam lapisan masyarakat Aceh. Ini terjadi karena PUSA merupakan organisasi rakyat yang bersifat Aceh seluruhnya (Antony Read, 1987 : 59-60).

Meskipun di dalam organisasi PUSA terdapat beberapa orang uleebalang, tetapi ternyata antara PUSA dan uleebalang menampilkan pertentangan yang kian tajam. Untuk ini Antony Read (1987 : 65) menyatakan, "tanda pertama yang jelas bahwa kaum PUSA menuju suatu konflik dengan kaum uleebalang terletak dibidang agama". Pada bulan September 1939 pengurus PUSA dengan hormat memohon agar pendidikan agama dilepaskan dari kekuasaan uleebalang.

Keberhasilan ulama memasuki arena politik pemerintahan mulai nampak pada waktu Jepang mulai masuk ke Aceh pada tahun 1942 (C. Van Dijk, 1983 : 257). Dalam bulan Agustus 1942 Jepang mengangkat sebagian ulama menjadi Dewan Rakyat Aceh (Atje-shu-sangi-kai) yang di dalamnya terdapat Daud Bereuh, salah seorang pendiri PUSA. Selain itu, ulama juga diberi kesempatan memegang jabatan pemerintahan dan Peradilan agama. Meskipun demikian untuk

memimpin administrasi pemerintahan di daerah-daerah, Jepang masih menggunakan tenaga-tenaga uleebalang (Plekaar, 1981:339).

Pada permulaan kemerdekaan, kedudukan ulama semakin memuncak karena masyarakat mengerti akan kemerdekaan dan berdiri di belakang ulama untuk mendukung republik. Apalagi adanya kemungkinan Belanda ingin menduduki kembali daerah Aceh. Kondisi ini semakin mengukuhkan kedudukan ulama sebagai penyambung aspirasi rakyat untuk mengumandangkan jihad akbar untuk mempertahankan daerahnya.

Dukungan ulama pada Republik Indonesia pada 15 Oktober 1945 berupa pernyataan ulama seluruh Aceh yang ditanda tangani oleh empat orang ulama terkemuka yaitu Teungku Daud Beureuh, Teungku Ahmad Hasballah, Teungku Jafar Sidik, Teungku Hasan Krueng Kale. Pernyataan ini berisi seruan kepada rakyat agar bersatu di belakang pemimpin besar revolusi Soekarno dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Maklumat ini ditegaskan juga bahwa perjuangan untuk Kemerdekaan merupakan suatu tujuan yang suci sebagai perang sabil (Kahin, 1990:98).

Sementara itu berkembang desas-desus dalam masyarakat bahwa sebagian uleebalang telah mempersiapkan kedatangan pasukan sekutu. Sikap yang diambil uleebalang untuk mengembalikan kedudukannya seperti sebelumnya (Ali Basyah talsya, 1950:22)

Meskipun demikian, menempatkan semua uleebalang atau menyebut uleebalang sebagai kelompok pengkhianat revolusi dan lawan perjuangan Republik Indonesia sungguh tidak beralasan. Kenyataannya banyak uleebalang yang aktif membantu Republik sebagai tenaga profesional di bidang pemerintahan, seperti gubernur Sumatera yang pertama Mr. T. Muhammad Hasan, mewakili Sumatra Dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Residen Aceh Teuku Nyak Arif bekas pemimpin pasukan F (Hasjmy, 1985 : 103)

Demikianlah , untuk mengukuhkan keberlangsungan Republik Indonesia di Aceh, T. Nyak Arief menjabat residen Aceh. Sejak September 1945 ia mengumpulkan beberapa tokoh terkemuka bekas giyugun

dan heiho untuk membentuk kekuatan tentara. Nama yang dipilih untuk organisasi ini adalah angkatan Pemuda Islam (API) dengan komandannya Syamaun Gaharu (Antony Read, 1987 : 314). Keinginan T Nyak Arief adalah membentuk tentara berdasarkan keahlian dan pengalaman. Pemimpin tentara harus diserahkan kepada perwira terlatih yang mendapat pendidikan militer Jepang dan kebanyakan dari mereka adalah dari golongan uleebalang (Kahin, 1990 : 99)

Selain Angkatan Pemuda Indonesia (API), yang mewakili Tentara Republik Indonesia di Aceh adalah kesatuan tentara yang tergabung dalam laskar Mujahidin dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Laskar Mujahidin dibentuk oleh Ulama Islam ketika perjuangan melawan Belanda. Dengan demikian Laskar Mujahidin berada di bawah pengawasan PUSA. Barisan Pemuda Islam (BPI) sebelumnya bernama Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) dengan A. Hasjmy sebagai ketuanya. Pada bulan Oktober 1945 IPI berubah menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI), kemudian berubah menjadi Pemuda Republik Indonesia, dan akhirnya berubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia disingkat Pesindo (Dua Windu, 1972 : 102-103), dengan Devise Rencong di bawah pimpinan Nyak Nek Rica, seorang pemuda PUSA. Perbedaan kedua organisasi ini dengan Pesindo adalah sebagai berikut Pesindo lebih banyak didominasi pemuda perkotaan dan terpelajar, sedangkan laskar Mujahiddin terdiri atas pemuda-pemuda pedesaan (Mahdi Nurudin, 1991 : 20).

Sementara itu dipihak uleebalang, Teuku Umar Keumangan pada 22 Oktober 1945 menganjurkan agar kaum uleebalang membentuk organisasi tentaranya sendiri yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Dalam hal ini Amin (1978 : 132) mengatakan, "dalam waktu singkat Barisan Penjaga Keamanan ini telah terbentuk dan mempunyai persenjataan lengkap, bahkan lebih sempurna dari persenjataan tentara keamanan rakyat (TKR). Kesempurnaan ini dimungkinkan mengalirnya bantuan keuangan dari sebagian uleebalang seluruh Aceh, disamping pemberian senjata dari Jepang".

Cara yang ditempuh untuk melucuti senjata Jepang oleh masing-masing kelompok tentara itu kemudian menimbulkan pertengkaran. Ini merupakan salah satu sebab terjadinya konflik bersenjata antara golongan ulama dengan uleebalang.

Sebab lain terjadi terjadinya revolusi sosial adalah kekosongan kekuasaan tidak adanya orang yang mampu mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang dapat diterima oleh pemimpin rakyat Aceh khususnya para aktifis PUSA (Kahin, 1990 : 99).

Revolusi sosial bermula dari tindakan Teuku Uleebalang Cumbok Muhammad Daud, di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Ia sebagai orang sangat berani dan lebih menyukai kekerasan dari pada diplomasi serta memiliki sikap yang angkuh (Antony Read, 1987 : 324). Lebih lanjut Antony Read mengatakan selama bulan November 1945 Daud Cumbok menyelenggarakan keramaian lengkap dengan perjudian dan mabuk-mabukan. Ia juga tidak senang dengan semangat pro-republik, dan masih mengharapkan Belanda untuk kembali ke Indonesia.

Perebutan persenjataan peninggalan Jepang telah mempertajam bentrokan di antara kedua kelompok tersebut. Disamping itu juga para pejabat Jepang terus berubah untuk mempertajam konflik antara ulama dan uleebalang. Hal ini untuk menghilangkan tekanan orang Aceh terhadap orang Jepang yang sedang menunggu pemberangkatannya.

Pertempuran di Sigli antara ulama dan uleebalang dalam usaha memperoleh senjata dari Jepang merupakan pertanda semakin tingginya suhu pertentangan di antara mereka. Meskipun ada usaha dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pejabat pemerintah untuk menetralisasi konflik itu, tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal. Bahkan usaha Tentara Keamanan Rakyat tersebut dicurigai oleh kelompok ulama karena di antara mereka didominasi kelompok uleebalang. Dengan jatuhnya banyak kurban penduduk desa dalam pertempuran itu semakin mempertegas citra uleebalang di mata rakyat sebagai manusia-manusia buas yang sebelumnya memang menjadi keluhan. Di pihak lain kelompok uleebalang semakin ketakutan melihat hari depannya. Karena sudah pasti corong demokratisasi akan terbuka lebar. Oleh karena itu harapan uleebalang terarah kepada Daud Cumbok sebagai satu-satunya uleebalang yang sanggup mempertahankan kan mereka. Usaha yang dilakukan oleh Daud Cumbok adalah intimidasi terhadap lawan-lawannya, karena ia beranggapan bahwa keselamatan mereka terletak pada menciptakan rasa takut lawan mereka dengan menunjukkan kekuatan (C. Van Dijk, 1983 : 264).

Hal demikian telah membangkitkan amarah rakyat. Tuntutan ribuan rakyat dan pemuda desa terhadap kesewenangan Daud Cumbok telah berhasil memaksa pemimpin republik untuk memberikan tanggapan terhadap masalah ini. Pada 8 Januari 1946 Markas Besar Umum dan Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan dua ultimatum. Pertama, Pemerintah Daerah Aceh menyatakan pasukan-pasukan uleebalang yang berpusat di Lameulo sebagai pengkhianat dan musuh Republik Indonesia. Kedua, menuntut agar para uleebalang menyerahkan senjatanya sebelum 10 Januari 1946 (Hasjmy, 1985 : 321).

Ultimatum tersebut seakan memberikan dukungan terhadap gerakan yang dilakukan rakyat dan ulama. Dengan tindakan PUSA yang dulunya dianggap illegal kemudian menjadi legal. Bahkan pemerintah daerah membenarkan tindakan PUSA dan turut serta dengan PUSA menghancurkan uleebalang. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas segala yang timbul dari peristiwa Cumbok (Amin, 1978 : 14).

Karena uleebalang Cumbok tidak menghiraukan ultimatum tersebut, maka terpaksa dilakukan serangan-serangan terhadap uleebalang dan banyak di antara mereka yang tewas. Peristiwa itu membawa dampak luas dalam pemerintahan daerah Aceh. Lebih lanjut Antony Read (1987 : 339) mengatakan "pemerintah di daerah Aceh hampir-hampir tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya. Efektivitas pemerintahan akan terwujud jika pejabat-pejabatnya mendapat kepercayaan rakyat dan mereka yang tidak disukai segera harus digantikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat (Ibrahimy, 1982 : 132).

Posisi Residen Aceh Teuku Nyak Arief juga menjadi goyah. Dia digantikan oleh Teuku Muhammad Daud Syah, dan Teuku Muhammad Amin diangkat menjadi wakil residen. Di pihak lain Syamaun Gaharu sebagai panglima Devisi V digantikan oleh Husen Jusuf dan Amir Husen Al-Mujahid menggantikan Teuku Nyak Arief sebagai anggota staf umum Tentara Republik di Sumatera. Dengan demikian kelompok ulama mulai memegang kekuasaan di Aceh.

4.2.2 Ketidakpuasan Pemimpin Rakyat Aceh

Dengan ditangkapnya sebagian besar pemimpin Republik Indonesia dalam Aksi Militer Belanda Kedua di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, pertahanan daerah Sumatera dibagi menjadi lima daerah militer; salah satunya adalah residen Aceh. Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur sipil dan Militer dengan pangkat mayor jenderal tituler. Pengaturan ini dikukuhkan pada bulan Mei 1949 oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dikepalai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Dengan demikian semua kekuasaan sipil dan militer, gubernur dipropinsi Sumatera dihapuskan (Maimul Fidar, 1990 : 35).

Pada bulan Juli 1949 Pemerintah Darurat dibubarkan. Sjafruddin Prawiranegara menerima jabatan baru sebagai wakil perdana menteri mewakili pemerintah pusat untuk melaksanakan pemerintahan yang berkedudukan di Kutaraja. Penetapan ini didasarkan atas pertimbangan sukarnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah-daerah. Pemerintah pusat juga memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada Sjafruddin Prawiranegara, misalnya berhak membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (Abdullah Ali, 1985 : 334).

Ketika Sjafruddin Prawiranegara mengunjungi Aceh dalam bulan Agustus 1949, dia menerima aspirasi sebagian besar penduduk Aceh. Pada 17 Desember 1949 ia mengeluarkan peraturan pengganti peraturan pemerintah Nomor : 8/Des/WKPM/1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh. Wilayahnya meliputi Keresidenan Aceh dan sebagian dari Kabupaten Langkat (Hasjmy, 1984 : 8).

Pembentukan Provinsi Aceh ternyata tidak dikehendaki oleh lawan-lawan PUSA. Mereka mengeluarkan selebaran dan karangan-karangan yang menyudutkan PUSA kepada Pemerintah Pusat di Jakarta (Hasjmy, 1984 : 12).

Terlepas dari masalah di atas, pemerintah pusat memang menunjukkan perhatian terhadap peraturan wakil perdana menteri, pengganti peraturan pemerintah. Pemerintah pusat membentuk suatu komisi penyelidikan yang diketuai Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo, melakukan peninjauan ke Aceh (Amin, 1978:85).

Dalam pertemuan dengan pimpinan di Aceh, dikatakan bahwa pemerintah belum mengambil suatu keputusan apakah Aceh benar-benar menjadi provinsi. Masalah ini menimbulkan reaksi keras dari pihak Aceh, dengan mengeluarkan ancaman, seluruh pramong praja dan pegawai negeri akan meletakkan jabatan bila Provinsi Aceh dibubarkan.

Pada 20 Agustus 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh mengeluarkan sebuah pernyataan (mosi) yang isinya sebagai berikut. Pertama, mempertahankan Provinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. Kedua, kalau Aceh tidak menjadi suatu provinsi di bawah pimpinan pemerintah pusat, putra-putra Aceh yang duduk dalam pemerintahan dan yang sepaham dengan cita-cita akan mengembalikan mandat kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Dalam mosi itu juga disusun suatu penjelasan panjang-lebar dan alasan-alasan bahwa Aceh wajar untuk mendapat otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri. Di samping dari sudut sejarah, geografis, politik, sosiologi, agama, kebudayaan dan ekonomi yang berada dengan daerah lain di Sumatera Utara (Ibrahimi, 1987 : 58).

Walaupun dipertahankan oleh rakyat Aceh, pemerintah pusat meleburkan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Pemerintah Pusat Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tanggal 14 Agustus 1950. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, hilanglah Provinsi Aceh yang pertama yang baru berusia delapan bulan dan hilang pula harapan rakyat Aceh untuk mengurus dirinya dalam suatu provinsi yang otonom. Inilah yang menjadi kekecewaan pemimpin-pemimpin di Aceh. Seolah-olah jerih-payah rakyat Aceh membantu Republik dalam revolusi fisik tidak dihargai.

Persoalan Provinsi Aceh ternyata sejalan dengan kondisi kabinet pemerintah Republik Indonesia yang jatuh-bangun. Enam hari setelah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 14 Agustus 1950, Natsir dari Masyumi terpilih sebagai formatur kabinet dan pada 6 September 1950 susunan kabinet terbentuk. Natsir mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan Aceh. Di satu pihak Natsir merupakan bintang Masyumi yang menjadi pujaan dan harapan PUSA

serta partai yang mendominasi rakyat Aceh ketika itu. Bila tidak ditanggapi, berarti pamornya pudar di mata rakyat Aceh, tetapi bila memenuhi tuntutan rakyat Aceh konsekuensinya Kabinet Natsir akan jatuh. Untuk itu Natsir mengambil kebijaksanaan bahwa, "secara de facto Provinsi Aceh berjalan terus" dan memang demikian adanya. Gubernur dan Pemerintah Daerah Aceh masih berlangsung sampai pelantikan Andul Hakim pada 25 Januari 1951 sebagai gubernur Sumatera Utara (C. Van Dijk, 1983 : 276).

Di saat gencar-gencarnya rakyat Aceh dan PUSA menuntut otonomi dan ditetapkannya Provinsi Aceh, pada 8 April 1951 di Lamateumen Aceh Besar dibentuklah Badan Keinsafan rakyat (BKR). Badan ini merupakan organisasi lawan PUSA dengan pengurusnya Teuku Ali Lam Lagang sebagai ketua, Nyak Mukim sebagai wakil ketua, Ibrahim sebagai penulis, Tjut Itam dan Keuchik Hanafiah Lam baro Angan sebagai bendahara, dan Keuchik Saleh, Keuchik Ajat, Keuchik Raja, serta Teuku Samidan sebagai komisaris-komisaris (C. Van Dijk, 1983 : 277).

Badan Keinsafan Rakyat (BKR) bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberi penerangan tentang kebijaksanaannya dan memperkuat hubungan dengan rakyat. Dalam resolusinya, Badan Keinsafan Rakyat (BKR) mendesak pemerintah untuk memecat pejabat-pejabat yang merintangi pelaksanaan peraturan pemerintah atau mereka yang korup serta tidak mampu. Mereka mengimbau agar pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat. Pemerintah harus mengembalikan harta anak yatim yang sekarang masih disimpan oleh Majelis Penimbang dan memberi penjelasan kesalahan yang dilakukan di luar pertempuran oleh orang-orang PUSA. Jelasnya, sasaran pokok dari BKR adalah pemimpin-pemimpin PUSA. Persoalan ini kian menghangat ketika Presiden Soekarno datang berkunjung ke Aceh bulan Juli 1951, terjadi perang spanduk yang berisikan slogan-slogan yang mendiskreditkan lawan masing-masing sehingga memperuncing suasana (Ibrahimy, 1983 : 127).

Dengan digabungkannya Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara, sejumlah pegawai diganti. Daud Beureueh diberi jabatan di Jakarta,

tetapi ia tidak pernah berangkat ke sana. Divisi X Tentara Republik Indonesia di Aceh dilebur ke dalam Komando Tentara dan teritorial I/Sumatera Utara. Di Aceh hanya tinggal satu Residen tentara di bawah pimpinan Mayor Nazir (Boland, 1985 : 76). Selain itu juga diadakan mutasi besar-besaran. Kepala Polisi Daerah Aceh Mohammad Insa dan Komisaris Muda Polisi Yusuf Effendi, dua tokoh yang dianggap pro-PUSA, (Ibrahimi, 1987 : 66) serta pasukan Brimob (Brigade Mobil), yang terdiri atas putra-putra Aceh dipindahkan ke Medan.

Hal lain yang menyebabkan kejengkelan rakyat Aceh adalah apa yang dikenal dengan "Razia Agustus 1951". Razia Agustus ini dilakukan pada saat koalisi Masyumi-PNI yang dipimpin Soekirman, karena disinyalir ada sebuah komplotan yang berusaha menggulingkan pemerintah. Feith (1973 : 189) menyebutkan sebagaimana dikutip oleh C. Van Dijk (1983 : 278), kelompok ini didominasi oleh pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang Cina komunis serta melakukan hubungan dengan beberapa orang kelompok Darul Islam. Itulah sebabnya, Kabinet Soekirman kemudian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam komplotan tersebut. Adapun untuk daerah-daerah persoalan ini diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat setempat untuk menangkap mereka yang dianggap berbahaya.

Razia Agustus telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh lawan PUSA. Bila daerah lain yang menjadi bulan-bulanan razia adalah pendukung komunis, di Aceh malah sasaran ditujukan kepada pemimpin Islam atau PUSA (C. Van Dijk, 1983 : 278). Tidak satu pun rumah pemimpin PUSA luput dari penggeledahan sehingga suasana menjadi lebih panas. Di samping itu tindakan-tindakan yang sangat menyinggung perasaan juga diperagakan oleh aparat pelaksana razia tersebut. (Ibrahimi, 1982 : 70).

Meskipun alasan-alasan yang diungkapkan di atas, sebagai gerakan, tidak bisa dikecilkan alasan dari keinginan rakyat Aceh yang telah mencintai Agama Islam. Tidak ada satu literatur pun dapat membantah bahwa perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda semata-mata hanya untuk mempertahankan Agama Islam (Gelanggang, 1956:138). Hal ini juga tercetus dalam kongres alim ulama pada bulan

April 1953 agar Islam sebagai konstitusi negara Indonesia (Gelanggang, 1956 : 10) selanjutnya. Gelanggang menyebutkan para alim ulama dengan tegas bersumpah akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan rakyat memperjuangkan agama Islam dalam pemilihan umum yang akan datang.

Selain itu juga Aceh menilai, Pemerintah Indonesia sudah menjurus kepada anti Islam dan lebih mementingkan kepentingan Jawa yang mempunyai latar belakang Hindu. Pemerintah Indonesia dilukiskan sebagai pemerintah yang menggunakan baju nasionalisme dan hal ini sama dengan komunis. Ini berarti ingin mengembalikan kejayaan Kerajaan Majapahit (Gelanggang, 1956 : 54).

Partai Nasional Indonesia (PNI) dan sejumlah partai kecil dituduh menjadi alat dalam usaha-usaha ini. Banyak orang muslim dipaksa masuk dalam perangkap dan mendukung orang yang sesungguhnya berusaha menghancurkan Islam. Hal ini diakibatkan pemerintah yang telah dipengaruhi oleh komunis yang semakin maju dalam bidang politik. Pergantian Kabinet Wilopo yang didukung Masyumi dan PNI dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang didukung oleh PNI, merupakan pertanda pemerintah akan melayani Aceh dengan lebih keras. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikirimnya pasukan Angkatan Darat ke Aceh yang terdiri atas bekas serdadu-serdadu Belanda dan orang-orang non Islam. (Nazamuddin Sjamsuddin, 1989 : 116). Dengan demikian, persoalan konflik yang terjadi di pusat juga tidak dapat diabaikan, sebagai salah satu sebab terjadinya pemberontakan.

Begitulah, ketika rakyat Aceh melihat pemimpin Republik tidak membuka pintu ke arah kemajuan Islam dan otonomisasi daerah, Kartosuwirjo memproklamasikan Darul Islam sebagai cetusan atas rasa kekecewaannya. Tidak mengherankan bila Daud Beureueh kemudian melakukan hubungan dengannya untuk membicarakan Aceh kemungkinan akan bergabung di dalamnya. Masalah ini menjadi desas-desus yang cukup santer dengan tertangkapnya Mustafa Rasjid pada bulan Mei 1953 sebagai utusan Kartosuwirjo ketika hendak kembali ke Jawa (Ibrahimy, 1982 : 29).

BAB V

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERONTAKAN DI/TII DI ACEH

Melihat kepada kesibukan para aparat pemerintah pusat yang berkunjung ke Aceh setelah diputuskan peleburan kembali Provinsi Aceh yang dibentuk Sjafruddin Prawiranegara, dapatlah dikatakan bahwa rasa ketidaksenangan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat sebagai akibat keputusan itu, dapat dirasakan oleh pejabat-pejabat di pusat. Namun demikian sebagai upaya untuk tetap menjaga kewibawaan dan juga karena terikat dengan ketentuan pembentukan daerah-daerah provinsi di Indonesia yang tidak boleh lebih dari sepuluh pemerintah pusat tetap berpegang teguh pada keputusannya. Teungku Muhammad Daud Beureueh dan para pengikutnya mengumumkan secara resmi terbentuknya Negara Bagian Aceh dari Negara Islam Indonesia yang diproklamsikan Kartosuwiryo.

5.1 Tanggapan Pemerintah Terhadap DI/TII

Reaksi pertama yang dikeluarkan Komandan Resimen I Infanteri di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) terhadap pemberontakan itu ialah dengan segera mengeluarkan sebuah pengumuman militer. Pengumuman itu menyatakan bahwa di Aceh telah pecah suatu pemberontakan yang digerakkan oleh gerombolan liar. Oleh karena itu diminta kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada, serta

memberikan bantuan sepenuhnya kepada alat negara untuk menumpas pemberontakan tersebut (Ali Basyah Talsya, 1950 : 72).

Gubernur Sumatera Utara juga mengeluarkan seruan dalam dua bahasa, Indonesia dan Aceh, pada 23 September 1953. Seruan ini disebarluaskan lewat udara. Sementara itu jawatan penerangan Sumatera Utara pada 30 Oktober juga menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh agar menginsyafi bahwa perbuatan tersebut menyalahi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Meskipun sering dikatakan bahwa pemberontakan DI/TII di Aceh sebagai pemberontakan ulama Aceh, namun dalam kenyataannya tidak semua ulama memihak pemberontak. Sebagian ulama Aceh yang tidak bergabung dengan kelompok Daud Beureueh dengan tegas menyatakan bahwa pemberontakan itu adalah kemungkaran. Para ulama tersebut antara lain adalah Hasan Krueng Kalee, Teungku Makam, Teungku Abdul Salam Meuraxa, Teungku Saleh Meugit Raya, Teungku Muda Wali, Labuhan Haji. Mereka membuat seruan kepada segenap kaum muslimin supaya jangan terpedaya dengan ajakan-ajakan pemberontak. Kepada penduduk yang tidak berpihak kepada Daud Beureueh diajak untuk menggerakkan rakyat yang telah ikut memberontak agar menginsyafi kesalahannya dan membantu alat-alat negara (Nur El-Ibrahimi, 1980:99).

Sementara itu kelompok anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengambil sikap tersendiri. Pada 23 September 1953, tiga hari setelah meletusnya pemberontakan, mereka menunjukkan aksinya di Medan. Mereka yang berjumlah 20 orang, secara demokratif telah mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan. Mereka minta berjumpa dengan gubernur, dengan lebih dahulu mengirimkan dua orang wakilnya. Perutusan itu ditolak oleh gubernur. Tuntutan mereka ialah mendirikan Gerakan "Anti Teror Aceh" (ATA) yang bertujuan agar rakyat dipersenjatai untuk menumpas gerombolan (Nur El-Ibrahimi, 1980 : 100).

Partai Nasional Indonesia (PNI) menghadapi pecahnya pemberontakan DI/TII itu juga beraksi dengan membentuk gabungan partai-partai dan organisasi di Kutaraja. Pada mulanya gabungan ini dinamakan "Front Nasional", kemudian diubah menjadi Gabungan

Partai-Partai dan Organisasi-organisasi (GPO). Mereka menuntut adanya "pagar desa" yang dipersenjatai (Nur El-Ibrahimi, 1980 : 100-101).

Reaksi pertama pemerintah setelah meletusnya pemberontakan DI/TII Aceh adalah segera mengadakan pertempuran-pertempuran khusus untuk membicarakan pemberontakan tersebut. Dalam suatu pertemuan antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin, kepala Staf Angkatan Darat dan jaksa agung yang berlangsung dua hari setelah terjadinya pemberontakan, telah dibicarakan panjang-lebar tentang peristiwa tersebut dan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah terhadap para pemberontak itu.

Rapat yang sama juga dilakukan antara Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin, menteri pertahanan, jaksa agung, kepala Staf Angkatan Darat, dan kepala Kepolisian Negara. Rapat kordinasi tersebut melahirkan keputusan untuk mengirim satuan ketentaraan secara besar-besaran ke Aceh. Menteri Penerangan Dr. L. Tobing, dalam pidato melalui RRI Jakarta menyebutkan bahwa gangguan keamanan yang terjadi di Sumatra Utara (Aceh) telah menarik perhatian pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah-tengah suasana kerukunan dan jiwa keolahragaan yang di gerakan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak 19 September 1953 yang berkumpul di Medan, pemerintah telah menerima laporan-laporan bahwa gerombolan bersenjata telah menyerang pos-pos polisi dengan maksud merebut senjata alat negara (Hasjmy, wawancara tanggal 20 Agustus 1993).

Di dalam partai-partai pun terjadi silang pendapat terhadap pemberontakan Darul Islam Aceh. Hal ini sesuai dengan ideologi dan strategi perjuangan masing-masing partai. Partai komunis memintakan kepada pemerintah agar menumpas habis pemberontakan DI/TII di Aceh. Dalam Harian Rakyat terbitan 24 September 1953, PKI mengumumkan sebuah pernyataan sebagai berikut.

Satu-satunya jalan bagi pemerintah adalah bersatu dengan rakyat menghancurkan separatis ini, dalam hubungan ini PKI menyatakan dengan jujur dan ikhlas bahwa PKI berdiri sepenuhnya di belakang Pemerintah Republik Indonesia dalam menghancurkan Darul Islam di Aceh, Jawa Barat dan di mana saja (Hasjmi, 1954 : 18).

Keng po yang terbit edisi 26 September 1953 memuat keterangan pemimpin Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Sudibyo. umumnya partai-partai Islam masih mengharapkan penyelesaian secara damai. Kerajaan di Aceh bukan berarti kebencian rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Buktinya, di masa perjuangan rakyat Aceh telah memberikan banyak bantuan kepada Republik Indonesia. Peristiwa DI/TII Aceh masih dapat diselesaikan secara damai. Jalan satu-satunya untuk menuju penyelesaian harus diserahkan kepada ulama, karena peristiwa ini justru ditimbulkan oleh ulama.

Harian pedoman yang terbit 26 September 1953, memuat keterangan juru bicara Masyumi, Mr. Burhanuddin Harahap. Ia mengirimkan nota kepada pemerintah agar memberikan perhatian tentang perkembangan di Aceh. Sirajuddin Abbas memberikan keterangan yang dimuat dalam Buletin Antara 2 Oktober 1953 yang menyatakan bahwa jalan yang di tempuh oleh Teungku Daud Beureueh adalah jalan yang jauh dari ajaran Islam. Adapun jalan yang paling dekat adalah melalui pemilihan umum.

Setelah mendengar keterangan-keterangan dari partai politik, pada 28 Oktober 1953 pemerintah memberikan keterangannya secara resmi tentang pemberontakan Darul Islam dalam sidang pleno DPR. Tanggapan itu disusun dalam empat bab yang didahului oleh kalimat-kalimat filosofis sebagai berikut.

Pemerintah memandang perlu untuk memberikan tanggapan bahwa, dalam keadaan rumah yang sedang terbakar maka yang diutamakan bukanlah lebih dahulu mencari sebab musibah kebakaran itu. Melainkan kita bersama harus berusaha sekuat tenaga untuk segera memadamkan api yang membahayakan itu atas dasar keinsafan dan tanggung jawab bersama (C. Van Djik, 1983 : 297).

Bab pertama memuat kronologis peristiwa sejak 21 September 1953 sampai pemerintah memberikan tanggapannya. Kejadian yang dimuat pemerintah dalam tanggapannya meliputi pertempuran, penangkapan dan kemenangan yang dialami oleh Panglima Tentara Teritorial Kolonel Simbolon. Bab kedua menceritakan latar belakang terjadinya pemberontakan yang dimulai sejak kerajaan Aceh. Ketika itu sudah terdapat dua golongan yang saling memperebutkan

pengaruh, antara kelompok uleebalang dan ulama . Diceritakan pula tentang hubungan kedua golongan tersebut pada masa penjajahan Belanda, kelahiran PUSA, dan pemberontakan Cumbok.

Bab ketiga adalah mengenai tindakan-tindakan yang di ambil pemerintah untuk menumpas pemberontakan. Sebagai langkah pertama adalah melokalisasikan pemberontakan, kemudian menjamin keamanan intern, memperkuat pos-pos tentara, dan mengamankan garis pengangkutan diantara pos-pos, serta mendatangkan pasukan-pasukan baru untuk menambah kekuatan tentara yang sudah ada di Aceh. Di samping itu juga pemerintah menjanjikan bantuan kepada pelajar/mahasiswa Aceh yang belajar di luar Aceh.

Mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil oleh pemerintah seperti penguasa daerah partai dimuat dalam bab empat. Pemerintah juga mengajak para ulama yang tidak memihak kepada pemberontak untuk menginsafkan rakyat yang telah ikut pemberontakan. Pemerintah juga berjanji untuk membangun Aceh di segala bidang apabila keamanan sudah normal kembali seperti pemberian rel kereta api dan pembangunan jalan-jalan (Hasjmy, 1984 : 24).

5.2 Kabinet-kabinet Pemerintah dan Kebijaksanaan Terhadap Darul Islam di Aceh

Pemberontakan DI/TII yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah gerakan separatis. Mereka mengangkat senjata, melawan Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud mendirikan Negara Islam. Hal ini dengan jelas terlihat sejak diproklamasikannya Aceh menjadi negara bagian dari Negara Islam Indonesia.

Menghadapi pemberontakan Darul Islam itu, sejak awal pemerintahan pusat telah menunjukkan sikap tegas untuk menghancurkan para pemberontak. Namun demikian, titik berat pelaksanaan kebijaksanaan itu antara satu kabinet dengan kabinet lainnya seringkali ada perbedaan-perbedaan. Untuk itu, akan dijelaskan satu-persatu.

5.2.1 Kabinet Ali Sastroamidjojo

Menghadapi pemberontakan Darul Islam di Aceh, pemerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo telah

mengarahkan kekuatan militer secara penuh. Hal ini sebenarnya tidak mudah, mengingat kaum pemberontak terus memberikan perlawanan. Keterlibatan militer di daerah-daerah yang bergejolak lainnya di luar Aceh menyebabkan jumlah pasukan yang dapat dikirim ke Aceh menjadi terbatas. Ketiga batalyon dari resimen I dan beberapa kompi Brimob yang ada di Aceh tidak cukup untuk memberikan perlawanan menghadapi Darul Islam (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 :126).

Untuk membantu unit-unit ini, pada awal bulan Oktober 1953 pemerintah mengirim dua batalyon tentara dan satu unit panser dari Sumatera Utara, dua batalyon tentara dari Sumatera Barat pada awal tahun 1954, ditambah dengan dua belas kompi Brimob. Di samping itu untuk memperhankan operasai-operasi militer, pemerintah juga mengirimkan angkatan udara untuk melancarkan serangan udara dari dua lapangan terbang peninggalan Jepang di Bireuen dan Kutaradja.

Bila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dimana pemerintah mempunyai sembilan belas batalyon pasukan, jumlah pasukan yang di kirim ke Aceh terhitung sedikit. Namun demikian bila dilihat wilayah Sulawesi Selatan jauh lebih luas dari pada Aceh, jumlah pasukan yang di kirim ke Aceh sangat besar. Dengan besarnya jumlah pasukan pemerintah yang dikirim ke Aceh, maka pemerintah dapat menguasai kota-kota, sedangkan daerah pedalaman tetap dikuasai oleh Darul Islam. Gencarnya serangan tentara Islam Indonesia (TII) terhadap pos-pos tentara Republik menyebabkan unit-unit militer bertindak secara keras. Setiap serangan dibalas dengan pembakaran rumah, penangkapan secara sembarangan serta penembakan di tempat. Seperti serangan TII terhadap sebuah konvoi Brimob di kampung Cot Tuphah dekat Bireuen pada awal September 1954, mengakibatkan ditahannya delapan puluh lima orang penduduk (Mimbar Umum, 14 September 1954).

Penangkapan-penangkapan tidak hanya dilakukan di Aceh saja, tetapi juga di Jakarta, Medan, dan Palembang. Di antaranya Hasjmy, Syeh Marhaban, Nyak Neh Rica, mereka termasuk pemimpin inti PUSA yang ditangkap di Medan dengan tuduhan keterlibatannya dalam persiapan pemberontakan. Selain itu pemerintahan pusat juga

telah menindak para perwira Aceh yang berhubungan dengan organisasi Darul Islam, seperti Mayor Hasballah Haji komandan militer di Medan dipindahkan ke Markas Besar Angkatan darat di Jakarta (Hasjmy, wawancara 10 Maret 1992).

Di samping tindakan militer, Kabinet Ali Sastroamidjojo juga berusaha untuk memisahkan pemimpin yang berontak dengan pengikutnya dalam masyarakat Aceh. Di satu pihak kabinet berusaha memperbaiki citranya di Aceh dengan memberikan perhatiannya, di lain pihak kabinet berusaha menarik dukungan dari semua lawan PUSA yaitu kaum uleebalang yang menentang pemberontakan. Pada awal Oktober 1953 pemerintah mengangkat S.M. Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara menggantikan A. Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu langkah pemerintah, karena S.M. Amin berorientasi kepada Masyumi yang mempunyai hubungan dengan Aceh. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap Aceh (Nazaruddin Syamsuddin, 1990: 129).

Sikap lunak Kabinet Ali Sastroamidjojo yaitu dengan mengangkat S.M. Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara dalam rangka pengambilan hati rakyat Aceh. Diimbangi pula dengan tindakan pemerintah memasuki unsur-unsur uleebalang dan BKR ke dalam dinas militer sebagai penasihat atau penunjuk jalan.

Di pihak lain juga memberi dukungan kepada ulama Perti untuk memisahkan rakyat dengan pemimpin-pemimpin PUSA yang berontak. Pemerintah mengharapkan sekurang-kurangnya dengan pengaruh ulama ini rakyat akan bersikap netral tidak memihak kepada Darul Islam. Dari hasil pengaruh ulama Perti seperti teungku Hasan Krueng Kale, Teungku Saleh Megit Raya, Tengku Abdul Salam Meuraxa, dan Teungku Makam pada bulan Oktober sampai Nopember 1953, membuat ratusan ulama Perti menyatakan dukungan mereka kepada pemerintah dan mengutuk Darul Islam. Dalam suatu pertemuan dengan staf keamanan dan sipil di kabupaten Pidie, ulama Perti tidak hanya memberikan dukungannya kepada pemerintah, tetapi juga masyarakat bahwa Daud Beureueh telah menyimpang dari hukum Islam.

Kebijaksanaan lain yang diambil pemerintah adalah dengan menyatakan bahwa kabinet sebelumnya telah mengabaikan pembangunan Aceh. Pemerintah berjanji akan memberikan bantuan dua puluh juta rupiah. Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro berjanji akan membangun ekonomi rakyat Aceh dalam waktu enam bulan setelah pemulihan keamanan (Indonesia Raya, 20 November 1953). Rencana pembangunan jalan, irigasi, listrik, dan pendidikan telah disampaikan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Beberapa menteri telah mempersiapkan dana anggaran 1953/1954. Namun demikian pemerintah untuk mengambil hati rakyat Aceh belum berhasil sepenuhnya. Darul Islam malah berpendapat bahwa seluruh kebijaksanaan pemerintah tersebut secara tidak langsung telah mengikuti kesalahannya selama ini terhadap Aceh dan membuktikan bahwa tuduhan mereka selama ini benar. Lebih jauh mereka mengatakan tidak ada pembangunan tanpa pemberontakan (Hasan Saleh, wawancara 12 Maret 1992).

Operasi terhadap tindakan tegas kabinet dan gubernur bukan hanya muncul di Aceh saja, tetapi juga di pusat. Dalam parlemen partai-partai oposisi terutama Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta wakil-wakil daerah aceh menyerang sejumlah kebijaksanaan kabinet tentang Aceh. Parade kekejaman yang diinstruksikan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh unit-unit militer menjadi bahan kritikan mereka. Natsir pemimpin Masyumi secara tegas dengan mengatakan bahwa hanya dengan musyawarah dan bukan tangan besi yang dapat menyelesaikan masalah (Natsir, 1957 : 246). Beberapa surat kabar terbitan Medan dan Jakarta juga mengkritik sejumlah kebijaksanaan pemerintah yang berusaha mengembalikan pengaruh uleebalang dalam pemerintahan. Waspada, surat kabar terbitan Medan yang berorientasi Masyumi, menyesalkan sikap pemerintah tersebut karena hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi (Waspada, 15 Desember 1953). Kritikan-kritikan tersebut mendapat dukungan yang cukup besar dalam parlemen dan memaksa pemerintah untuk mengirimkan misi parlemen ke Aceh guna mempelajari masalah pemberontakan.

Pada awal tahun 1954 sebuah parlemen datang ke Aceh dan dalam laporannya ke parlemen misi tersebut telah merekomendasikan usaha untuk mereorganisasikan Pemerintah Daerah Aceh. Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor setempat dan tidak memberikan prioritas kepada unsur-unsur uleebalang.

Meskipun Gubernur S.M. Amin menerapkan kebijaksanaan tegasnya dalam pemerintahan daerah tetapi pendekatannya tidaklah sepenuhnya sama dengan kebijaksanaan kabinet. Pada awal bulan Nopember 1953, ketika Darul Islam memasuki bulan berikutnya, terlihat tanda-tanda adanya perbedaan pendapat antara para penguasa pusat dan daerah dalam hal menyelesaikan pemberontakan. Kabinet berkeyakinan bahwa kebijaksanaannya dengan menggunakan tangan besi akan segera membawa hasil, sementara para penguasa daerah mendesak atasan mereka agar jangan terlalu berharap pada tindakan militer (Indonesia Raya, 12 Nopember 1953).

Penetapan kabinet terhadap penyelesaian politik tentu saja sejalan dengan kebijaksanaannya yang keras terhadap Darul Islam. Kabinet tidak setuju pada badan kontak pribadi. Hal ini disebabkan oleh keyakinannya bahwa pemberontakan akan segera berakhir. Prestasi militer yang berhasil kembali menguasai dua benteng Darul Islam yaitu Takengon dan Tangse, meyakinkan kabinet bahwa penyerahan pemberontakan hanya menunggu waktu saja. Penghapusan bantuan militer di Aceh timur pada awal Desember 1953 serta Aceh Barat dan Aceh Selatan dua minggu berikutnya, semakin memperteguh pendirian kabinet. Kabinet juga mengharapakan agar keberhasilan pemerintah memperoleh dukungan ulama Perti akan menjadi ukuran yang tidak memberikan pilihan lain kepada pemberontak selain menghentikan perlawanan mereka.

Di sisi lain Gubernur S.M. Amin dan Kolonel Simbolon berpendapat bahwa perlawanan Darul Islam tetap terus berlanjut. Oleh karena itu gubernur terus berusaha menjalin hubungan secara pribadi dengan pemimpin Darul Islam dengan harapan bahwa sikap Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo akan berubah bilamana upaya ini membawa hasil. Pada 5 Desember 1953 gubernur mengirimkan sepucuk surat kepada Daud Beureueh, Hasan Ali, Husen Al-Mujahid serta pemimpin Darul

Islam lainnya. Dalam surat tersebut gubernur meminta pendapat mereka mengenai kemungkinan penyelesaian secara damai (Gelanggang, 1956 : 126).

Menanggapi surat gubernur tersebut, Husen Al-Mujahid memberi tanggapan bahwa untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi antara pemerintah RI dengan rakyat Aceh masih memungkinkan asalkan kedua belah pihak benar-benar ingin memperlihatkan itikad baiknya (Gelanggang, 1956 : 131). Surat lain juga dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin Darul Islam pada 8 Maret dan 10 April 1954 melalui kurirnya, namun surat tersebut tidak sampai ke tangan mereka.

Meskipun menerima tanggapan positif dari Darul Islam, namun gubernur gagal meyakinkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijaksanaannya terhadap Aceh. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kembali memperjelas sikapnya bahwa ia melarang gubernur meneruskan hubungannya dengan Darul Islam, tetapi pemerintah tidak akan mengikat diri pada suatu persetujuan yang akan dicapai. Selain itu juga jawaban para pemimpin puncak Darul Islam tidak memuaskan Gubernur Amin. Dalam suratnya yang bertanggal 1 Juni 1954, Daud Beureueh dan Hasan Ali serta pemimpin lainnya bersepakat bahwa mereka juga mengisyaratkan pengakuan pemerintah akan fatwa bahwa Aceh sekarang merupakan Bagian Darul Islam Indonesia (Gelanggang, 1956 : 156).

Dengan jawaban itu, Gubernur S.M. Amin menganggap usahanya selama ini tidak ada artinya di mata Darul Islam sehingga ia merasa terhina. Akibatnya ia menulis surat lain dan memintakan kepada mereka untuk menyerah. Menanggapi surat tersebut para pemimpin Darul Islam menolak dengan penuh emosional. Hubungan surat-menyurat antara Gubernur S.M. Amin dengan Darul Islam berakhir dalam tahun 1954.

5.2.2 *Kabinet Burhanuddin Harahap*

Terbentuknya sebuah kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, telah memberikan warna tersendiri terhadap kehidupan politik pada tingkat Nasional.

Pertemuan antara Muhammad Hatta dengan kepala staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis telah menyetujui jalan perundingan untuk mengakhiri pemberontakan. Pertemuan itu telah memberikan dampak terhadap kebijaksanaan kabinet yang akan datang dalam hal penyelesaian keamanan (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 151).

Sebagai seorang demokrat, Muhammad Hatta mendukung rencana tersebut. Ia tidak percaya pada penggunaan kekerasan, bahwa ia sendiri pernah berusaha membujuk Daud Beureueh agar menangguk rencana untuk memberontak. Hal ini diketahui setelah hubungan antara pimpinan Aceh dan Karto Suwirybo bocor pada pertengahan tahun 1953. Namun demikian usaha dari Muhammad Hatta gagal karena Kabinet Ali Sastroamijoyo yang baru dibentuk itu ingin menangkap Daud Beureueh dan pemimpin-pemimpin Aceh lainnya. Pandangan Muhammad Hatta diperkuat lagi dengan peristiwa Pulot Cot Jeumpa. Ia berkeyakinan bahwa tidak ada jalan lain bagi penyelesaian masalah Aceh selain memberikan status provinsi dan membiarkan rakyat Aceh menyelesaikan masalah Aceh selain membiarkan rakyat Aceh menyelesaikan persoalan mereka sendiri.

Dua orang kurir, Hasballah Daud, putra Daud Beureueh dan Abdullah Arief ditunjuk untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin pemberontakan. Kedua kurir ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. (Gelanggang , 1956 : 171). Mereka mendapat sambutan baik dari Daud Beureueh. Dalam pembicaraan mereka ada dua hal yang diperbincangkan oleh Daud Beureueh kepada kedua orang kurir tersebut. Pertama, Daud Beureueh menegaskan penggantian Kabinet Ali Sastroamijoyo dengan kabinet yang berasal dari Masyumi tidak otomatis merubah keadaan, walaupun kabinet menawarkan amnesti umum. Kedua Darul Islam akan membantu partai-partai Islam dalam pemilihan umum yang akan datang dan memerintahkan kepada pengikutnya agar tidak mengganggu jalannya pemilihan umum (Maimul Fidar, 1990 : 48).

Pembicaraan itu memberikan harapan, dan pada akhir bulan September yakni sebulan setelah kurir kembali ke Jakarta, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap secara resmi memberitahukan

Gubernur S.M Amin dan Kolonel Simbolon tentang maksud pemerintah untuk berunding dengan Daud Beureueh.

Dengan cepat Gubernur S.M. Amin memberikan tanggapannya dan segera menyambung lagi korespondensi dengan pemimpin-pemimpin Darul Islam. Bahkan ia menawarkan suatu pembicaraan informal kepada Daud Beureueh. Beberapa dengan surat-surat sebelumnya, dalam suratnya kali ini gubernur menggambarkan dengan jelas bahwa tawaran telah diterima dan disetujui sepenuhnya oleh Perdana Menteri. Namun demikian karena kesulitan komunikasi, telah menyebabkan surat ini tidak sampai ke tangan pemimpin tertinggi Darul Islam. Sementara itu perdana menteri kembali mengirim Abdullah Arief untuk menjumpai Daud Beureueh. Dari pembicaraan yang berlangsung sejak 28 Oktober sampai 1 November memberikan tuntutan dan penawaran dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak setuju bahwa konflik harus diselesaikan dengan jalan perundingan yang akan didahului oleh suatu gencatan senjata. Darul Islam menolak sama sekali perundingan secara informal dan menuntut perundingan dilakukan secara terbuka (Hasan Saleh, Wawancara tanggal 12 Maret 1992).

Perdana Menteri menolak syarat perundingan yang dimintakan oleh Daud Beureueh, sebab hal itu berarti pengakuan de facto perdana menteri terhadap Darul Islam. Di sisi lain perdana menteri sangat berkepentingan terhadap Aceh, karena daerah ini merupakan daerah pemilihan paling banyak pendukung Masyumi. Dalam rangka pelaksanaan perundingan tersebut pemerintah sangat berhati-hati, sehingga memberi kesan bahwa pemerintah mencoba menunda langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Para pemimpin Darul Islam sangat kecewa terhadap pemerintah sehingga mereka meningkatkan lagi kampanyenya yang melawan pemerintah pusat, dengan melakukan serangan terhadap sasaran non militer. Darul Islam sekurang-kurangnya telah menghancurkan enam konvoi militer selama periode Agustus dan Desember 1955 yang mengambil korban dua puluh dua anggota Brimob dan tentara mati (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 155).

Peningkatan kegiatan Darul Islam telah menyusahkan penguasa setempat. Kepala Polisi Sumatera Utara Darwin Karim terpaksa mendesak pemerintah pusat agar menambah unit Brimob yang beroperasi di Aceh atau memberlakukan perbantuan militer. Kolonel Simbolon tidak pula lebih baik dari Darwin Karim, meskipun pada waktu itu terdapat lima Batalyon tentara yang telah ditempatkan di Aceh. Simbolon mengubah pandangannya terhadap pendekatan untuk memulihkan keamanan di daerah Aceh. Pada bulan Desember 1955 ia mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menghentikan bantuan militer dan memberlakukan keadaan darurat perang.

Melihat belum ada tanda-tanda berakhirnya gerakan Darul Islam sedangkan keinginan masyarakat sangat besar ke arah itu, akhirnya diadakan sebuah Kongres Mahasiswa, Pemuda, Pelajar dan Masyarakat Aceh se Indonesia di Medan yang dilaksanakan pada 15-19 September 1956. Peserta dalam kongres itu diwakili oleh berbagai organisasi baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh serta para ulama dan tokoh-tokoh terkemuka masyarakat seluruh Indonesia. Kongres ini dipimpin oleh sebuah presidium dengan ketua Teungku Abdul Sjam dan sekretaris Anis Idham (Hasjmy, 1984 : 61). Kongres mengambil beberapa keputusan dan resolusi serta berhasil merumuskan rencana pembangunan Aceh di segala bidang. Tidak lama setelah berlangsung kongres masyarakat ini, berlangsung pula reuni para perwira eks divisi Gajah I pada 9-12 Oktober 1956 di Yogyakarta. Dalam reuni ini diputuskan kesepakatan memulihkan keamanan dengan permusyawaratan, diantaranya adalah membebaskan kembali tanggung jawab keamanan kepada putera-putera Aceh dan membentuk suatu komando penyelesaian keamanan langsung di bawah Komando Staf Angkatan Darat (KSAD).

Setelah pemilihan umum dan Masyumi memperoleh dua pertiga suara di Aceh. Hal ini telah membuka peluang untuk menyetujui diakhirinya gerakan dengan menempuh jalan damai. Akhirnya pemerintah mengerti keinginan rakyat Aceh. Di bawah Kabinet Ali Sastroamijoyo II lahir sebuah Undang-Undang Nomor 24 tertanggal 24 November 1956 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Isi undang-undang ialah tentang pembentukan Provinsi Aceh. Sebagai gubernur ditetapkan Ali Hasymy dan di bidang

kemiliteran Sjamun Gaharu, mantan panglima Tentara Republik Indonesia Aceh selama revolusi.

Panglima Komando Militer Aceh Sjamun Gaharu mencetuskan konsepsi baru untuk menyelesaikan gerakan Darul Islam yang dinamakan Konsepsi Prinsipil Bijaksana. Adapun maksudnya, dengan tidak meninggalkan operasi-operasi militer, tetapi diusahakan suatu penyelesaian politis. Caranya ialah dengan melakukan kontak terhadap gerakan untuk mencari jalan ke luar yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan gerakan Darul Islam Aceh. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertumpahan darah yang berkepanjangan. Sesuai dengan kebijaksanaannya, Sjamun Gaharu beserta A. Hasjmy terus melakukan berbagai upaya.

Akhirnya pada pertengahan April 1957, di bulan puasa diadakan perundingan dengan sejumlah Pemimpin Darul Islam di Desa Lam Teh. Perundingan kemudian dikenal dengan "Ikrar Lam Teh. Ikrar Lam Teh memuat perjanjian bahwa masing-masing akan memajukan Islam dan mendorong kemakmuran serta keamanan bagi rakyat Aceh. Berdasarkan Ikrar Lam Teh inilah kedua belah pihak kemudian menghentikan tembak-menembak (gencatan senjata) yang waktu itu terkenal dengan cease-fire. Namun demikian Daud Beureueh sendiri belum bersedia kompromi karena masih berpegang pada prinsip ingin mengadakan perundingan antara negara Bagian Aceh (NBA) yang berdasarkan Islam dalam kerangka Republik Indonesia.

Setelah terjadinya Ikrar Lam Teh, pertempuran berhenti sama sekali, meskipun belum ada tanda-tanda bahwa gerakan Darul Islam akan berakhir Gencatan senjata ini berlangsung sampai tahun 1959.

5.2.3 Pelaksanaan Kebijakan di Aceh

Ikrar Lem Teh yang telah melahirkan gencatan senjata membuka kesempatan bagi anggota Darul Islam untuk kembali ke kampung halaman untuk melihat sanak keluarga yang sudah sekian lama mereka tinggalkan. Hal ini memungkinkan bagi Sjamun Gaharu untuk berbicara lebih banyak dengan para pemimpin Darul Islam (M.Nur El-Ibrahimi, 1982 : 163).

Sebagian besar pemimpin Darul Islam mulai menyadari perlunya menghindari terjadinya lebih banyak kehancuran di samping itu perlunya menghindari lebih banyak kehancuran. Di samping itu mereka pun merasa bosan telah berjuang bertahun-tahun di dalam hutan. Mereka memanfaatkan gencatan senjata ini untuk mendekati Sjamaun Gaharu. Dampak dari pertemuan mereka terlihat pada permulaan tahun 1959. Gejala-gejala perpecahan di kalangan Darul Islam mulai nampak. Secara umum mereka terbagi dalam tiga kelompok. Pertama kelompok Teungku Daud Beureuh yang para pengikutnya meliputi tokoh-tokoh berhaluan keras. Kedua, kelompok Ayah Gani, Hasan Saleh, Amir Husin, Al-mujahid, A. Gani Mutiara, Muhamad Amin, Ahmad Hasan, dan Ishak Amin. Ketiga, kelompok Hasan Ali dan sejumlah tokoh-tokoh perwira Tentara Islam Indonesia (TII) (Hasjmy, 1985 : 517).

Kemelut politik yang terjadi dalam kalangan Darul Islam mencapai puncak pada 15 Maret 1959 dengan keluarnya seruan Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura) yang menyatakan bahwa Kolonel TII Hasan Saleh sebagai menteri urusan perang telah mengambil alih pimpinan NBA baik sipil maupun militer dari tangan wali negara Teungku Muhammad Daud Beureuh. Dinyatakan pula bahwa ia telah dibebaskan dari jabatan sebagai wali negara dan panglima Tentara Islam Indonesia serta perubahan kabinet. Untuk menggantikan wali negara dan kabinet kemudian dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan Dewan Revolusi.

Dewan Revolusi dalam seruannya mengatakan, bahwa dewan bermaksud membawa rakyat Aceh ke satu tempat yang mulia dan bahagia. Seruan ini ditandatangani oleh Amir Husen Al-Mujahid. Pada 26 maret 1959 dikeluarkan pula komunike Nomor 2 dari Dewan Revolusi yang dinamakan Pernyataan Wali Negara NBA/NII. Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa Dewan Revolusi akan meneruskan permusyawaratan dengan Pemerintah RI serta akan menjadikan musyawarah itu sebagai prinsip, bukan taktik (M. Nur El-Ibrahimi, 1982 : 166)

Dengan lahirnya Dewan Revolusi, para penguasa daerah menyambut baik dewan tersebut. Sjamaun Gaharu sebagai penguasa

perang daerah dan Ali Hasjmi yang telah diangkat sebagai gubernur Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 mengumumkan sendiri pembentukan dewan tersebut kepada rakyat. Pada setiap kesempatan mereka juga memohon kepada rakyat memberi dukungan.

Daud Beureueh tidak memberikan reaksi sama sekali terhadap munculnya Dewan Revolusi, walaupun ia sangat terpengaruh oleh perkembangannya. Ia juga selalu menghindari pertumpahan darah di kalangan kedua pasukan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keyakinan yang berlebihan, bahwa ia akan mampu mengucilkan Dewan Revolusi melalui desakan terhadap seluruh ulama dan rakyat untuk menentanginya. Pernyataan tersebut bukan tidak beralasan, karena beberapa pimpinan seperti Salah Adri membelot kembali dan meninggalkan Dewan Revolusi, bahkan anak buahnya, Abdurrahman Hasjim, membentuk Operasi Badak Hitam untuk menghancurkan Dewan Revolusi. Namun demikian tindakan ini digagalkan sendiri oleh Daud Beureueh dengan menyita senjata mereka.

Dukungan Rakyat terhadap Dewan Revolusi semakin kuat. Hal ini telah mendorong Daud Beureueh untuk bekerjasama dengan pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dalam hubungan ini beberapa pimpinan PRRI termasuk Burhanuddin Harahap dan Dahlan Djambek telah datang ke Aceh untuk menjumpai Daud beureueh. Dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat membantu persenjataan kepada Negara Bagian Aceh (NBA).

Kerjasama antara PRRI dengan NBA bukan hanya dengan datangnya beberapa pimpinan teras PRRI ke Aceh, tetapi juga oleh pengangkatan beberapa tokoh PRRI sebagai penasihat kemiliteran NBA. Dengan dukungan tersebut NBA berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya dan siap untuk menghancurkan Dewan Revolusi (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 297). Kemampuan NBA untuk mempersiapkan diri dalam waktu singkat telah menimbulkan keresahan di kalangan Dewan Revolusi, karena NBA telah berhasil merusak rencana untuk merebut daerah-daerah di bawah pengaruh Daud Beureueh, kendatipun Sjamaun Gaharu dan A. Hasjmy sangat mendukung Dewan Revolusi. Propaganda NBA cukup berhasil

menarik kembali dukungan rakyat. Hal ini terbukti dengan berhasilnya satu resimen Dewan Revolusi di Aceh Besar berpihak kepada Daud Beureueh. Mereka menolak permintaan KDMA agar menangkap pimpinan-pimpinan NBA yang berkampanye menentang Dewan Revolusi.

Selain memberikan bantuan keuangan kepada Dewan Revolusi, Sjamaun Gaharu tidak dapat berbuat banyak menghadapi pengaruh Daud Beureueh yang sedang melakukan propagandanya. Di lain pihak Sjamaun Gaharu tidak mungkin melakukan operasi militer dalam menghancurkan Daud Beureueh, karena hal ini akan menghilangkan dukungan rakyat kepadanya. Dalam hal demikian ia meneruskan kebijaksanaan damainya, walaupun Daud Beureueh telah membatalkan gencatan senjata dan rakyat tetap percaya bahwa segala yang diberikan pemerintah selama ini berkat perjuangan yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Dalam keadaan demikian apabila melancarkan operasi militer tentu akan membahayakan seluruh program perdamaian, karena rakyat akan bersimpati terhadap Darul Islam dan membantu perjuangan mereka (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 298).

Kekhawatiran Sjamaun Gaharu tentang rencana perdamaian bukan tidak beralasan, karena pertentangan Dewan Revolusi sudah diketahui oleh umum. Operasi ini beralasan dari kelompok anti PUSA yaitu ulama Perti dan uleebalang, pada hal berasal dari badan pemerintah sendiri, yaitu yang dekat hubungannya dengan Masyumi dan Front Pemuda Aceh. Bahkan bagi mereka yang duduk dalam DPRD memanfaatkan badan perwakilan itu untuk melancarkan protes terhadap penguasa daerah. Mereka menolak penyelesaian melalui perundingan dengan Dewan Revolusi.

Oposisi lokal bukanlah satu-satunya hal yang harus dihadapi oleh penguasa penguasa daerah dan Dewan Revolusi, selain itu juga jalan ke arah perdamaian belum terlihat. Dewan Revolusi secara resmi telah berunding dengan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun demikian hal ini belum membawa hasil yang menggembirakan, sebab masih ada kabinet dan presiden yang harus diperhitungkan. Dalam pertemuan tak resmi Perdana Menteri Juanda dengan Ishak

Amin salah seorang tokoh Dewan Revolusi awal Mei 1959, pemerintah tidak mungkin memberikan status daerah istimewa kepada Aceh walaupun Kepala Staf Angkatan Darat telah menjanjikannya (Hasan Saleh, Wawancara tanggal 12 Maret 1992).

Lebih lanjut Perdana Menteri Juanda mengatakan bahwa tidak mungkin di negeri ini memiliki daerah istimewa selain Yogyakarta. Setelah Dewan Revolusi mengisyratkan bahwa Dewan Revolusi akan melanjutkan pemberontakannya, perdana menteri menjanjikan akan membicarakan dalam sidang kabinet. Sjamaun Gaharu dan Hasjmy mendapat kesempatan untuk mengikuti sidang tersebut dan menyampaikan pendapat mereka, bahwa pemberontakan akan berakhir atas dasar Ikrar Lam Teh. Hal ini berarti harus memberikan status daerah istimewa kepada Aceh.

Pernyataan ini mendapat dukungan penuh dari Nasution. Akhirnya kabinet menyetujui mengadakan perundingan resmi dengan Dewan Revolusi. Untuk melaksanakan maksud tersebut kabinet akan mengirimkan misi pemerintah di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Hardi ke Aceh (Hasjmy, 1969 : 16).

Dalam rangka pelaksanaan perundingan antara Dewan Revolusi dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 23 Mei 1959 rombongan Wakil Perdana Menteri Hardi atau dikenal dengan misi Hardi datang ke Kutaraja. Rombongan terdiri atas dua puluh sembilan orang anggota. Di antaranya adalah Menteri Negara Urusan Stabilitas Ekonomi dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mayor Gatot Subroto. Pada 26 Mei 1959 berlangsunglah musyawarah antara misi Hardi dengan Dewan Revolusi. Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam dipimpin oleh Teungku Abdul Gani Usman dan Hasan Saleh dengan anggota-anggotanya antara lain Teungku Amir Husin Al-Mujahid, Husin Yusuf, Teungku Muhammad Amin, A.G. Mutyara, Ishak Amin, dan lain-lain. Delegasi Penguasa Perang dan Pemda Aceh dipimpin Gubernur A. Hasjmy dengan anggota-anggotanya Letnan Kolonel Teuku Hamzah, Mayor Nyak Adam Kamil, Bupati Zaini Bakri, dan lain-lain.

Setelah beberapa hari bermusyawarah, pada 26 Mei 1959 Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam mengeluarkan sebuah pernyataan, bahwa

Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesiannya kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dengan alasan antara lain karena Republik Indonesia telah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Dewan Revolusi Darul Islam mengeluarkan pernyataan tersebut, Ketua Misi Hardi, wakil perdana menteri pertama, mengeluarkan keputusan pemerintah tentang perubahan status Provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh, yang keistimewaannya dalam hal pemberian hak-hak otonominya yang luas dalam bidang agama, pendidikan dan adat (A. Hasjmy, 1991 : 1070).

Langkah Hasan Saleh berunding dengan misi Hardi menyebabkan posisi NBA semakin melemah. Menurut Hasjmy, mereka masih dapat mengharapkan dukungan tiga puluh persen dari pengikut pertamanya (C. Van Dijk, 1983 : 318). Hal ini memberikan pilihan lain kepada NBA kecuali bekerjasama dengan PRRI. Hasil kerjasama itu adalah terbentuknya Republik Persatuan Islam (RPI) pada tanggal 8 Februari 1960. Hal ini juga mengakibatkan dibubarkan PRRI dan NBA.

Republik Persatuan Islam terdiri atas sepuluh negara bagian dan Aceh merupakan salah satu di antaranya yang dikenal dengan Republik Islam Aceh (RIA). Pembentukan RPI telah mengejutkan pemimpin KDMA. Hal ini berarti usaha mereka selama ini untuk mencegah adanya hubungan Aceh dengan gerakan-gerakan di luar Aceh telah gagal. Bahkan semakin menyulitkan mereka untuk menundukkan Daud Beureueh. Dalam hal ini beberapa perwira termasuk Kepala Staf KDMA Letnan Kolonel Teuku Hamzah yang menggantikan Sjamaun Gaharu cenderung untuk menuding kepala staf sebelumnya. Mereka menuduh Sjamaun Gaharu bersikap terlalu lunak terhadap Daud Beureueh (Sjamaun Gaharu, Wawancara 16 Agustus 1991).

Keadaan ini membuat Kolonel Teuku Hamzah melakukan operasi militer yang keras terhadap kaum pemberontak sekitar Kutaraja pada bulan Februari 1960 sehingga tamatlah riwayat Konsepsi Prinsipil Bijaksana Gaharu. Operasi ini di luar pengetahuan Gaharu, karena ia sedang berada di Jakarta.

Serangan terhadap beberapa posisi yang dikuasai oleh pemberontak dalam batas delapan kilometer dari Kutaradja sekaligus

membersihkan lapangan udara dari jangkauan mereka. Banyak rumah yang dilalap api selama operasi ini sehingga suasana tegang muncul kembali. Akibatnya ketika Sjamaun Gaharu tiba kembali dari Jakarta terjadi konflik terbuka dengan kepala staf. Hal ini telah membawa efek yang demikian jauh. Pukulan Teuku Hamzah terhadap pemberontak menandai berakhirnya usaha dari pemerintah seperti diperlihatkan oleh misi Hardi.

Kolonel Teuku Hamzah menyatakan kepada pemerintah pusat, bahwa Sjamaun Gaharu harus meninggalkan Aceh dan mengikuti kursus bagi perwira senior di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung, sementara Kolonel Teuku Hamzah tetap tinggal di Aceh sebagai pejabat panglima. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah pusat menyetujui tindakan Teuku Hanzah dan menyalahkan Sjamaun Gaharu tentang kegagalan programnya. Keputusan tersebut membawa amarah Sjamaun Gaharu, sehingga pada akhir Agustus 1960 mengenakan tahanan rumah terhadap Kolonel Teuku Hamzah.

Untuk menggantikan Sjamaun Gaharu sebagai panglima KDMA, Markas Besar Angkatan Darat mengangkat Kolonel Muhammad Yasin, seorang instruktur dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Yasin lahir di Sabang dari sebuah keluarga campuran. Ayahnya dari Jawa dan ibunya dari Tapanuli (Mahdi Nurdin, 1991 : 52). Ia meninggalkan Aceh ketika masih kecil dan berjuang di Jawa Timur, kemudian menikah dengan seorang wanita asal Jawa Tengah. Ia juga seorang perwira yang taat beragama dan dekat dengan rakyat Aceh.

Setelah menerima pimpinan komando dari Panglima Komando Antar daerah Sumatera Brigadir Jenderal Suprpto awal November 1960, Yasin berjanji akan menyelesaikan pemberontakan itu dalam waktu dua atau tiga tahun. Berbeda dengan Suprpto, Yasin tidak terpengaruh dengan kebijaksanaan Hamzah yang keras itu. Pendekatannya dalam pemulihan keamanan sejalan dengan kebijaksanaan Sjamaun Gaharu, bahkan lebih lunak dari perwira yang digantikannya itu.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, ia meneruskan pembangunan yang telah dibuat oleh Sjamaun Gaharu dan mengambil alih Konsepsi Prinsipal Bijaksana, walaupun tidak pernah disebut-sebutkan lagi sejak kepergian Sjamaun Gaharu, karena ia percaya kebijaksanaan ini tepat untuk Aceh. Yasin juga memegang teguh pendekatan bijaksana dari kebijaksanaan Sjamaun Gaharu. Oleh karena itu pendekatan pribadi sekali lagi ditawarkan kepada NBA, kendatipun operasi-operasi militer tetap dilakukan. Namun demikian tampak bahwa panglima ini tidak ingin memberi kesan ia datang ke Aceh untuk menaklukkan pemberontakan dengan jalan kekerasan, sebab operasi-operasi militer ini tidak saja berskala kecil melainkan juga dipimpin oleh Nyak Adam Kamil, kepala staf yang asli suku bangsa Aceh.

Yasin tidak percaya pada parade kekuatan dalam menyelesaikan masalah, sebab ia berprinsip penyelesaian pemberontakan memiliki dua segi yaitu lahir dan batin. Ia juga berkeyakinan bahwa jika diperlukan, pasukannya mampu menghancurkan kekuatan fisik Republik Islam Aceh (RIA) yang pada akhir tahun 1960 diperkirakan memiliki 2.500 pasukan, 1.500 senjata ringan, 52 senapan mesin, 12 bajoka, dan lima mortir (Nazaruddin Syamsuddin, 1990 : 323).

Namun demikian ia percaya bahwa menghancurkan secara fisik hanya akan menghasilkan keamanan lahir, sementara rakyat akan terasah karena keamanan batin tidak tercapai. Menurutnya, keadaan ini akan menimbulkan masalah selanjutnya pada masa yang akan datang. Yasin menghimbau para pemberontak untuk kembali dengan suka rela agar suatu pemulihan spiritual tercapai. Oleh karena itu ia menawarkan kepada pemimpin-pemimpin RIA untuk menerima amnesti umum yang ditawarkan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada hari kemerdekaan tahun 1960.

Di samping itu Panglima Yasin juga menyerukan kepada rakyat agar menghentikan segala bentuk bantuan kepada pemberontak. Seruan ini menimbulkan tekanan bagi rakyat untuk memberhentikan bantuannya kepada RIA, tetapi hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan, sebab hanya sejumlah kecil anggota TII yang melaporkan diri kepada pemerintah. Hal ini disebabkan kesetiaan terhadap Daud

Beureueh yang luar biasa, sementara itu Daud Beureueh mengabaikan ancaman yang datang dari Jakarta dan Kutaraja bahwa amnesti hanya berlaku bagi mereka yang menyerah sebelum tanggal 5 Oktober 1961.

Dalam menghadapi hal tersebut, Panglima Yasin terus meningkatkan pendekatan pribadinya. Selama bulan April sampai Juni 1961 ia sudah mengunjungi hampir semua sudut Aceh, termasuk beberapa Kecamatan yang terpencil. Hubungan dengan pemimpin-pemimpin juga lebih ditingkatkan, bahkan menjangkau beberapa kabupaten seperti Aceh Utara dan Aceh Barat (Nazaruddin Syamsuddin, 1990 : 324).

Dalam usahanya mengadakan hubungan dengan Daud Beureueh yang masih tetap berpegang teguh pada pendiriannya, Yasin menempuh cara melalui surat menyurat. Dalam surat pertamanya bulan maret 1961 yang ditulis dalam bahasa yang cukup halus dan sapaan ayahanda Yasin memohon kepada Daud Beureueh agar Daud Beureueh bersedia kembali di tengah-tengah rakyat Aceh. Untuk mendapat jawaban yang baik, Yasin menawarkan Daud Beureueh untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Surat Yasin mendapat sambutan hangat dari Daud Beureueh, namun ia mengecam sikap Yasin yang mencoba mempengaruhi pengikutnya di beberapa daerah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan maksud baik Yasin.

Sebagai balasan surat Yasin, pada awal Agustus 1961 Daud Beureueh mengutus A.R. Masjim untuk menghadap Yasin di Kutaraja. Pertemuan tersebut menghasilkan penyelesaian masalah Aceh dengan cara musyawarah (Mahdi Nurdin, 1991 : 53). Selain itu Yasin juga sangat berkeinginan untuk bertemu dengan Daud Beureueh secara pribadi. Hubungan ini juga disimbolkan dengan pengiriman bingkisan dari sang kolonel kepada Daud Beureueh beserta keluarganya (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 325).

Lunaknya sikap Daud Beureueh dalam menerima kemauan baik Yasin disebabkan telah kehilangan sebagian besar daya tarik penduduk terhadap perjuangan mereka. Lebih-lebih setelah pemerintah pusat secara bertahap mengembalikan simbol-simbol Aceh dalam bidang administratif, militer, dan keagamaan. Kurangnya dukungan rakyat menimbulkan masalah moral di kalangan pasukan

pemberontak, yaitu tatkala mereka menyadari bahwa perjuangan mereka tidak lagi demi kepentingan rakyat.

Di samping itu rakyat yang sudah berubah pendirian dengan beralih mendukung kebijaksanaan pemerintah pusat merupakan penyebab pokok hancurnya gerakan-gerakan pemberontak. Pada tingkat Nasional, perubahan itu didorong oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi setelah dikeluarkan Dekrit Presiden Soekarno kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45, sementara oposisi terhadap Soekarno tidak mencapai tingkat seperti yang diharapkan agar konsentrasi kekuasaan ditengah Soekarno dapat mengakhiri krisis politik yang kronis.

Banyak orang tertarik pada pemberlakuan kembali UUD 1945 dan kembalinya Soekarno dalam kekuasaan eksekutif, dengan menghidupkan kembali semangat revolusioner. Di tingkat daerah kekecewaan terhadap pemerintah pusatpun mulai berkurang. Hal ini disebabkan para pemimpin di daerah sudah diberi kebebasan untuk mengatur daerah mereka sendiri (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990:327)

Demikian juga halnya di Aceh, dukungan rakyat terhadap RIA beralih kepada pemerintah, karena pemerintah berhasil mengadakan slogan-slogan politiknya. Peralihan ini juga disebabkan oleh dua faktor. Pertama, propaganda pemerintah yang meningkatkan harapan terhadap masyarakat adil dan makmur telah merasuk ke dalam hati rakyat Aceh terutama melalui pendirian sekolah-sekolah . Kedua, rakyat juga tersentuh oleh slogan-slogan pemerintah tentang pembangunan. Rakyat dapat menyaksikan bahwa sejumlah pembangunan sedang berlangsung meskipun dana pemerintah sangat terbatas.

Di samping itu, bersamaan dengan pembentukan kembali Provinsi Aceh, pembentukan Komando Militer dan pemberian status daerah istimewa serta pembangunan yang luar biasa di bidang pendidikan, telah mengubah sikap rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat dan Darul Islam. Di sisi lain di kalangan Darul Islam makin lama semakin terisolasi karena kegagalan mengatasi operasi-operasi militer pemerintah dengan memotong garis logistik mereka. Peningkatan kemampuan angkatan darat dalam arti peralatan dan organisasi serta memperbesar jumlah angkatan laut & udara, menyebabkan pemerintah

mau melakukan operasi-operasi militer terhadap RRI secara lebih efektif (Hasan Saleh, wawancara 12 Maret 1992).

Kelumpuhan kekuatan RIA juga disebabkan oleh kondisi psikologis, yaitu pemerintah berusaha menempatkan sebanyak-banyaknya tentara dan polisi di Aceh dari suku bangsa Aceh sendiri. Dengan demikian melawan pemerintah berarti melawan saudara dan kawannya sendiri.

Sentimen psikologis ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Yasin dengan melakukan operasi-operasi militer yang dipimpin oleh Nyak Adam Kamil. Pada dasarnya operasi ini bukan bertujuan untuk membunuh, melainkan memaksa pemberontak meninggalkan perjuangan mereka. Dalam keadaan demikian, tidak ada pilihan lain bagi TII selain menghindari pertempuran.

Hal ini mengakibatkan banyak di antara mereka secara diam-diam kembali ke kampung dan yang tetap tinggal di dalam pasukan, memindahkan pasukan mereka ke tempat terpencil sehingga terputus hubungan dengan markas besar mereka. Dalam bulan April 1961 komunikasi antara Daud Beureueh dengan resimen-resimennya praktis terputus. Dimarkasnya hanya di tempat oleh beberapa orang perwira stafnya saja, di antaranya Abdurahman Hasjim, Ilyas Leube dan Haji Hasanuddin (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990).

Meskipun pada 17 Agustus 1961 Panglima Yasin menyatakan bahwa pemberontakan sudah berakhir, namun kenyataannya banyak para pemberontak yang tidak bersedia untuk menyerah. Daud Beureueh sendiri menolak sama sekali ajakan tersebut. Kecuali bila pemerintah pusat menerima beberapa persyaratan yang memberlakukan syariat Islam di Aceh.

Sementara itu di kalangan Perti dan uleebalang menentang kebijaksanaan Yasin yang telah mengumumkan perdamaian fisik pada bulan Agustus itu. Mereka mendapat dukungan dari cabang PNI dan PKI setempat. Mereka juga menolak pemberian amnesti umum kepada pemberontak, karena apa yang telah dilakukan oleh para pemberontak dan para pengikutnya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Menghadapi hal tersebut, Yasin bertindak cepat untuk menghapus rintangan ini. Yakin akan kesetiaan pemimpin pemberontak terhadap

pemimpin tertinggi mereka, Yasin pun menjadi lebih lunak sikapnya terhadap Daud Beureueh. Para pemimpin PRRI yang telah menyerah diminta untuk membujuk Daud Beureueh agar melakukan hal yang sama. Karena tidak terlihat hasil upaya ini hingga awal bulan Oktober, Yasin kemudian mengutus sebuah delegasi yang terdiri atas dua puluh delapan orang tokoh termasuk beberapa orang bupati, ulama serta wakil-wakil tentara dan polisi untuk mengunjungi Daud Beureueh di Aceh Timur. Muzakkir Walad sebagai juru bicara delegasi, memohon kepada Daud Beureueh supaya kembali untuk memimpin rakyat Aceh lagi. Di lain pihak Yasin menyembunyikan ancamannya terhadap unsur-unsur uleebalang Perti yang sedang gelisah itu. Pada 17 Oktober ia mengumumkan, bahwa ia tidak akan segan-segan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap suatu usaha yang mengganggu penyelesaian damai (Nazaruddin Sjamsuddin, 1990 : 332).

Akibatnya pada bulan Oktober banyak pemimpin pemberontak yang melaporkan diri termasuk Abdurahman Hasjim dan Hasan Ali yang telah diizinkan Yasin kembali ke Aceh dari Malaya (Malaysia). Namun demikian Daud Beureueh yang ditemani oleh Ilyas Leube, Haji Hasanuddin, dan beberapa staf lainnya lebih suka tinggal di hutan rimba Aceh Timur. Tentu saja Yasin tidak senang akan hal ini. Oleh karena itu, pada 2 November Yasin mengunjungi Daud Beureueh dan berbicara dari hati ke hati dengannya selama dua setengah jam. Tidak diperoleh informasi mengenai masalah yang dibicarakan dua pimpinan itu, tetapi dari usaha-usaha Yasin selanjutnya kita ketahuai bahwa ia menerima persyaratan Daud Beureueh. Pada 7 April 1962, dengan mendapat dukungan penuh dari DPRD dan beberapa jenderal di ibukota, Yasin menyatakan berlakunya syariat Islam di Aceh.

Sebuah kediaman, meluncurlah sebuah konvoi mobil dan bus para pemimpin masyarakat dan pemerintah untuk menemui Daud Beureueh di Aceh Timur dan membawanya kembali ke Kutaraja. Pada 8 Mei, setelah bersembahyang di Mesjid Kutaraja, untuk pertama kali dilakukan setelah sejak awal tahun 1950-an meninggalkan Kutaraja, dengan singkat Daud Beureueh mengatakan bahwa, atas perintah rakyat, ia kembali kepada rakyat. Ini berarti juga bahwa tidak ada lagi di antara sesama mereka, sesama bangsa yang saling bermusuhan. Ia menyatakan bahwa permusuhan sesama mereka telah berlangsung

selama delapan tahun, sepuluh bulan dan dua puluh tujuh hari. Dengan demikian penyelesaian spiritual telah tercapai dan bekas wali negara itu pun kembali ke kampungnya. Ia menolak untuk tinggal di sebuah rumah yang diberi oleh Yasin di Kutarja (Dua Windu, 1972 : 250).

BAB VI

EPILOG

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh di anggap berakhir setelah pimpinan dan para pengikutnya turun dari gunung, kembali dan diterima dalam masyarakat. Mereka yang kembali itu oleh pemerintah diampunkan dengan amnesti umum yang dikeluarkan oleh pemerintah (Sinar Darussalam No. 130 : 1070).

Dengan selesainya pemberontak itu, pemerintah berusaha membangun kembali Aceh yang selama pemberontakan DI/TII mengalami kehancuran di segala bidang. Untuk maksud tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mengadakan suatu musyawarah di Banda Aceh pada 19 sampai 23 Desember 1961. Musyawarah itu dihadiri oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Wakil Ketua DPRDGR Daerah Istimewa Aceh, anggota-anggota BPH, walikota / bupati-bupati dalam Daerah Istimewa Aceh, sekretaris gubernur dan sekretaris daerah, kepala-kepala bagian pada bagian pada kantor gubernur

Mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam musyawarah itu, Khusus tentang tiga bidang keistimewaan Aceh, T. Alibsyah Talsya,-; 52-53; menyebutkan sebagai berikut :

Sebagai usaha pokok dalam pembangunan adalah mengusahakan supaya realisasi otonomi yang seluas-seluasnya, terutama dalam

lapangan pendidikan agama dan peradaban dapat dilaksanakan secepat-cepatnya (Bab II pasal 5 ayat b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, tanggal 17 Januari 1962. No. 19/1962 tentang Aceh membangun. Mengenai pembangunan dalam bidang mental/kerohanian ditetapkan, bahwa dasar dan tujuan pembangunan dalam bidang tersebut diarahkan untuk menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila, berkebudayaan, berpengetahuan luas, berbudi luhur, cinta kepada ilmu dan amal serta cinta kepada agama.

Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang mengadakan musyawarah tersebut menyadari bahwa kebijaksanaan yang diambil untuk membangun Aceh dan penyempurnaan pemulihan keamanan perlu memperhatikan faktor-faktor psikologi masyarakat. Oleh karena itu musyawarah mengeluarkan sebuah resolusi pada 23 Desember 1961 yang ditunjukkan kepada pemerintah pusat. Resolusi itu meminta agar ide yang terkandung dalam surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya dalam bidang agama, adat dan pendidikan, kepada Daerah Istimewa Aceh, hendaknya diatur dalam bentuk undang-undang atau penetapan presiden.

6.1 Bidang Pendidikan

Kebijaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Aceh pasca Darul Islam dimulai dengan rapat pada 1 Februari 1958, di Aula Penguasa Perang Daerah Aceh. Rapat yang berlangsung di bawah pimpinan Ketua Penguasa Perang Kolonel Syamaun Gaharu, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Aceh, dihadiri para staf Peperda Aceh dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Rapat itu membicarakan tentang kebijaksanaan pembangunan pendidikan di Aceh. Rapat berhasil menetapkan prioritas-prioritas pembangunan di bidang tersebut.

Prioritas-prioritas itu perlu disusun mengingat keadaan sumber dana yang amat terbatas, sementara masalah yang dihadapi di bidang pendidikan pada pasca Darul Islam begitu banyak yang harus dibangun. Prioritas yang ditetapkan ialah bahwa pertama-tama yang harus dijalankan ialah pembangunan "kota pelajar-mahasiswa" sebagai pusat lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini diikuti oleh

pembangunan perkampungan pelajar di semua ibukota kabupaten dan taman-taman pelajar di ibukota kecamatan (10 Tahun, 1969 : 88 - 89).

Pembangunan di bidang pendidikan, sebagai salah satu unsur keistimewaan Aceh, segera ditetapkan kebijaksanaan. Dalam penetapan itu antara lain yang paling menonjol adalah pembangunan kota pelajar-mahasiswa Darussalam. Di dalam kota pelajar-mahasiswa itu, dibangun berbagai fakultas eksakta dan fakultas sosial budaya, di samping menyempurnakan Fakultas Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Pusat-pusat pendidikan ini meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, dan kejuruan.

Sebagai contoh pembangunan pusat pendidikan pada tingkat II yang cukup berhasil ialah Kota Pelajar Tijue di Kabupaten Pidie. Berhubung pada masa itu sangat dirasakan kekurangan tenaga guru agama, maka dalam pembangunan pendidikan diusahakan untuk mendidik guru-guru agama untuk sekolah dasar, lanjutan dan atas. Di samping itu, peralatan pendidikan agama dilengkapi dan membantu swadaya masyarakat dalam pembangunan gedung-gedung pendidikan agama.

Berdasarkan hasil rapat yang telah disebut terdahulu, keputusan-keputusan itu kemudian disempurnakan dan diperluas serta di tuangkan ke dalam Anggaran Dasar Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh. Yayasan ini dibentuk pada 26 Maret 1958. Ide Pendiriannya adalah didorong oleh kesadaran para pemimpin di Aceh yang melihat kehancuran masyarakat akibat pemberontakan dan berusaha untuk memajukan kembali masyarakat Aceh.

Yayasan dan Kesejahteraan berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh dengan berazaskan bahwa untuk kepentingan pembangunan daerah didasarkan pada kemampuan masyarakat sendiri. Langkah pertama yang dijalankan yayasan ini ialah dengan mendirikan perkampungan pelajar/mahasiswa di ibukota propinsi dan mengusahakan berdirinya sebuah universitas di daerah ini. Langkah berikutnya dari yayasan ini ialah melakukan juga kegiatan-kegiatan dibidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dan lain-lain yang sesuai dengan tujuan pendirian yayasan.

Yayasan ini diketuai oleh Muhammad Husin, dilengkapi oleh pengurus-pengurus lainnya. Sementara itu juga dibentuk sebuah Dewan Pengawas yang bertugas untuk mengawasi yayasan tersebut. diketuai oleh T. Hamzah Bendahara (10 Tahun, 1969 : 90 _ 91).

Mata pelajar Bahasa Aceh ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran pada sekolah Dasar. Mata pelajaran Agama dijadikan mata pelajaran wajib, baik di sekolah Dasar maupun ditingkat lanjut.

Suatu hal yang cukup menarik dalam penetapan itu antara lain yang paling menonjol adalah pembangunan kota pelajar-mahasiswa Darussalam. Di dalam kota pelajar-mahasiswa itu, dibangun berbagai fakultas sosial budaya, di samping menyempurnakan Fakultas Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri. Pusat-pusat pendidikan ini meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, dan kejuruan.

Sebagai contoh pembangunan pusat pendidikan pada tingkat II yang cukup berhasil ialah Kota Pelajar Tinjue di Kabupaten Pidie. Berhubung pada masa itu sangat dirasakan kekurangan kekurangan tenaga guru agama, maka dalam pembangunan pendidikan diusahakan untuk mendidik guru-guru untuk sekolah dasar, lanjutan, dan atas. Di samping itu, peralatan pendidikan agama dilengkapi dan membantu swadaya masyarakat dalam pembangunan gedung-gedung pendidikan agama.

Berdasarkan hasil rapat yang telah disebut terdahulu, keputusan-keputusan itu kemudian disempurnakan dan diperluas serta dituangkan ke dalam Anggaran Dasar Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh. Yayasan ini dibentuk 28 Matet 1958. Ide pendiriannya adalah didorong oleh kesadaran para pemimpin di Aceh yang melihat kehancuran masyarakat akibat pemberontakan dan berusaha untuk memajukan kembali masyarakat Aceh.

Yayasan Dana Kesejahteraan berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh dengan berazaskan bahwa untuk kepentingan pembangunan daerah didasarkan pada kemampuan masyarakat sendiri. Langkah pertama yang dijalankan yayasan ini ialah dengan mendirikan perkembangan pelajar/mahasiswa di ibukota provinsi dan mengusahakan berdirinya sebuah universitas di daerah ini. Langkah berikutnya dari yayasan ini ialah melakukan juga kegiatan-kegiatan di

bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, dan lain-lain yang sesuai dengan tujuan pendirian yayasan.

Yayasan ini diketahui oleh Muhammad Husin, dilengkapi oleh pengurus-pengurus lainnya. Sementara itu juga dibentuk sebuah Dewan Pengawasan yang bertugas untuk mengawasi yayasan tersebut. Dewan Pengawasan tersebut diketuai oleh T. Hamzah Bendahara (10 Tahun, 1969 : 90 - 19).

Mata pelajaran Bahasa Aceh ditetapkan sebagai salah satu mata pelajaran pada sekolah Dasar. Mata pelajaran Agama dijadikan mata pelajaran wajib, baik di Sekolah Dasar maupun tingkat lanjutan.

Suatu hal yang cukup menarik dalam pembangunan pendidikan ialah usaha perbaikan mutu pendidikan, baik untuk pendidikan agama maupun pendidikan umum (Aceh Membangun : 26).

Kepada sejumlah Pemuda Aceh oleh pemerintah daerah diberikan beasiswa untuk belajar pada berbagai sekolah menengah umum/kejuruan, akademi dan fakultas di luar Aceh (Aceh Membangun, 52). Pemberian beasiswa dan tugas belajar dengan ikatan dinas dimaksudkan untuk membentuk kader-kader pembangunan di Aceh.

Di samping pengiriman para pemuda Aceh untuk belajar di luar daerah, di Aceh juga diadakan berbagai kursus sebagai latihan pegawai agar mereka cakap dalam menjalankan fungsinya.

Selama tahun 1962 diadakan penambahan gedung-gedung sekolah yang semi permanen. Gedung-gedung sekolah yang diprioritaskan adalah tingkatan Sekolah Dasar yang realisasinya didahulukan.

Pembangunan di bidang pendidikan juga termasuk usaha pemerintah daerah dalam pemberantasan buta huruf. Usaha ini berjalan lancar dan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dalam peringatan Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh yang kedua, pemerintah daerah telah mengeluarkan suatu pernyataan (2 September 1962 No. 5543/12) bahwa jihad terhadap buta huruf dalam lingkungan Daerah Istimewa Aceh telah dapat diberantas seluruhnya pada akhir tahun 1963. Selanjutnya dalam peringatan hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, yang ketiga, Daerah Istimewa Aceh telah dinyatakan bebas dari buta huruf (Memoir, 1964 : 108).

Setelah mengusahakan pemberantasan buta huruf di Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya pemerintah daerah membentuk Komando Operasi Gerakan Kecerdasan Rakyat Daerah Istimewa Aceh pada 2 September 1963. Komando ini bertujuan :

- (1) Menggerakkan dan memelihara kegiatan pembacaan dan penulisan sebagai *follow up* pemberantasan buta huruf.
- (2) Mengembangkan dan memperbanyak bacaan-bacaan, tulisan-tulisan dan siaran-siaran lisan yang berguna.
- (3) Menggiatkan dan menuntun pertumbuhan perpustakaan dan taman bacaan rakyat.
- (4) Meninggikan dan membimbing kecerdasan dan cara berpikir rakyat pada berbagai keadaan dan tempat.
- (5) Mengkhususkan penyelenggaraan kewajiban daerah belajar.

Pembangunan di bidang pendidikan juga dengan mengikutsertakan bidang kebudayaan. Pertentangan politik sebagai akibat munculnya pemberontakan Darul Islam untuk sementara telah menghentikan kegiatan di lapangan kebudayaan. Pada 6 September 1957 dibentuklah organisasi Lembaga Kebudayaan Aceh yang berpusat di Banda Aceh dalam arti yang seluas-luasnya, mencari, meneliti serta mempelajari warisan kebudayaan Aceh dalam usaha memelihara, mempertinggi kebudayaan nasional.

Wujud nyata dari usaha ini ialah diadakan pekan kebudayaan Aceh yang pertama pada 12-23 Agustus 1958. Dalam pekan kebudayaan ini dipertunjukkan antara lain seni drama, sejarah Aceh, seni tari, dan jenis-jenis permainan rakyat seperti ratoh/duék, tari phodabus/rapi, didong, ale tunjang, dan lain-lain. Disamping itu diadakan pula pertunjukan yang terdiri atas pameran pakaian-pakaian penggantian, hidangan dan makan-makan asli, barang-barang kuno, dan perhiasan-perhiasan.

Puncak acara pekan kebudayaan ini ialah diadakannya suatu pawai besar yang dinamakan pawai kebudayaan. Dalam pekan kebudayaan itu juga diadakan diskusi kebudayaan yang pertama Sejarah Aceh, Kesenian Aceh, Bahasa dan Kesusastraan Aceh, dan Hukum Adat serta Adat Istiadat Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh telah menumbuhkan

bibit-bibit penggalian budaya dan meninggalkan kesan yang sangat baik.

Pekan Kebudayaan Aceh yang pertama ini juga mendapat sambutan dari Menteri P dan K Prof. Prijono. Selain itu acara-acara dalam pekan kebudayaan itu disaksikan pula oleh beberapa menteri dan pembesar dari pusat. Untuk memupuk dan mengembangkan kebudayaan Aceh, dalam rangka pekan kebudayaan I, Menteri dan K telah berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Taman Sari, sebagai "Taman Kebudayaan Aceh".

Tahun 1958 adalah sebagai tahun penggalian dan pertumbuhan kembali bibit-bibit kebudayaan Aceh. Pertumbuhan ini bertambah subur dengan adanya Konferensi Lembaga Kebudayaan Aceh pada 12 Agustus 1958.

Khusus mengenai pembangunan pendidikan tinggi yang dipusatkan di Kota Pelajar-Mahasiswa Darussalam, usaha itu berhasil mewujudkan dua lembaga pendidikan tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jami'ah Ar-Raniry.

Upacara pembukaan Kota Pelajar-Mahasiswa Darussalam dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 2 September 1959. Selanjutnya tanggal tersebut secara resmi dinyatakan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam rangka Tri Karya Bakti di Darussalam dibentuk suatu badan yang diberi nama Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh pada 26 Maret 1956. Yayasan tersebut memusatkan perhatiannya pada pembangunan yang bersifat mental dan phisik. Untuk mencapai maksud tersebut, yayasan ini merealisasikan pembangunan Kota Pelajar-Mahasiswa Darussalam yang di dalamnya berada Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry.

Untuk kelancaran tugas-tugas itu dibentuk pula Komisi Pencipta Kota Pelajar-Mahasiswa Darussalam. Upacara peletakan batu pertama pembangunan Kota Pelajar-Mahasiswa Darussalam berlangsung pada 17 Agustus 1958. Seminggu kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meletakkan batu pertama pembangunan gedung pertama. Pembukaan secara resmi Kota Pelajar-Mahasiswa tersebut diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959.

6.1.1 *Universitas Syiah Kuala*

Cikal-bakal lahirnya Unipersitas Syiah Kuala dimulai dengan pendirian Fakultas Ekonomi. Untuk pelaksanaan tugas tersebut pada 3 Mei 1958 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ekonomi. Panitia ini dilantik oleh Menteri P dan K Prof. Prijono pada 24 Agustus 1958. Fakultas Ekonomi di Banda Aceh secara resmi dibuka pada 1 September 1959 sebagai bagian dari Universitas Sumatera utara. Doktor T. Iskandar diangkat sebagai pejabat dekan Fakultas Ekonomi tersebut.

Setelah Fakultas Ekonomi kemudian dibuka Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu peternakan secara resmi pada 17 Oktober 1960. Selanjutnya fakultas yang dibuka adalah Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada 2 September 1961. Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan secara resmi didirikan pada 2 Setember 1961, bertepatan pula dengan peresmian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Setelah Pendirian fakultas-fakultas tersebut kegiatan selanjutnya adalah usaha pembukaan Fakultas Teknik dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pendirian Fakultas Teknik dimulai dengan pembentukan panitia pendiriannya pada tahun 1963. Pada tahun itu juga fakultas ini mulai menerima mahasiswa. Pembukaan fakuktas itu secara resmi dilaksanakan pada 2 september 1963. Adapun Fakultas Pertanian dibuka secara resmi setahun kemudian yaitu pada 16 Nopember 1964.

6.2.2 *IAIN Jama'ah Ar-Raniry*

Lahirnya Institut Agama Islam Negara Jami'ah Ar-Raniary Sebagai lembaga pendidikan tinggi agama Islam di Aceh merupakan hasil kebulatan tekad pemerintah dan rakyat Aceh. Tekad ini didasarkan kepada cita-cita yang telah dikandung sejak lama. Diwujudkan pembukaan IAIN tersebut bersamaan dengan perwujudan pendidikan Universitas Syiah Kuala.

Sejarah pendidikan IAIN Jami'ah Ar-Raniry dimulai sejak 2 September 1959 ketika A. Hasjmy disaksikan Menteri Agama di Banda Aceh meminta kepada Presiden Soekarno agar disetujui pendirian sebuah perguruan tinggi Islam di Aceh. Pembicara tersebut dilanjutkan

dengan perundingan-perundingan lanjutan di Jakarta, yang menghasilkan suatu persetujuan. Setahun kemudian disetujui pembukaan sebuah Fakultas Agama Islam di Aceh (25 tahun, 1988 : 3).

Untuk mewujudkan usaha tersebut, pada mulanya pemerintah telah mempersiapkan rencana pembukaan sebuah Fakultas Agama Islam di Aceh dengan penetapan yang dikeluarkan Menteri Agama RI No. 48 tahun 1959. Ketetapan tersebut menetapkan sebuah Panitia Pendewaan Fakultas Agama Islam Negeri yang diketuai Syamaun Gaharu (15 Tahun, 1978, hlm. 40).

Sebagai hasil kerja panitia tersebut ialah dibukanya Fakultas Syari'ah IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cabang Kutaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960 dan peresmiannya dilakukan oleh Presiden IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta Prof. Mr.R.H.A Sunarjo, mewakili menteri agama pada 2 September 1960, bertepatan dengan Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh dan sekaligus ditunjuk Prof. T.M. Hasby Ash. Shiddieqy sebagai dekan yang juga merangkap dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta dan H. Usman Yahya Tiba L.T. sebagai sekretaris fakultas.

Hasil yang dicapai oleh panitia pendirian Fakultas Agama Islam Negeri tersebut bukanlah fakultas yang bernama Fakultas Agama Islam Negeri, tetapi lebih khusus lagi yaitu Fakultas Syari'ah sebagai Cabang IAIN Yogyakarta yang baru diresmikan sepuluh hari sebelumnya sesuai dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 jo Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1960 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963.

Karena Prof. T.M Hasbi Ash-Siddieqy yang memimpin dua fakultas (di Kutaraja dan di Yogyakarta) banyak mengalami kesulitan, maka Drs. H.Ismuha, asistennya, diusulkan sebagai dekan Fakultas Syari'ah di Kutaraja. Dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 12 Desember 1962 Nomor B/IV.IF/7667, maka sejak 13 Desember 1962 Drs. H. Ismuha diangkat menjadi Fakultas Syari'ah Kutaraja yang pelantikannya dilaksanakan 15 Desember 1966.

Bersama dengan itu diresmikan pula berdirinya Fakultas Tarbiyah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 27 tahun 1962. Ibrahim Husein, M.A. ditetapkan sebagai dekan pertama fakultas tersebut. Dalam kesempatan itu telah dilantik pula Panitia Persiapan Pembukaan IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1962 tanggal 17 Desember 1962. Panitia terdiri atas tiga orang penasehat seorang ketua enam orang wakil ketua, dua orang sekretaris, dan 17 orang anggota.

Setelah IAIN Jakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri sejak bulan Maret 1963 dengan rektornya Prof. Drs. Sunarjo, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah Kutaraja berada di bawah IAIN Jakarta.

Untuk dapat didirikan sebuah IAIN yang berdiri sendiri di Darussalam Banda Aceh, Gubernur Aceh A. Hasjmy bersama Drs. H. Ismuha telah meminta kepada Menteri Agama K.H. Saefudin Zuhry agar realisasinya dapat dilakukan dalam tahun 1963. Namun demikian untuk merealisasi permintaan tersebut masih diperlukan adanya sebuah Fakultas lagi sebagai salah satu syarat pendirian sebuah IAIN.

Hal ini tidak menimbulkan kesulitan, karena di Daarussalam telah ada Fakultas Ushuluddin yang masih berstatus swasta yang kemudian dinegerikan pada 5 Oktober 1963. Dengan demikian 5 Oktober 1963 Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhry meresmikan berdirinya IAIN ketiga di Indonesia dengan nama IAIN Jami'ah Ar-Raniry sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1963, sekaligus melantik Gubernur A. Hasjmy sebagai pejabat rektor pertama.

6.2 Bidang Pemerintah

Pembangunan bidang pemerintah adalah salah satu aspek yang diprioritaskan di Aceh masa pasca DI/TII Pembangunan dibidang ini antara lain terlihat dari usaha pemerintah dalam penyempurnaan penyelenggaraan urusan-urusan tertentu yang secara jelas telah di limpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Setelah itu, urusan-urusan itu oleh pemerintah daerah tingkat I juga diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I juga diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II.

Urusan-urusan yang diserahkan itu, di samping hak berumah tangga sendiri, juga meliputi bidang-bidang :

- (1) Bidang Departemen Agama, yang mencakup urusan agama, inspeksi pendidikan agama, penerangan agama dan peradilan/pengadilan agama.
- (2) Bidang Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan kebudayaan mencakup urusan-urusan sekolah taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lajutan Atas, Sekolah Kejuruan Pertama dan Atas, Kebudayaan, Kesenian, Keperbukalaan, dan pendidikan masyarakat.
- (3) Bidang Departemen Dalam Negeri, hanya satu urusan yaitu pemerintahan umum.
- (4) Bidang Departemen Perdagangan, mencakup dua urusan, yaitu pertama, inspeksi perdagangan dalam negeri, dan yang kedua yaitu kebijaksanaan impor-ekspor dan perdagangan antarpulau.
- (5) Bidang Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat, mencakup urusan-urusan seperti transmigrasi dan transmigrasi lokal dan transmigrasi antardaerah, koperasi, pembangunan masyarakat desa dan jawatan pembukaan tanah.
- (6) Bidang Departemen Perhubungan Laut, yaitu tentang pelabuhan kecil dan inspeksi pelayanan ekonomi.
- (7) Bidang Departemen Agraria, sebagian tugas diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (8) Bidang Departemen Perhubungan Darat, mencakup tugas urusan lalu-lintas jalan, pariwisata, dan pemberian izin kepada perusahaan perdagangan lokal.
- (9) Departemen Perindustrian dasar pertambangan, sama dengan Departemen Perindustrian menyerahkan sebagian tugas kepada pemerintah daerah.

Di samping penyerahan tugas-tugas dari berbagai departemen, pemerintah Daerah Istimewa Aceh menyelenggarakan urusan-urusan lain sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Pembangunan di bidang pemerintahan juga ditandai dengan ditentukannya pimpinan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku pada waktu itu, yang terdiri atas kepala daerah, termasuk wakil kepala daerah dan DPRD-GR. Sementara itu dibentuk pula dinas-dinas daerah di bidang teknik.

Majelis Ulama Aceh sejak dibentuknya Daerah Istimewa Aceh, sesuai dengan pengakuan keistimewaan di bidang agama, menduduki posisi penting. Majelis ini bertugas membantu pemerintahan daerah dalam bidang pelaksanaan unsur-unsur syari'ah Islam di Aceh.

Di dalam pembangunan Pemerintah di Aceh terutama dalam pembentukan institusi-institusi pemerintah dan alat-alat pelaksanaannya dengan jelas terlihat bahwa perencanaan pembangunan di segala sektor dikerjakan secara profesional. Hal ini terbukti dengan dibentuknya suatu lembaga khusus yaitu BPPA/ADB yang bertugas sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga ini adalah cikal-bakal terbentuknya BAPPEDA pada masa-masa selanjutnya.

Kepala daerah dalam pelaksanaan tugas hariannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian dan sebuah sekretariat daerah.

Untuk pelaksanaan pemerintahan pada daerah tingkat II, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dibagi lagi menjadi tujuh kabupaten, dua kotamadya, dan satu perwakilan kabupaten. Tujuh kabupaten itu ialah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan serta dua daerah kotamadya yaitu Banda Aceh dan Sabang, Sebuah perwakilan kabupaten yaitu Perwakilan kabupaten Aceh Tengah di Kutacane.

Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah di Kutacane yang meliputi batas Kewadanaan Gayo Luas dan Kewedanaan Tanah Alas, sejak 21 Mei 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan dihapusnya pemerintah kewedanaan di Aceh, hirarchi kekuasaan di Daerah Istimewa Aceh secara berturut-turut dari atas ke bawah ialah gubernur, bupati walikota, camat, mukim, dan gampong.

Bersama dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintah di Aceh, juga dibentuk kembali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan ini pada saat pelantikannya yang bersamaan dengan pelantikan

gubernur pada 27 Januari 1957 disebut Dewan Perwakilan Rakyat Peralihan. Dewan ini memiliki anggota, yang terdiri atas 23 orang Masyumi, empat orang Perti, seorang PNI, seorang PKI, dan seorang Perkindo.

Penentuan jumlah anggota dewan perwakilan itu didasarkan kepada perolehan suara masing-masing partai yang ada di Aceh pada waktu diadakan Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955. Muhammad Abduh Syam ditetapkan sebagai ketua dewan dan wakilnya adalah H.M. Balwy.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan yang dibentuk itu mengalami perubahan pada tahun 1959, yang didasarkan pada Penpres No. 6 tahun 1953. Dewan yang baru itu dilantik pada 2 Nopember 1960. Pada 18 September 1961 sekali lagi terjadi perubahan dewan itu menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Dewan perwakilan yang disebut terakhir, berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, diketahui oleh gubernur kepala daerah. Oleh karena itu Gubernur A. Hasjmy di samping menjadi gubernur kepala daerah juga menjadi ketua DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh.

Masa sesudah penyelesaian pemberontakan Darul Islam di Aceh adalah masa pembangunan masyarakat di segala bidang. Keadaan perekonomian negara yang mengalami kemerosotan pada tahun-tahun akhir masa orde lama memang memberikan pengaruh yang amat terasa dalam usaha-usaha pembangunan tersebut. Keadaan yang tidak menguntungkan itu berangsur pulih, apa lagi dengan dimanfaatkan Pelita demi Pelita selama masa Pembangunan Jangka Panjang I, rakyat di daerah Aceh dapat berdiri dan berkiprah sejajar dengan rakyat-rakyat di daerah lain dalam suatu wawasan nasional Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Ibrahim, (1987). *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ali, Abdullah (ketua tim), (1985). *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Amin, S.M., (1956). *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*. Jakarta: Soeroengan.
- (1956). *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Arief, Abdullah, (1946). *Di sekitar Peristiwa Pengkhianatan Tjumbok*. Kutaradja: Penerbit Pengarang Sendiri.
- Boland, B.J., (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- Dua Windu Kodam I Iskandar Muda*. (1972) Kutaradja: Jarahdam I Iskandar Muda.
- Dijk, C. Van (1983) *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Gaharu, Sjamuan, (1990). "Rahasia Keistimewaan Aceh: Saatnya dibuka Sekarang", *Peristiwa*. No. 95.
- (1990). "31 Tahun Daerah Istimewa Aceh" *Waspada* Tanggal 26, 28, 29, 30, 31 Mei dan 1 -2 Juni.

- Gelanggang, A.H., (1956). *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*. Kutaradja: Pustaka Murni Hati.
- Hasjmy, A., (1984). "Darul Islam Perjalanan Sejarah", *Sinar Darussalam*, No. 139.
- (1991). "Latar belakang Pembentukan Daerah Istimewa Aceh", *Sinar Darussalam*. No. 197/198.
- (1976). "Peranan Agama Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia", *Sinar Darussalam*, No. 68.
- Hussain, Abdullah, *Peristiwa*, (1965), Kuala Lumpur: Pusaka Antara.
- Ibrahaim, Muhammad. (1977-1978) *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* Banda Aceh: Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah.
- (1979-1989). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) Daerah Propinsi Aceh*. Banda Aceh Peroyek Invenraisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ibrahimi, M. Nur El., (1967). *Teungku Muhammad Daud Beureuh*. Jakarta: Gunung Agung.
- , "Tanggapan terhadap buku Dr. Cornelis Vandjik Darul Islam Sebuah Pemberontakan", *Sinar Darussalam*, No. 197/198
- Ismuha, (1984) "Mempoekenalkan Daerah Istimewa Aceh", *Sinar Darussalam*, No. 142.
- Ismail, Muhammad Gade (1991) *Pasai dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: IDSN.
- Kementrian Penerangan RI (1953) *Keterangan Pemerintah dan Jawaban tentang Peristiwa Daud Beureuh*.
- Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia Dari Serangan Belanda*, (1990) Jakarta: Penerbit Beuna.
- Medan Area Mengisi Proklamasi*, (1976), Medan: Biro Sejarah Prima
- Modal Revolusi 45*, (1960). Kutaradja: Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh.

- Moehadi, (1981) *Riwayat Singkat Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia*, Semarang: Aneka.
- Reid, Athony, (1987). *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Saleh, Hasan, (1956) *Revolusi Islam di Indonesia*. Darussalam: Pustaka Djihad.
- (1992). *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersambung untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sarjono, dan GL. Marsadji, (1982) *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera, 1945-1950-(1984)*. Medan: Dinas Sejarah Kodam II Bukit Barisan.
- Siegel, James T., (1969). *The Rope of God*. Berkeley And Los Angeles: The University of California Press.
- Sjamsuddin, Nazaruddin (1990), *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta Gramedia.
- Talsya, TK. Alibasyah, *Sejarah dan Dokumen Pemberontakan di Atjeh*. Djakarta: Penerbit Kesuma, Tanpa angka tahun.
- Wiwoho, B. (1985) *Pasukan Meriam Nukum Sanani: Sebuah Pasak dari Rumah Gadang Indonesia Merdeka*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Zamzami, Amran, (1991), *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang.

Lampiran 1

**UNDANG-UNDANG TENTANG
PEMERINTAH SUMATERA
No. 10 TAHUN 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MENIMBANG:

- a. bahwa melihat luasnja Sumatera perlu dibagi dalam tiga propinsi
- b. bahwa pemerintah daerah akan diatur berdasarkan kedaulatan rakjat dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

MENGINGAT:

pasal 5 ayat (1), 18, 20, ayat (1) Undang-undang Dasar dan 4 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Serta Maklumat Wakil Presiden tgl. 16 oktober 1945 No. 10, dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Undang-undang sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN SUMATERA**Pasal 1.**

Sumatera dibagi mendjadi tiga propinsi yang masing-masing mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

Pasal 2.

Propinsi-propinsi yang tersebut pada pasal 1 ialah:
Propinsi Sumatera Utara: yang meliputi Keresidenan kesejahteraan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli;

Propinsi Sumatera Tengah: yang meliputi Keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi;

Propinsi Sumatera Selatan: yang meliputi Keresidenan-keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.

Pasal 3

1. Bentuk Susunan, kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Propinsi-propinsi ditetapkan dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah.
2. Sebelum dapat di bentuk dan disusun menurut ketentuan dalam ayat(1) diatas, maka Pemerintah propinsi terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Executief Propinsi.
3.
 - a. Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi terdiri dari anggota-anggota yang djumlahnya dan pemilihannya seperti Dewan Perwakilan Propinsi Sumatera pada saat berlakunya undang-undang ini, disesuaikan dengan pembagian Sumatera menjadi tiga Propinsi menurut pasal 2.
 - b. Dewan Perwakilan Rakjat propinsi diketuai oleh Gubernur yang tidak mempunyai hak suara.
4.
 - a. Badan Executief Propinsi terdiri dari anggauta-anggauta Dewan perwakilan Rakyat Propinsi.
 - b. Badan Executief Propinsi mendjalankan Pemerintahan sehari-hari bersama dan diketuai oleh Gubernur yang mempunyai hak suara.

Pasal 4.

Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan propinsi diadakan suatu komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih landjut ditetapkan dengan peraturan lain.

Pasal 5.

1. Peraturan-peraturan lainnja jang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku.
2. undang-undang ini berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta pada
tgl. 15 April 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI

SOEKIMAN

Lampiran 2

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI
pengganti
PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 8/Des/WKPM
tahun 1949 tentang pembentukan Propinsi Atjeh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyempurnakan dan melantjarkan pemerintah daerah dalam Propinsi SUMATERA-UTARA dipandang perlu memetjah propinsi SUMATERA UTARA menjadi dua bagian yakni propinsi Atjeh jang meliputi daerah keresidenan Atjeh dahulu ditambah dengan sebagian dari daerah kabupaten Langkat dahulu jang terletak di luar daerah Negara Sumatera-Timur, dan Propinsi Tapanuli Sumatera Timur jang meliputi daerah Propinsi Sumatera-Utara sesudah dikurangi dengan daerah Negara Sumatera timur dan daerah jang akan di masukkan dalam daerah propinsi Atjeh;
 - b. bahwa pembentukan daerah propinsi menurut ketentuan dalam pasal Undang-undang No. 22 tahun 1948 harus diatur dalam Undang-undang;
 - c. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 3 dari Undang-undang no. 2 tahun 1949 di dalam menjalankan kekuasaan menetapkan peraturan Wakil perdana Menteri pengganti undang-undang, wakil perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat jang angaota-angautanja diangkat oleh presiden;
 - d. bahwa badan penasehat termaksud dalam huruf c sampai kini belum terbentuk, sehingga kekuasaan Wakil Perdana Menteri untuk membuat peraturan

pengganti undang-undang belum dapat dijalankan;

- e. bahwa kepentingan menjempurnaan dan usaha melantjarkan pemerintahan, begitu pula keinginan umum akan segera terbentuknja suatu sistim pemerintah daerah berdasar atas undang-undang no. 22 tahun 1948 menghendaki segera terbentuknja kedua propinsi termaksud dalam huruf a, untuk sementara dengan peraturan Wakil Perdana menteri pengganti peraturan Pemerintah;

Mengingat : a. Pasal 2, 3 dan 4 undang-undang no. 2 tahun 1949;
b. Undang-undang no. 22 1948;

M E M U T U S K A N :

- I. Menghapuskan keresidenan Atjeh dari Propinsi Sumatera Utara dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat daerah keresidenan tersebut.
- II. Menghapuskan Propinsi Sumatera-Utara dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- III Menghapuskan keputusan-keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16-6-1949 No. 21/Pem/PDRI dan tanggal 17-5-1949 No.22/Pem./PDRI.
- IV. Menghapuskan peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah pembentukan Propinsi ATJEH, sebagai berikut:

Diumumkan
pada tanggal 23 Desember 1949
Secertaris

Ditetapkan di Kutaradja pada
tanggal 17 Des 1949
Wakil Perdana Menteri
A. N. Presiden Republik Indonesia

Marjono Danubroto

MR. Sjafrudin Prawiranegara

Lampiran 3

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1950
tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatera Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (1) dan pasal IV Aturan peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 10 tahun 1948 dan Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang Pembagian Sumatera menjadi tiga Propinsi.

MEMUTUSKAN :

- I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan pemerintah No. 8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang Pembagian Sumatera Utara menjadi dua Propinsi;
- II. Mengesahkan penghapus pemerintah daerah keresidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah keresidenan-keresidenan tersebut;
- III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut:

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN

(dtt.) ASSAAT
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
(dtt) **SOESANTO TIRTOPRODJO**

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN

(dtt) **A.G. PRINGGODIGDO.**

24-8-50

Lampiran 4

(Dikutip dari Harian Tegas Kutaradja)

RESOLUSI menentang anasir-anasir jang menghina ulama.

KONGRES Pusa-Pemuda Pusat jang berlangsung di Kutaradja, pada tanggal 22 sampai 27 Desember 1950 jang dihadiri oleh 755 utusan, telah mengambil resolusi sebagai berikut:

- MENIMBANG** : bahwa pada waktu jang achir-achir ini, diluar Atjeh orang banjak membuat propokasi terhadap Atjeh, dengan menghina ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin rakyat, baik dalam surat-surat kabar atau dengan djalan-djalan lain, umpamanja perbuatan T. Hanafiah c.s.
- MENGINGAT** : bahwa hasutan dan penghinaan itu, menjebabkan:
- a. timbulnya kekatjauan dan perpetjahan nasional
 - b. timbul kemarahan jang hebat dalam kalangan rakyat Atjeh.
- BERPENDAPAT** : bahwa membiarkan anasir-anasir tsb berleluasa, berarti membiarkan timbulnja kekatjauan dan perpetjahan nasional, serta membesarkan kemungkinan bernjala kembali dendam kusumat lama.
- MEMUTUSKAN**: a. Mengandjurkan Pemerintah supaya mempergunakan kebidjaksanaannja buat mentjegah berleluasanja anasir-anasir yang tidak sehat itu.
- b. Menentang sekeras-kerasnja penghinaan dilakukan oleh anasir-anasir tersebut terhadap ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin rakyat Atjeh.

Kutaradja, 24 Desember 1950
 A.N. Kongres Pusa-Pemuda Pusa
 Pengurus Besar Pusa
 Ketua

Tgk. Mohd. Daoed Beureueh

Lampiran 5

ANGKATAN DARAT
RESIMEN-1/S.T.A

PENGUMUMAN

No.:PENG.001/12/1956

1. Berdasarkan pernyataan melepaskan hubungan dari Pemerintah Pusat di Jakarta oleh Komando Tentara dan Terri Torium-1/Bulit Barisan tanggal 22 Desember 1956.-
 - 1.1. Melepaskan hubungan Komando Resimen-1/Terri Torium-1/Bukit Barisan dari Terri Torium-1/Bukit Barusan.-
 - 1.2. Mulai tanggal 22-12-1956 tidak lagi mengakui pasukan Induknya sebagai Komando Terri Torium/Bukit Barisan,-
 - 1.3. Resimen-1/S.T.A. menggabungkan diri serta setia tunduk dan patuh kepada Pemerintah Pusat/Kepada Staf Angkatan Darat
 - 1.4. Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil kendali Pemerintah Daerah Aceh taktis dan Administratif dibawah Pemerintah Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta.
2. Maka di umumkan.
 Mulai tanggal 22 Desember 1956 Jam 0600 W.s.u. berlaku Peraturan S.O.B.(Keadaan dalam Perang dan keadaan Bahaya) diseluruh Daerah Resimen-1/STA (Daerah Swatantra Aceh).
3. SELESAI.-

Dikeluarkan di : Staf Kwartier Resimen-1/STA.
 Pada tanggal : 22 Desember 1956.-
 Pada Jam. : 06.00 W.s.u.-

KOMANDAN
 RESIMEN-1/S.T.A/

dto

SJAMAUN GAHARU
 MAYOOR. INF. NRP.

Dikutip dari *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, Kutaraja, Jarahdam I/Iskandar Muda, (1972)

Lampiran 6

PIAGAM LAM TEH

1. Kami sebagai putera-puteri Aceh bertanggung jawab terhadap hari depan Aceh yang kami cintai, dan merasa berkewajiban untuk membangun Aceh kembali dalam segala bidang.
2. Pembangunan yang sangat dirindukan oleh rakyat Aceh, yang harus kami laksanakan, yaitu pembangunan dalam bidang agama Islam dalam arti yang luas, pembangunan dalam bidang fisik juga dalam arti yang luas dan pembangunan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan adat, yang kesemuanya harus tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
3. Untuk dapat melaksanakan cita-cita pembangunan Aceh kembali, kami bersepakat untuk secepatnya menghentikan pertempuran antara sesama putera Indonesia di Aceh.

Sebagaimana di-kutip dalam A. Hasjmy, Semangat Merdeka, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hal., 484.

Lampiran 7

KOMONTE DEWAN REPOLUSI NBA
No.1

S E R U A N

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT NBA (M A D J L I S S Y U R A)

Bismillahirrochmanirrohim

1. Pada tanggal 15 Maret 1959, djam 10 WA oleh Kolonel TII Hasan Saleh sebagai Menteri Urusan Perang, telah diambil alih pimpinan NDA sipil dan militer dari tangan Wali Negara Tgk. M. Daud Beoroeuh . Pada waktu itu djuga Tgk. M. Daud Beoroeuh telah dibebaskan dari djabatannya sebagai Wali Negara dan Panglima Tentara Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhl' Ditiro,serta membubarkan kabinet.
2. Guna pengganti Wali Negara dan Kabinet, telah dibentuk sebuah Dewan Repolusi telah mendjalankan kekuasaannya atas organisasi NBA sipil dan militer.
3. Dengan hal ini saja Ketua Dewan Perwakilan Rakjat perlu mengeluarkan ketentuan2 sebagai berikut :
 - a. Saja mengakui adanja Dewan Repolusi sebagai Penguasa jang sah atas NBA sipil dan militer.
 - b. Dewan Perwakilan Rakjat tetap merupakan suatu Lembaga resmi disamping Dewan Repolusi, guna menerima pertanggungan djawaban dari Dewan repolusi.
 - c. Saja menjatakan putus pertanggungan djawab dengan bekas Kabinet Hasan Ali jang telah dibubarkan oleh Dewan Repolusi dan menjerukan semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak mengadakan hubungan dinas apa2 lagi dengan mereka ini.

4. Kepada anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat dengan saja serukan:
 - a. Supadja dalam hubungan2 Dinas hanja mengadakan kontak dengan pimpinan Dewan Repolusi, sebagai suatu pemerintah NBA jang sah.
 - b. Dalam bidang kemiliteran berhubungan hanja kepada Panglima Tentara Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhl' Ditiro, Kolonel TII Hasan Saleh.
 - c. Supaja memberikan bantuan moril jang sepenuh2nja kepada Dewan Repolusi untuk menstabilkan keadaan dan djangan sekali2 memperlihatkan sikap jang menentang terhadap Dewan Repolusi, sebab konsekwensinja amat berat kelak.
5. Kepada rakjat umum saja serukan supaja membantu Dewan Repolusi jang bermaksud membawa rakjat Atjeh ini kesuatu tempat jang mulia dan bahagia. Djangan sekali2 mengeruhkan keadaan dengan memperlihatkan sikap an tindak-tanduk serta mengeluarkan utjapan2 jang memetjah belah kaena pasti perbuatan demikian akan merugikan diri kita sendiri. Hindarkanlah diri daripada orang2 jang sengadja mengatjau dan djanganlah mendengar budjukan2 mereka ini.
Marilah kita semua bahu membahu membantu Dewan Repolusi dalam perdjoangannja jang mulia itu !

ATJEH BESAR, 26 MARET 1959.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT NBA (MADJLIS SJURA)

Ketua

TGK. AMIR HUSIN ALMUDJAHIT

Lampiran 8

KOMUNIKASI DEWAN REPOLUSI NBA
No. 2

PERNJATAAN
WALI NEGARA N.B. - A N.I.I

Bismillahirrahmanirrahim

1. Seluruh Indonesia malahan seluruh dunia telah mengetahui bahwa pemindahan kekuasaan N.B.A.- N.I.I. dari tangan Tgk. Daud Beureuh sebagai Wali Negara dan Panglima T&T Tgk. Tjhl' Ditiro T.I.I. telah berlangsung di Me Tareodan pada tanggal 15 Maret, dilakukan oleh Kolonel T.I.I. Hasan Saleh.
2. Sedjak itu kekuasaan N.B.A - N.I.I. berada ditangan sebuah Dewan Repolusi jang Putjuk Pimpinannya berada ditangan saja selaku Ketua Dewan Perwakilan untuk mengganti Wali Negar Dewan Repolusi untuk pengganti Kabinet dan Kolonel Hasan Saleh ditundjuk mendjadi Panglima T&T Tgk. Tjhl' Ditiro Tentara Islam Indonesia.
3. Malahan dalam Rapat Dewan Repolusi tanggal 25 Maret 1959, sudah tegas sebutan Dewan Pertimbangan telah dirobah dengan sebutan Wali Negara kembali, dan secjara tunggal saja telah ditundjukan sebagai WALIL NEGARA.
4. Pengambilan alihan Pimpinan N.B.A ini sedikit banjaknja telah membawa kegontjangan dalam masjarakat dan rakjat Atjeh bahkan oleh dan dalam tubuh para pedjuang sendiri, mengakibatkan timbulnja tafsiran2 dan pendapat2 jang keliru, jang kesemuanya itu disebabkan oleh pitnahan dan hasutan2 pihak yang ingin menangkuk di air jang keruh.
5. Ketahuilah satu Pengambilan alihan Pimpinan N.B.A- N.I.I. in sekali-kali tidak didasarkan atas sentimentil terhadap pribadi Tgk.

M. Daud Beureueh, malahan se-mata2 didorong oleh rasa tanggung djawab bersama untuk menjelamatkan dua djuta umat di Atjeh Darussalam ini, serta untuk membentuk hari besar angkatan muda dengan bahagia dan mulia, atau dengan tegas saja katakan untuk melandjutkan saja katakan tjita2 umat Islam Atjeh jang sedang berdjuang dengan djalan jang wadjar.

6. Dewan Repolusi NBA- NII in akan meneruskan permusjawaratan dengan Pemerintah R.I. serta akan mendjadikan musdjawarah ini sebagai prinsip dan bukan untuk taktik BERMUSDJAWARAH IALAH MEMPERBINTJANGKAN SEMUA SOAL MELALUI DIPLOMASI, DAN SEKALI-KALI TIDAK DAPAT DIARTIKAN DENGAN " MENJERAH".

Dalam musdjawarah bukan maksud mentjari menang dan kalah, tetapi di atas hasil musdjawarah kelak, kita menerima sebahagian dan pihak Pemerintah R.I. menerima sebahagian dari tjita2 kedua belah pihak, dua inilah yang dinamakan perdamaian . Adanja persatuan dan kembali bersatu sebagai hasil musdjawarah kelak, bukanlah sama sekali penjerahan atau menjerah, malahan itulah kewadjiban kita untuk damai dan bersatu selandjutnya untuk melandjutkan Repolusi 17 Agustus 1945, jang sudah pernah medjadkan kewadjiban sutji kita Ummat Islam didaerah Atjeh masa yang lalu.

7. Dari itu dengan ini kami srukan kepada seluruh pegawai sipil - polisi dari N.B.A - N.I.I. dan anggota TII seluruhnjah agar tetap tenang dan masing2, pada tugas dan bantulah kami sehingga usah2 berjalan sebagaimana mestinjah. Hindarilah hasut menghasut dan pitnah memfitnah serta awas dan waspada kepada anasir djahat jang selalu siap mengambil kesempatan dalam kesempitan, malahan tetap ta'at dan patuhlah saudara2 kepada masing2 Kepala Instansi dan Komandan2 Tentara jang bertanggung djawab menyelamatkan tjita2 mulia dan bahagia dari Dewan Repolusi, sehingga berhasil di ketjap tafsiran2 sendiri jang merugikan, djauhilah berita2 bohong yang mengatjaukan, jang merusakkan persatuan kita, penghalang bagi tjita2 baik dari Dewan Repolusi N.B.A - T.I.I.

ATJEH, 26 MARET 1959.
WALI NEGARA N. B.A. - T.I.I.

TEUNGKU AMIR HUSIN AL MUDJAHID

- a. Supaja dalam hubungan2 Dinas hanja mengadakan kontak dengan pimpinan Dewan Repolusi sebagai suatu Pemerintah NBA jang sah.
- b. Dalam bidang kemiliteran hanja berhubungan kepada Panglima Tentara Islam Indonesia T&T Tgk. Tjhl' Ditiro, Kolonel TII Hasan Saleh.

Lampiran 9

PERNJATAAN

“BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM”

KAMI Komandan-komandan Regiment III SALAHUDDIN, Regiment II SAMUDRA, Regiment V LAUT TAWAR, Regiment VII THARMIHIM dan Regiment IV BATEE TUNGAI, Bupati/ Kepala Daerah Kabupaten ATJEH TIMUR, ATJEH UTARA dan ATJEH TENGAH beserta seluruh instansi-instansi dan bawahan dalam lingkungan masing-masing, setelah; _____

1. Memperhatikan : Tindakan-tindakan bekas WK. P.M.Abd., Gani Usman (Ajah Gani), bekas Menteri Urusan Perang Kolonel Hasan Saleh dan kawan-kawannya, yang telah menjatakan pengambilalih kekuasaan NBA/NII dari Wali NEGARA/KABINET dan membentuk apa yang dinamakan DEWAN REVULUSI serta PROGRAM-PROGRAM pelaksanaannya sedjak tangla 15 Maret 1959 yang baru lalu, yang tudjuannya telah berkisar dari dasar semula perjuangan NBA/NII: _____
2. Melihat : Bahwa segala usaha-usaha terakhir yang dilakukan selama ini, baik oleh kami sendiri, oleh P.M. dan Menteri-menteri NBA/NII oleh ketua Madjelis Sjura dan lain-lain, dalam rangka supaya Ajah Gani dan Kolonel HASAN SALEH cs kembali mengutuhkan NBA/NII dan menghentikan segala gerakan-gerakan jtsb. serta bekerja kembali sebagai Pemimpin-pemimpin NBA/NII lainnya untuk meneruskan perjuangan ini, baik melalui perundingan-perundingan/atau diplomaasi dengan pihak R.I. (Djalan Damai)Ataupun

tjara lainnja, tetapi ternjata tidak di terima oleh saudara-saudara tersebut:___

3. Mendengar : Pendapat-pendapat/Keputusan-keputusan dalam sidang jang kami adakan pada tanggal 31 Maret 1959 diATJEH TIMUR:_____
4. Mambatja : Surat saudara Hasan Saleh tanggal 18 April 1959:
5. Mengingat : BAI'AH KAMI DAN ANGGOTA-ANGGOTA BAWAHAN KAMI:

Memutuskan :

DENGAN INI KAMI MENJATAKAN, BAHWA KAMI BESERTA SELURUH INSTANSI DAN ANGGOTA BAWAHAN DALAM LINGKUNGAN MASING-MASING:_____

1. TETAP SETIA DAN THA'AT KEPADA PADUKA JML. WALI NEGARA/PANGLIMA TEUNGKU MUAHAMMAD DAUD BEUREUEH DAN PEMERINTAH PUSAT NEGARA BAHAGIAAN ATJEH NEGARA ISLAM INDONESIA ,dan
2. MENDUKUNG SEPENUHNJA MAKSUD-MAKSUD PE MERINTAHAN NBA/NII DALAM MENEMPUPH DJALAN PERUNDINGAN/PERDAMAIAN DENGAN PIHAK R.I.:_____

Dikeluarkan di : ATJEH TIMUR

Pada tanggal : 24 April 1959

Pada Djam : 12.00 W. Atjeh

1.
KOMANDAN REGIMENT III
SALAHUDDIN
s.d.t.o.
(RAZALI IDRIS)
Major TII

2.
KOMANDAN REGTIMEN II
SAMUDRA
s.d.t.o.
(H.IBRAHIM)
Let. Kol.TII

3.
KOMANDAN REGIMENT V
LAUT TAWAR
s.d.t.o.
(IJLAS LEUBE)
Let. Kol. TII

5.
BUPATI/K.D.K./A. TIMUR
PATIH
s.d.t.o.
(ABUBAKAR AMIN)

7.
BUPATI/K.D./A. TENGAH
s.d.t.o.
(SALEH ADRY)

4.
KOMANDAN REGIMENT VII
THARMIHIM
s.d.t.o.
(H.HASANUDDIN)
Mayor TII

6.
BUPATI/K.D.K./A. UTARA
s.d.t.o.
(H.AFFAN)
Let. Kol. TII

8.
KOMANDAN REGIMENT IV
s.d.t.o.
(TEUKU RADJA IDRIS)
Mayor TII

Sumber : M. Nur EL Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*. Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 10

**KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
No. 1 Missi/1959**

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

- Berkehendak : mengambil langkah kebidjaksanaan untuk lebih medjamin penjempurnaan dan pembangunan dalam daerah swatantra tingkat ke I Atjeh;
- Menimbang : bahwa untuk maksud tersebut di pandang perlu membenarkan sebutan "Daerah Istimewa Atjeh" kepada Daerah Swatantra Tingkat ke I Atjeh sebagai stimulans untuk mengadjudkan otonomi seluasnja, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1957 tentang pokok-pokok pemerintah Daerah;
- Memperhatikan: pertimbangan Komandan Komando Daerah Militer Atjeh dan Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat ke I Atjeh;
- Mengingat : Kuasa jang telah diberikan oleh Dewan Menteri dalam sidangnja ke-159 pada tanggal 31 Djanuari 1959 Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 1996/P.M/1959 tanggal 19 Mei 1959;

MEMUTUSKAN:

- Pasal 1. Daerah Swatantra TK. I Atjeh dapat disebut "Daerah Istimewa Atjeh" dengan tjatatan, bahwa kepada Daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah swatantra TK. ke I seperti termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundangan jang berlaku untuk Daerah Swatantra tingkat ke I mengenai otonom jang seluas-luasnya, *Terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan:*

Pasal 2. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 26 Mei 1959 sampai ada ketentuan lain;

Pasal 3 Memberikan instruksi kepada segenap Kementrian, Djawatan dan Dinas yang bersangkutan, agar memberikan bantuan seperlunya kepada Daerah swatantra tingkat ke I Atjeh (Daerah Istimewa Atjeh) dalam pertumbuhan otonomi yang seluasnja.

WK. Perdana Menteri I/Ketua
Missi Pemerintah ke Atjeh

dto.

= Mr. Hardi =

Turunan dikirimkan kepada:

1. Semua Menteri,
2. K.D.M.A.
3. Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tk. ke I Atjeh (Daerah Istimewa Atjeh).
4. Dan lain-lain instansi yang bersangkutan.

Sumber: M. Nur EL Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*
Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 11

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.180 TAHUN 1959.
KAMI. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca:

Surat Menteri/Keamanan Pertahanan tanggal 15 Agustus 1959

Menimbang:

Bahawa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh untuk kembali ke pangkuan Negara

Bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa perlu memberikan amnesti dan abolosi kepada orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Derah Aceh

Mengingat:

Undang2 Dasar pasal 14

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:****PERTAMA:**

Memberikan amnesti dan abolisi kepada orang2 yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh. yang sebelum ditetapkannya keputusan ini telah melaporkan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa perang Daerah Aceh.

KEDUA:

1. Dengan pemberian amnesti. Semua akibat hukum-pidana terhadap orang2 yang termaksud dalam ketentuan Perang pertama dihapuskan.-

2. Dengan pemberian abolisi. Terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan pertama ditiadakan.-

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 15 Agustus 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

s.t.o.

SUKARNO

diundangkan

Pada tanggal 15 Agustus 1959.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN.

d.t.o.

SUHARDJO

-OOOOO-

Sumber : *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*. Kutaradja: Jaradam I/Iskandar Muda, 1972.

Lampiran 12

DA'WAH**DENGAN MEMPERHATIKAN:**

1. Niat baik jang terkandung dalam surat Kolonel M. Jasin kepada kami tertanggal 7 Maret 1961, sebagai sambungan lidah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjampaikan amanat Pemerintah kepada jang mengharapkan Kembalinja kami dengan tjara jang selajaknja dan untuk memulihkan keadaan dlahir bathin didaerah Atjeh seperti dimaksud oleh Surat Kolonel M. Jasin kepada kami tertanggal 5 Agustus 1961.
- II. Hasrat dan keinginan rakjat Atjeh dewasa ini sebagaimana jang telah disampaikan kepada kami setjara langsung oleh Delegasi Pemuka-pemuka Rakjat Atjeh (jang diutus oleh pihak KDMA kepada kami dan sampai ditempat kami pada tanggal 4 Okteber 1961) jang terdiri dari:
 1. H. Ibu Sa,adan (Residen D/p Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh). sebagai Ketua Delegasi.
 2. Majoor Daud Hasan (Wakil Kepala Staf KMDA), sebagai Wakil Ketua Delegasi.
 3. Dr. T. Iskandar (Wakil Presiden Universitas Sjiah Kuala), sebagai Wakil Golongan Tjerdik Pandai.
 4. A. Gani Usman (Wakil Ketua BPH Daerah Istimewa Atjeh).
 5. T. Ali Keurukon (Anggota BPH Daerah Istimewa Atjeh).
 6. T. Usman Ja'cob (Wali Kota Kota Besar Kutaradja).
 7. Zaini Bakri (Bupati/Kepala Daerah Tingkt II Atjeh Besar).
 8. Ibrahim Abduh (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh Pidie).
 9. Usaman Aziz (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh Utara).
 10. Radja Wahab (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh Tengah).
 11. Tgk. M. Daud (Pati/Kepala Bupati Atjeh Timur).

12. T. Tjut Mamat (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh Selatan).
13. M. Jusf (Komisaris Muda Polisi/Kepala Kepolisian A. Barat).
14. Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba (Ulama/Pemimpin Rakjat).
15. H. Abu Bakar Ibrahim (Ulama/Pemimpin Rakjat).
16. Pawang Ieman (Pemimpin Rakjat).
17. Nja' Abbas (Patih d/p Kantor Bupati Atjeh Pidie).
18. Tgk. Muhjiddin Jusuf (Ulama/Pemimpin Pemuda).
19. Abdullah Muzakkir Walad (Veteran Pedjuang '45/ex Komd. CPM Div. X TNI).
20. Nja' Na Hamzah (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
21. Isma'il Usman (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang).
22. A.M. Ahmady (dari Golongan Pemuda).
23. M. Thahir Mahmud (dari Golongan Pemuda).
24. Hasanuddin (dari Golongan Pemuda).
25. Gazali Idris (dari Golongan Pemuda).
26. Usman (R.S.U.) Bireuen/Wakil P.M.I.).
27. Insja (Wakil Golongan Buruh).
28. Chairmeng (Wartawan Photograaf).

Delegasi melalui Djurubitjara-djurubitjara mereka (M. Jusuf dan A. Muzakkir Walad) dan Ketua Delegasi (H. Ibnu Sa'adan) dalam pertemuan-pertemuan dengan kami pada tanggal 4 dan 5 Oktober, telah memajukan permintaan kepada kami untuk kembali memimpin mereka dan Rakjat Atjeh, guna kepentingan Agama dan Rakjat Atjeh, jang mereka Tjintai:

- III. Hasrat dan keinginan Djenderal A.H. Nasution (Menteri Keamanan Nasional) jang telah disampaikan Oleh kolonel M. Jasin (Panglima KDMA/ISKANDAR MUDA) serta hasrat kolonel Jasi sendiri jang disampaikannya setjara tulus ichlas dan dari hati de hati ketika beliau menemui kami ditempat kediaman kami pada tanggal 2 November 1961, dalam Pembitjaraan mana kepada kami pada telah dimajukan pengharapan-pengharapan agar kami kembali memimpin rakjat Atjeh;

Semua-semuanja itu(I,II dan III) telah dapat memberikan kejakinan jang tjukup kepada kami adanja keichlasan untuk memulihkan keadaan dlahir bathin didaerah Atjeh chususnja dan diseluruh Indonesia Umumnja;

DENGAN MENINGAT:

1. Penjataan Pesiden/Panglima Tertinggi dalam Decreet tertanggal 5 Djuli 1959 jang menjatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tahun 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan

Sumber: M. Nur El Ibranimy, *Teungku Muhamad Daud Beureueh*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 13

RENTJANA REALISASI

Dengan diterimanya Da'wah yang disampaikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh atas nama Rakjat Atjeh oleh Pemerintah RI, sebagaimana dimaksud oleh surat MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasution tertanggal 21 November 1961, terhadaplah kita kepada masalah pokok berikutnya, yakni tentang merumuskan Rentjana Realisasi selanjutnya.

1. Formuleering Realisasi Surat MKN/KASAD tertanggal 21 November 1961 sebagai jawaban terhadap DA'WAH tertanggal 4 November 1961, Oleh dan/antara utusan yang dipertajakan dari Teungku Muhammad Dawud Beureueh dan Panglima Kodam I/ Iskandar Muda yang telah diberi berwenang oleh Pemerintah dalam bentuk suatu rumusan Usul Rentjana Undang-Undang yang akan disampaikan kepada MKN/KASAD guna diteruskan kepada Pemerintah/DPRGR, sesuai pula sebagaimana dimaksud dalam amanat lisan MKN/KASAD kepada utusan Tgk. Muhammad Dawud Beureueh, dalam pertemuan beliau dengan utusan tersebut pada tanggal 14 November 1961 di ruang madjlis Meteri Keamanan Nasional di Djakarta, yang di hadiri juga oleh utusan-utusan Pangdam-I/Iskandar Muda yakni KASDAM-I Letkol. Njak Adam Kamil, Kepala Staf I Kapten Manan, dan juga oleh Letkol. Barkah Adjudant Menteri Keamanan Nasional. Dalam Amanat mana juga tersimpul satu ketetapan hati MKN/KASAD untuk menarik garis lurus yang benar-benar dapat mengatasi segala persoalan.
- II. Inisiatif Peperda sebagai memulakan mentjoba mengisi wadah sebagaimana dimaksud oleh MKN/KASAD mendapat penghargaan yang wadjar dari dari Tgk . Muhammad Dawud Beureueh , dengan do'a, semoga dengan dibarangi dengan inisiatif yang bermanfaat selanjutnya.
- III. Menjambut baik usaha menudju kepada penjelesaian keamanan dlahir bathin oleh pangdam I/Isakandar Muda yang telah diberikan wewenang oleh Pemerintah terbukti dengan kelahiran isi hati yang

mendalam dan ichlas dalam surat-surat jang dikemukakan sedjak semula adanja Da'wah, atas nama Rakyat Atjeh, ditambah pula dengan membenarkan pentjataan dan/atau pendaftaran sendjata dan/atau anggota pasukan dan/atau perorangan. Hal ini adalah djuga sebagai bukti bantuan moreel jang njata kepada Panglima Kodam I/Iskandar Muda, dalam menghadapi, masalah technis melaksanakan jang bersifat sungguh-sungguh untuk seterusnya dapat dipertanggung djawabkan kepada MKN/KASAD dan Pemerintah.

IV. Pemikiran jang pokok dalam djurusan usaha penjelasan bathin ialah:

- a. Sjari'at Islam dalam bentuk keseluruhan supaja selekas mungkin dapat dilaksanakan di (dalam Wilayah) Atjeh.
- b. Sosial dan Ekonomi :

Peradatan jang tersimpul di dalamnja sebagai pertumbuhan adat-istiadat Atjeh jang telah dipusakai turun temurun dan jang bersendikan Hukum dan Syari'at baikpun yang telah merupakan adat qanun dan adat resam, termasuk didalamnya:

1. Adat megow (pertanian)
2. Adat hareukat (perekonomian)
3. Adat Utoih Pandee (perindustrian).

- c. Kemakmuran: Pelaksanaan kemakmuran rakjat Atjeh chususnja dan Rakjat Indonesia pada umumnya dengan djalan membuka lapangan-lapangan hidup baru bagi Rakjat Atjeh sesuai dengan usaha dan tjita-tjita Pemerintah dalam membina kebangunan Rakajat Indonesia dalam kantjah perubahan politik, sosial ekonomi dunia jang modern sekarang ini, mengandjurkan Pemerintah dan rakjat menggali berbagai matjam kekajaan alam yang terkandung didalam bumi Atjeh, untuk kebahagiaan serta rahmat bagi kemakmuran seluruh umat antara lain-lain:

1. Perluasan dan penambahan pertambangan-pertambangan minyak yangtelah ada .

2. Pembukaan pertambangan emas, mangaan, bidji besi, timah, mica dan lain-lain.
 3. Pembukaan fabrik-fabrik kertas, semen, galangan kapal kapal ketjil untuk pelajaran partai dan lain-lain.
 4. Pembukaan kebun-kebun baru untuk menanam kopi, lada, teh, tjengkeh, getah, damar, sabut kelapa, kelapa sawit, nilam dan lain-lain, perluasan kebun-kebun yang telah ada dan/atau pembaharuan penanaman dari pohon pohon yang telah tua.
 5. Pembuatan, perbaikan serta penambahan lalu-lintas umum, lalu-lintas kampung-kampung dan rantau-rantau.
 6. Perbaikan serta penambahan alat-alat perhubungan darat, laut, maupun udara.
 7. Pelandjutan pembukaan dan pembetulan irigasi-irigasi besar maupun ketjil.
 8. Perbaikan usaha-usaha mentjari ikan dilaut, dan perusahaan pemelihara ikan diempang-empang didarat.
 9. Pembukaan rantau-rantau baru jang subur, dengan djalan mengadakan transmigrasi lokal.
- d. Pendidikan: Pendidikan yang mula dan rendah sampai kepada pendidikan jang tinggi harus sesuai dengan maksud kandungan adjaran sjari'at Islam, sebagaimana telah digaris sendikan oleh pahlawan-pahlawan agung pendidikan Atjeh Almarhum Sultan Iskandar Muda Almarhum Tgt. Sjiah Abdurrauf di kuala.
- Untuk ini diperlukan pembentukan suatu badan ahli dimana didalamnya duduk para ahli ilmiah Atjeh, guna dapat disimpulkan satu rumus jang baik guna dapat diudjudkan pelaksanaanja jang segera.
- e. Santunan terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin: santunan terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin harus menjadi tanggungan Negara, dan ditentukan dalam suatu bentuk UU khusus.

Keseluruhan apa jang tersebut diatas baru bisa berlaku apabila Usul rentjana sudah di terima dan diundangkan.

Mardlati'llah, 9 Radjab 1381 H

17 Desember 1961 M

Sumber: M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*,
Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 14

**STAF PENGUASA PERANG DAERAH
UNTUK DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

**-KEPUTUSAN PENGUASA PERANG-
No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962**

TENTANG

**KEBIDJAKSANAAN PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR
SJARI'AT AGAMA ISLAM
BAGI PEMELU KPEMELUKNJA
DI DAERAH ISTIMEWA ATJEH**

selaku

**PENGUASA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH
ISTIMEWA ATJEH**

- MENIMBANG :** 1. Bahwa keamanan Daerah Istimewa Atjeh yang telah ditjapai pada tanggal 17 Agustus 1961 memerlukan adanya usaha-usaha landjutan untuk mentjapai fasenormalisasi, konsolidasi dan stabilisasi bagi keamanan rakjat setjara merata menudju keamanan lahir dan bathin.
2. Bahwa sebagai salah satu unsur integrasi jang pokok dalam mentjapai keamanan lahir dan bathin sebagaimana dimaksud diatas, perlu segera mengambil tindakan, usaha-usaha, pemikiran-pemikiran jang luas dan mendalam guna me wudjukan otonomi jang seluas-luasnja bagi Daerah Istimewa Atjeh, terutama dibidang ke agamaan jang merupakan realita jang hidup terus menerus di tengah-tengah masjarakat Atjeh jang dipusakai turun menurun sedjak berabad-abad hingga sekarang ini.
3. Bahwa guna mengambil langkah-langkah

kebidjaksanaan untuk lebih mendjamin pemeliharaan penyempurnaan lahir dan bathin dan pembangunan dalam Daerah Istimewa Atjeh dalam rangka otonomi jang seluas-luasnja maka Penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh perlu segera mengusahakan kebijaksanaan berkenan dengan pelaksanaan unsur-unsur Syari'at agama Islam, hal mana adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 jang didjiwai oleh Piagam Djakarta tertanggal 22 djuni 1945 jang merupakan rangkaian kesatuan dengan kontitusi tersebut.

- MENGINGAT : 1. keputusan Presiden Republik Indonesia No.315 tahun 1959 tentang pernajaan keadaan Perang atas seluruh wilajah Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No, 23 tahun 1959 (PRP) fasal 6 ayat I
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 tentang pengangkatan Penguasa Perang dan dan Penentuan Daerah Hukumnja.

MENGINGAT PULA:

1. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 berikut pernajaan Missi Pemerintah pusat tertanggal 26 Mei 1959
2. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959.
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis dari pada Haluan Negara .
4. Ketapan Madjelis Pemusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No.II/MPRS/1960, tentang garis-garis besar pola Pembangunan

Nasional Semesta Bersentjana berikut lampiran-lampirannya.

5. Djalannya Revolusi kita, pedoman pelaksanaan Manipoli.
6. Revolusi-Sosialisme Indonesi-Pimpinan Nasional (Resopim).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERTAMA : Terlaksananya setjara tertib dan seksama unsur-unsur Sjari'ah Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknja di Daerah Istimewa Atjeh, dengan menindahkan peraturan-peraturan Negara.

KEDUA : Penertiban Pelaksanaan arti dan Maksud ajat pertama diatas diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Atjeh.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunja.

Ditetapkan di Kutaradja
Pada tanggal 7 April 1962.

PANGLIMA

DAERAH MILITER I ATJEH/ISKANDAR MUDA

selaku

PENGUASAAN PERANG DAERAH UNTUK DAERAISTIMEWA
ATJEH

d.t.o.

M. JASIN

KOLONEL INF. CNRP.10025

Sumber : M.Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureuh*
Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Lampiran 15

UNDANG-UNDANG PERGURUAN TINGGI
No. 2 Th. 1961 bertudjuan:

1. Membentuk Manusia susila jang berdjiwa Pantjasila dan bertanggung djawab akan terwudjunja Masjarakat Sosialis Indonesia yang Adil dan makmur, material dan spirituil.
2. Menjiapkan tenaga jang tjakap Untuk memangku djabatan jang memerlukan pendidikan tinggi dan jang tjakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.
3. Melakukan penelitian dan usaha kemadjuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudajaan dan kehidupan masjarakat

Lampiran 16

No.11/Sek/P.U.

**Departemen Perguruan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia.**

**KEPUTUSAN MENTERI
PERGURUAN TINGGI DAN PENGETAHUAN
No.11/1961
Tentang
PEMBUKAAN UNIVERSITAS SJIAH KUALA
DI BANDA ATJEH.**

**MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU
PENGETAHUAN**

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka perluasan dan pengembangan Perguruan Tinggi pada umumnya perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang ada, khususnya di Banda Atjeh;
2. bahwa persiapan kearah itu telah dijalankan oleh suatu Panitia Persiapan Universitas Negeri Sjah Kuala;
3. bahwa sambil menunggu diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas tersebut perlu menetapkan Keputusan sementara tentang pembukaan Universitas Sjah Kuala di Banda Atjeh;

Mengingat:

1. Pasal 31 dan Pasal II Aturan Peralihan,
2. Undang-undang darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 dengan segala perubahannya, tentang Universitas Negeri Gadjah Mada;
4. Organisasi Pengajaran Tinggi 1946 (Staatsblad tahun 1947 no. 47) yang telah berulang-ulang di rubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tahun 1949 (Staatsblad) 1949 no 289);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 17 November 1960 no 196450/U.U. jis, no 102925 tanggal 10 Desember 1960 tentang Panitia Persiapan Universitas Negeri Sjah Kuala dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Banda Atjeh.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan.
 1. Tanggal 12 Januari 1959 no. 3328/5, tentang Pendirian Fakultas Ekonomi di Banda Atjeh ;
 2. Tanggal 17 September 1960 no 79966/ U.U. tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu peternakan di Banda Atjeh;
7. Keputusan-keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
 1. Tanggal 20 Djuni no. 9/1961 tentang Pendirian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Banda Atjeh;
 2. Tanggal 20 Djuni 1961 no. 10/1961 tentang Penegerian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat di Banda Atjeh.

Lampiran 17

MEMUTUSKAN

SAMBIL MENUNGGU DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS SJIAH KUALA.

MENETAPKAN:

PERTAMA:

- a. mengadakan Universitas Sjiah Kuala jang berkedudukan di Banda Atjeh;
- b. Untuk pertama kali Universitas Sjiah Kuala tersebut diatas terdiri atas:
 1. Fakultas Ekonomi.
 2. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan.
 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 4. Fakultas Hukum dan Pengetahun Masjarakat.

KEDUA:

Biaja Penjelenggaran Universitas Sjiahkuala untuk tahun 1961 dibebankan pada keungan Jajaran Kessedjahteraan Atjeh dan untuk tahun Selandjutnja pada mata anggaran pendapatan dan belandja Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Tinggi jang disediakan untuk Universitas Sjiahkuala

KETIGA:

Penjelenggaraan dan Pelaksanaan dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1961 dengan ketentuan bahwa hari lahir (Dies Natalis) Universitas Sjiahkuala ditetapkan pada tiap-tiap tanggal 2 September.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djuli 1961.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN
ILMU PENGETAHUAN

dto

Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H.

Perpustakaan
Jenderal

9